

BAB1

PENYELENGGARA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. PENYELENGGARA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

16 Januari

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) maka Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan berbagai program strategis. Program tersebut dilakukan melalui peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pelaksanaan PROSPEK (Program Strategis Pemberdayaan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung). (*Cepos & Suluh Papua*)

Gubernur Lukas Enembe berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat asli Papua. Hal ini diwujudkan dengan mengeluarkan beberapa instruksi gubernur yang memihak terhadap rakyat Papua di antaranya penetapan hari penggunaan noken, satu hari tanpa nasi dan lainnya. (*Cepos*)

26 Januari

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengungkapkan mulai tahun ini pihaknya akan memulai program transmigrasi lokal Papua. Program ini sesuai dengan program pemerintah pusat dan disinkronkan dengan kebijakan dari gubernur Papua. (*Bintang Papua, Suluh Papua & Cepos*)

28 Januari

Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengungkapkan pihaknya bersama gubernur Papua dan MRP menolak secara tegas adanya pemekaran provinsi baru di Papua. (*Bintang Papua*)

30 Januari

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menuturkan saat ini Pemprov Papua sedang memperjuangkan revisi RUU Otsus Plus dengan melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga di Jakarta. Dengan adanya UU tersebut diharapkan ada kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah di Papua untuk mengatur rumah tangga dan segala aspeknya. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

2 Februari

Kepala Bappeda Provinsi Papua Muh Musa'ad mengatakan pemerintah pusat menyetujui pembangunan pusat sentra pangan di Kabupaten Merauke yang mulai dianggarkan tahun ini dengan jumlah dana mencapai ratusan miliar rupiah. (*Suluh Papua*)

3 Februari

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah RI meminta

gubernur, para bupati/walikota dan jajaran pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua untuk bersikap terbuka, transparan, nyaman dalam menyampaikan hasil temuan BPK RI perwakilan Jayapura. Hal ini dikatakan oleh Ketua TIM BAP DPD RI Abdul Gaffar Usman. (*Suluh Papua*)

11 Februari

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, lebih dari 70% desa di Papua dalam kondisi sangat tertinggal. Dari 5.204 desa di Papua sebanyak 4.049 merupakan desa sangat tertinggal. (*Suluh Papua*)

12 Februari

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Jhon Nahumury mengatakan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan maka setiap perusahaan kelapa sawit di Papua diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip pelestarian dalam kegiatan investasi dengan menerapkan *Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*. (*Cepos*).

16 Februari

Anggota Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan Natan Pahabol mengatakan, pertemuan dengan sejumlah SKPD Pemprov dan Pemkab Keerom untuk membahas rencana PT. Bio Budidaya Nabati untuk melakukan penanaman kelapa sawit di Kabupaten Keerom dengan luas lahan 15.000 hektare. Namun pemerintah Kabupaten Keerom hanya mengeluarkan ijin 7.400 hektare dan ijin tersebut disampaikan kepada Pemprov Papua dalam hal ini Dinas Penanaman Modal. (*Bintang Papua*)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan kedepan pihaknya bakal mendorong supaya di Papua ada perusahaan yang mengelola sumber daya alam sehingga tidak perlu lagi mendatangkan barang-barang dari luar daerah. (*Cepos*)

18 Februari

Komisi II DPR Papua bidang Ekonomi dan Perkebunan Deerd Tabuni meminta aparat Kepolisian untuk memperketat pengawasan penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah Kabupaten Keerom. Hal ini karena banyaknya kontainer yang mengangkut kayu dari Keerom dan dicurigai tidak memiliki dokumen yang lengkap. (*Suluh Papua*)

24 Februari

Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timika untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penertiban kawasan pendulangan atau tambang rakyat di wilayah Mimika. Hal ini disampaikan Ketua DPR Papua Yunus Wonda. (*Suluh Papua*)

27 Februari

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat segera mengembalikan seluruh wewenang kepada pemerintah daerah. Menurut Lukas, segala kewenangan selama ini diambilalih oleh pemerintah pusat. (*Bintang Papua*)

6 Maret

Pihak DPR Papua meminta Pemda Papua memprioritaskan pengembangan kawasan perkebunan di daerah Pegunungan Papua. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat di Pegunungan mendapat hidup yang layak. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR Papua Wihelmus Pigai. (*Bintang Papua*)

11 Maret

Anggota Komisi I DPR Papua Emus Gwijangge menilai sebagian SKPD Provinsi Papua belum mampu mengimplementasikan apa yang menjadi program dan visi misi Gubernur Lukas Enembe selama kurang lebih dua tahun terakhir. (*Bintang Papua*)

1 April

Gubernur Papua Lukas Enembe, di Kantor Gubernur, Selasa (31/3), mengatakan dalam waktu dekat Presiden RI Jokowi akan mengeluarkan SK tentang pembentukan tim pembangunan Provinsi Papua. Tim ini akan diketuai Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Ketua Harian adalah Menteri ESDM Sudirman Said sedangkan anggota-anggotanya adalah 12 kementerian dan gubernur Papua. Tim ini diharapkan menyelesaikan masalah pembangunan di Papua. (*Cepos, Suluh Papua, dan Bintang Papua*)

10 April

Sebanyak 35 anggota DPRD Yahukimo dilantik di Pengadilan Negeri Wamena oleh Ketua PN Wamena Berlinda Mayor, Rabu (8/4). Anggota DPRD Yahukimo dilantik setelah menunggu waktu selama empat bulan. (*Cepos*)

Dalam rapat kerja daerah gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (8/4), Gubernur Lukas Enembe mengatakan bahwa ada sembilan prioritas pembangunan yang disiapkan, antara lain, *pertama*, pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. *Kedua*, peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas dan peningkatan investasi. *Keempat*, pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik. *Kelima*, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah/kawasan. *Keenam*, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Ketujuh*, peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta seni dan budaya. *Kedelapan*, peningkatan jaminan ketentraman dan keamanan. *Kesembilan*, penguatan implementasi tata ruang, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. (*Bintang Papua*)

15 April

Kurang lebih 40 PNS dan masyarakat Tolikara melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Tolikara. Mereka mendesak agar gubernur Papua untuk segera mengevaluasi kinerja dari bupati Tolikara. Menurut mereka, sejak dilantik sebagai bupati Tolikara tidak ada pembangunan di Tolikara. (*Bintang Papua*)

16 April

Pemerintahan Provinsi Papua menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung ekonomi bagi tanah Papua. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Heri Dosinaen pada pembukaan rapat koordinasi perhubungan se-Provinsi Papua di Swiss Belhotel, Merauke, Rabu (15/4). (*Cepos*)

24 April

Ketua Komisi C DPRD Tolikara Amerson Wenda mendesak BPK untuk segera mengaudit keuangan Pemda Tolikara. Menurut Amerson, begitu banyak program yang disusun tetapi realisasinya secara fisik tidak tampak. (*Bintang Papua*)

28 April

Anggota Komisi I DPR Papua Ruben Magai menanggapi pemekaran kampung yang kian semarak. Menurut Ruben, pemekaran kampung bukan bertujuan untuk mengejar dana aliran dana kampung tetapi pemekaran kampung harus memenuhi persyaratan yang ada di peraturan dan pemekaran tersebut harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. (*Cepos*)

12 Mei

Sekretaris Komisi IV DPR Papua Sinut Busup mempertanyakan pembangunan infrastruktur di daerah Pegunungan Tengah. Menurut Sinut, sejumlah proyek yang dibiayai dari APBD 2014 hingga saat ini belum terealisasi seperti pembangunan

lapangan terbang Makoliat di Yahukimo dengan alokasi dana sebesar 55 miliar, proyek jalan di Kota Yahukimo dengan alokasi dana 19 miliar (*Bintang Papua*).

15 Mei

Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Tolikara melakukan aksi demo di Kantor Bupati Tolikara. Mereka menentang bupati dan sejumlah SKPD yang tidak berada di tempat tugas. Aksi ini dilakukan dengan melakukan aksi pemalangan pintu masuk (*Bintang Papua*).

16 Juni

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia I. Loupatty, di Hotel Aston Jayapura, Senin (15/6), mengatakan bahwa guna mempercepat pembangunan pengembangan kereta api di Provinsi Papua maka Pemprov Papua berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan RI guna rencana tersebut (*Cepos*).

1 Juli

Provinsi Papua mendapatkan alokasi dana desa sebesar 1,43 triliun untuk 4.766 desa/kampung di 29 kabupaten/kota se-Papua. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardin Adiperdana di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Selasa (30/6) (*Cepos & Bintang Papua*).

6 Juli

Pemerintahan Kabupaten Tolikara akhirnya secara resmi berkantor di Hotel Tolikara (3/7). Hotel yang dijadikan kantor tersebut terletak di atas Gunung Igari. (*Cepos*)

16 Juli

Pemerintah Puncak Jaya telah mendistribusikan bantuan bahan makanan dan obat-obatan untuk masyarakat di Distrik Agandugume

yang dilanda fenomena embun beku. (*Cepos*)

22 Juli

Pemuda dan pelajar yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Somatua) menyoroti pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Pembangunan yang berdasarkan visi dan misi Bupati Intan Jaya masih seperti program Intan Jaya sehat, pintar dan sejahtera masih sangat jauh. Hal ini terungkap dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Hengky Bagau di Asrama Intan Jaya, Waena pada Selasa (21/7). (*Cepos*)

4 Agustus

Pada tahun 2015, Pemkab Jayapura melalui Dinas PU membangun 52 unit rumah layak huni di 11 distrik di seluruh wilayah pembangunan 1, 2, 3, 4. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Jayapura Arry Ronny Deda. (*Bintang Papua*)

5 Agustus

Di Provinsi Papua sekarang terdapat 560 distrik namun yang terdata di Kemendagri adalah 524 distrik. Itu berarti ada 36 distrik yang belum terdata. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Papua Hery Dosinaen pada Selasa (4/8) ketika membuka kegiatan “Pengembangan Peran Distrik Mendukung Agenda Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. (*Bintang Papua & Cepos*)

11 Agustus

Berdasarkan RPJMD tahun 2016 merupakan tahun investasi di Provinsi Papua sehingga tahun 2015 merupakan waktu untuk pra kondisi menyongsong “Papua Investment Years” dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Selain itu yang menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas SDM Papua. Hal ini dikatakan oleh Sekda Papua Heri Dosinaen pada Senin (10/8). (*Bintang Papua*)

Bupati Merauke Romanus Mbraka mengatakan, Pemkab Merauke mengembangkan kawasan ekonomi khusus untuk memberlakukan sistem pembagian hasil keuntungan dengan masyarakat pemilik hak ulayat tanah dalam program pengelolaan lahan untuk penanaman padi. (*Bintang Papua*)

12 Agustus

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Infantri Teguh Pudji, Selasa (11/8), mengatakan, pihaknya tetap mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo terkait membangun Papua sebagai lumbung padi nasional di Kabupaten Merauke. (*Bintang Papua*)

14 Agustus

Apolinarius Awi, salah satu warga Kampung Sabon, Distrik Waan, Kabupaten Merauke pada Kamis (13/8) mengatakan, para pendamping program Gerbangku dan Respek seringkali mengecewakan masyarakat. Para pendamping hanya tiba di kampung ketika mendengar dana akan dicairkan. (*Bintang Papua*)

Pemerintah Kabupaten Keerom telah menyalurkan alokasi dana desa tahap pertama 2015 ke seluruh kampung di Kabupaten Keerom. Namun di beberapa kampung dana tersebut disalahgunakan oleh kepala kampungnya. Salah satunya adalah yang terjadi di Kampung Workwana, Distrik Arso. Menurut Kepala Distrik Arso Malensius Musui, dana kampung sudah dikirim ke rekening kampung namun digunakan oleh kepala kampung untuk kepentingan pribadinya. (*Bintang Papua*)

15 Agustus

Pihak DPRD Kabupaten Mappi harus menyewa rumah untuk dijadikan kantor. Kantor DPRD Mappi sebelumnya dirusak oleh masyarakat pemilik ulayat karena menuntut ganti rugi pembayaran atas tanah mereka. (*Cepos*)

18 Agustus

Pesawat Trigana Air ATR-42 dengan nomor penerbangan IL-267 yang membawa 49 penumpang dan 4 crew pesawat jatuh dalam perjalanan dari Bandara Sentani menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ketika memberikan keterangan pers di Base Ops Lanud Jayapura, Sentani, Senin (17/8), Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo mengatakan, pesawat ini mulai hilang kontak pada Minggu (16/8) sekitar pukul 14.55. (*Bintang Papua & Cepas*)

19 Agustus

Korban jatuhnya pesawat Trigana Air pada Minggu (16/8) berjumlah 54 orang dan semuanya meninggal dunia. Pesawat Trigana yang jatuh ini ditemukan di hutan Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang. Jenasah ke-54 orang ini ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Menanggapi peristiwa ini Gubernur Lukas Enembe berharap agar peristiwa ini menjadi pengalaman bagi maskapai penerbangan lainnya. Pihak Trigana Air memberikan asuransi 1,25 miliar untuk korban. (*Bintang Papua & Cepas*)

20 Agustus

Terkait dengan pandangan bahwa pemerintah tidak memperhatikan Papua ditanggapi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengajak pihak Kejagung dan Polri untuk mendalami kucuran dana 37 triliun yang dikucurkan dari APBN untuk Papua. (*Cepas*)

21 Agustus

Evakuasi terhadap korban jatuhnya pesawat Trigana masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI, masyarakat, dan Basarnas. (*Cepas & Bintang Papua*)

22 Agustus

Gubernur Lukas Enembe, di ruang kerjanya, Jumat (21/8),

membantah pernyataan Menteri Luhut Pandjaitan yang menyatakan bahwa dana APBN yang diperuntukan Papua tidak dipakai sesuai peruntukannya. Menurut Lukas, dana APBN tersebut langsung dikirim ke Pemkab/Pemkot di Papua sedangkan yang ditangani oleh Pemprov Papua adalah dana Otsus. Semua dana tersebut sudah dimasukkan ke rekening daerah masing-masing. Dan sejauh ini dana tersebut digunakan oleh Pemprov Papua sesuai peruntukannya. (*Bintang Papua*)

Operasi SAR gabungan terkait kecelakaan pesawat Trigana ditutup secara resmi oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo pada 21 Agustus di Base Ops Lanud Jayapura. (*Cepos*)

25 Agustus

Akibat hujan yang deras pada Minggu (23/8) terjadi longsor di Kali Lek dan Kali Tempur, Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo. Peristiwa longsor ini menyebabkan 8 orang hilang. (*Bintang Papua* dan *Cepos*)

27 Agustus

Dalam siaran pers yang diterima oleh *Cepos* dari Gubernur Lukas Enembe melalui Staf Khusus Gubernur Papua Marthen Tail, Rabu (26/8), dikatakan Gubernur Lukas mengakui mendapat pesan langsung dari Menkopolkam untuk penyelesaian masalah Papua agar diselesaikan dengan baik. “Menkopolkam berpesan agar persoalan-persoalan di Papua cukup disampaikan kepada dia dan kita akan mencari solusi untuk penyelesaian masalah-masalah itu, termasuk masalah Tolikara,” kata Gubernur Lukas. (*Cepos*)

28 Agustus

Masyarakat Sarmi melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Protokol Pertigaan Kelapa I Sarmi, Kamis (27/8). Masyarakat tidak setuju dengan pelantikan Sekda Sarmi yang baru Viktor Pekpekai oleh

Sekda Papua Heri Dosinaen. Massa meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe untuk meninjau kembali pelantikan tersebut. Pada kesempatan ini juga masyarakat meminta agar pihak berwajib menyelidiki dana Bansos 2014 yang tidak jelas. (*Bintang Papua*)

9 September

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Yusuf Yambe Yabdi, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (8/9), mengatakan bahwa untuk rencana pembangunan kereta api di Provinsi Papua diharapkan pada tahun 2016 sudah mulai *groundbreaking* atau peletakan batu pertama. Pembangunan kereta api yang menjadi tanggung jawab Pemprov Papua memang saat ini masih dalam tahap *visibility study* oleh Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua. (*Cepos*)

11 September

Kepala Dinas Perindakop Provinsi Papua Yudha Ansaka, di ruang kerjanya, Kamis (10/9), mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini berencana akan merevitalisasi salah satu pasar tradisional untuk selanjutnya dibangun pasar rakyat yang bernuansa wisata di Kampung Wauna Distrik Depapre. Pentingnya pembangunan pasar rakyat bernuansa wisata di wilayah tersebut karena ke depannya wilayah itu akan dikembangkan menjadi kawasan wisata. (*Bintang Papua*)

16 September

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, di Swiss-Belhotel Jayapura, Selasa (15/9), meminta kepada Presiden RI untuk segera merealisasikan rencana pembangunan tol laut di Papua sebagai implementasi dari program Nawacita dan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Lebih lanjut dikatakan bahwa merujuk pada pidato kenegaraan di Gedung MPR, DPR dan DPD pada 14 Agustus lalu, Presiden mengatakan akan membangun tol laut dari Aceh hingga Papua. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal. (*Cepos*)

Gubernur Papua Lukas Enembe, di Swiss-Bel hotel Jayapura, Selasa (15/9), kembali meminta dukungan dari DPD RI agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua dengan mendorong regulasi atau kebijakan melalui UU. Aspirasi masyarakat Papua terhadap RUU Otsus Plus telah diperjuangkan oleh pihaknya, namun karena satu dan lain hal maka RUU Otsus Plus didorong ke Prolegnas 2016. (*Cepos*)

17 September

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Elia I. Loupatty, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (16/9), menyampaikan bahwa tim dari pemerintah pusat saat ini sedang melakukan survei terkait rencana pembangunan kereta api di Papua, secara khusus rute Jayapura – Sarmi. Pihaknya mendorong agar pembangunan kereta api dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. (*Cepos*)

18 September

Ketua Panitia Khusus 14 Kursi OAP DPR Papua Emus Gwijangge, di Jayapura, Kamis (17/9), menyatakan bahwa pihaknya terus menjalankan proses membuka pendaftaran bagi masyarakat asli Papua yang ingin menjadi anggota DPR Papua. Hal ini dikarenakan adanya upaya untuk menghentikan proses pengangkatan 14 kursi untuk OAP itu. (*Bintang Papua*)

19 September

Rektor Uncen Jayapura Onesimus Sahuleka, di Rektorat Uncen Waena, Jumat (18/9), mengakui bahwa dalam pembangunan infrastruktur di Papua wajib melihat aspek sosial budaya dari daerah setempat. Pembangunan yang tidak disertai dengan kajian sosial budaya ini, diyakini bisa menimbulkan hambatan baik saat pelaksanaan maupun akhir pelaksanaan. (*Cepos*)

23 September

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LP3D) RI Provinsi Papua Thomas Sondegau, di Hotel Horizon Jayapura, Selasa (22/9), mempertanyakan kepada pihak kepolisian Papua tentang kejelasan kasus korupsi Mess DPR Papua. Sebab sudah lama kasus ini mencuat ke permukaan tapi hingga kini terkesan mulai tenggelam (*Cepos dan Bintang Papua*).

28 September

Ketua Pokja Agama MRP Samuel K. Waromi, di ruang kerjanya, Sabtu (26/9), mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menindaklanjuti rencana pembangunan 150 rumah yang tersebar di 14 titik pada sejumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Rencana ini sudah diberikan kewenangan di Karubaga Kabupaten Tolikara. (*Cepos*)

2 Oktober

Kepala Badan PMPK Abraham Imbiri, di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung Waropen, Kamis (1/10), mengatakan, selama ini Distrik Walani yang terletak di Kabupaten Waropen Bagian Selatan tidak mendapatkan pelayanan pembagian dana desa oleh pemerintah. (*Cepos*)

3 Oktober

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitauw, di ruang kerjanya, Jumat (2/10), meminta kepada Dinas P dan P Kabupaten Jayapura agar selalu fokus dengan pembangunan SDM daripada melakukan pembangunan fisik. Lebih lanjut dikatakan bahwa dana Otsus itu tidak boleh dipakai untuk membangun bangunan fisik tetapi menyiapkan SDM dengan beasiswa. Karena bangunan fisik seperti sekolah, perumahan guru dan lain-lain urusan Dinas PU. (*Cepos*)

6 Oktober

Deputi Dubes Belanda untuk Republik Indonesia Maarten Vab Den Bosch di Jayapura menaruh perhatian serius terhadap pembangunan

di Papua bahkan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di Papua. Pada kesempatan ini ada pembahasan polisi masyarakat atau Polmas. *(Cepos)*

7 Oktober

Minister Counselor Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia Jean Bernard Carrasco, di Ruang Pusat Data Bappeda Provinsi Papua, Selasa (5/10), memberikan dukungan terhadap Pemprov dalam pembangunan dengan beberapa program strategis yang sudah berjalan di Provinsi Papua. Selanjutnya dikatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan wakil gubernur dan mendiskusikan tentang capaian bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia di Provinsi Papua, secara khusus bidang pendidikan dan kesehatan. *(Cepos)*

10 Oktober

Tim Pemantau Rekrutmen Tenaga Honorer Dewan Adat Marthen Mnumumes, di Biak, Kamis (8/10), mengharapkan agar Pemkab Biak dan Badan Kepegawaian Nasional memperhatikan kelanjutan status sekitar 100 tenaga honorer *(Bintang Papua)*.

12 Oktober

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, di Jayapura, Minggu (11/10), meminta agar pemerintah segera menetapkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah dan RPP Penataan Daerah. Pemerintah diharapkan menyelesaikannya sehingga rakyat di daerah menanti tanpa adanya kepastian. *(Cepos)*

17 Oktober

Ketua DPR Papua Yunus Wonda di Jayapura terkait dengan pengangkatan 14 kursi di DPR Papua menegaskan bahwa siapapun tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses yang sedang berlangsung karena yang dilakukan oleh DPR Papua merupakan amanat UU Otsus. *(Cepos)*

21 Oktober

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Bandara Frans Kaisepo Biak, Selasa (20/10), mengakui bahwa kewenangan dan pembiayaan untuk Papua harus ditambah. Menurut Kumolo, Papua merupakan garis pertahanan Indonesia terhadap negara tetangga Republik Palau, Timor Leste, Australia, dan PNG. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini harus diperkuat sehingga anggaran di Papua harus lebih dan harus dipahami oleh seluruh daerah lainnya. (*Cepos*)

28 Oktober

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaean, di Sasana Kantor Gubernur, Selasa (27/10), menginginkan adanya perlindungan terhadap anak orang asli Papua (OAP) yang berhadapan dengan hukum. Harus ada jaminan perlakuan manusiawi dan menjamin tidak dirampasnya hak-hak anak. (*Cepos* dan *Bintang Papua*)

9 November

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Samuel Siriwa, Minggu (8/11), mengatakan, Pemprov Papua menargetkan pembukaan lahan pertanian di Merauke hingga 2015 adalah seluas 1.930 Ha. Namun belum mencapai target sesuai yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. (*Bintang Papua*)

11 November

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, pada Selasa (10/11) di Jakarta mengatakan, pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu diungkit lagi karena akan berujung pada saling menyalahkan. (*Bintang Papua*)

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Papua Naftali Yogi, di Jayapura, Selasa (10/11), mengatakan, para kepala daerah di Papua harus membuat aturan untuk memproteksi mama-mama Papua dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan agar komunitas pedagang asli Papua tetap mendapatkan haknya. (*Cepos*)

12 November

Tim ekspedisi NKRI akan masuk ke wilayah Papua Barat pada Februari 2016 dengan melibatkan 1.200 personel dari pusat dan daerah. Kepala Bagian Operasional Ekspedisi Letkol Infantri Rachmat PS, di Aula Kodam 1703 Manokwari, mengatakan, ekspedisi ini dipromotori oleh korps Kopasus dengan melibatkan TNI, kepolisian dan masyarakat sipil. (*Bintang Papua*)

18 November

Gubernur Lukas Enembe melantik lima anggota Pansel tingkat Provinsi Papua dalam rangka pengangkatan anggota DPR Papua untuk jatah orang asli Papua di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Selasa (17/11). Pada kesempatan yang sama Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, pelantikan Pansel 14 kursi Otsus di DPR Papua merupakan amanat UU Otsus no 21 tahun 2001. (*Bintang Papua*)

Program bela negara yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan RI mulai dijalankan di Papua. Sebanyak 70 orang dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan diklat kader pembinaan bela negara selama 10 hari (17-27 November) di Balai Pertanian Provinsi Papua, Sentani. Dalam sambutannya Menteri Pertahanan RI yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura I Nyoman Sucipta mengatakan upaya bela negara diatur dalam UU no 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang merupakan sikap dan perilaku setiap warga negara kepada NKRI. Hal ini dimaksudkan agar warga negara memiliki kesadaran sikap. (*Cepos*)

20 November

Sebanyak 100 orang di Kabupaten Sorong mengikuti program bela negara yang digelar oleh Pemkab Sorong. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderwasih Kolonel Inf. Teguh di Timika mengatakan pelatihan tersebut melibatkan komponen pengajar dari SD-SMA/

SMK, PNS, wiraswasta, tokoh adat, agama paguyuban dan pemuda.
(*Bintang Papua*)

23 November

Komisioner Komnas HAM RI Yuli Asmini pada Minggu (22/11) di Jakarta mengatakan, Komnas HAM akan mendorong Pemda dan Pemerintah Pusat untuk dapat menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. (*Bintang Papua*)

27 November

Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kamis (26/11), meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai lebih fokus lagi dalam menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua ketimbang sibuk dengan urusan penerbitan buku. Selain itu melepaskan dua jabatan yang sekarang diberikan kepadanya (kepala UP₂KP dan Plt. Rumah Sakit Jiwa). Tanggapan drg. Aloysius Giyai, tidak keberatan dengan usulan dari Yunus Wonda. (*Bintang Papua*)

2 Desember

Gubernur Lukas Enembe pada Selasa (1/12) di Tembaga Pura, Mimika, mengatakan Pemprov Papua siap untuk mewujudkan Provinsi Papua sebagai kawasan industri. Terkait dengan hal ini sudah dibicarakan dengan PT FI. (*Cepos*)

4 Desember

Anggota DPR Papua Ruben Magai menilai pemerintah pusat terkesan tak peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang Papua. Menurut Ruben, negara tidak mengedepankan ketetapan-ketetapan yang sudah dibuat secara internasional. (*Bintang Papua*)

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pemerintah tidak kompak dan bersatu dalam membangun Papua. Semua menteri masih bekerja secara sendiri-sendiri. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kamis (3/12). “Beberapa tahun

ini saya melihat kementerian-kementerian bekerja sangat sektoral sekali, tidak terintegrasi sehingga kelihatan di lapangan adalah berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Presiden Joko Widodo. (*Bintang Papua*)

5 Desember

Pada tahun 2016, Pemprov Papua mencanangkan dan menetapkan tahun 2016 sebagai tahun investasi Papua. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Lukas Enembe. Tahun investasi ini diresmikan di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Jumat (4/12) dengan tema “Papua Investment Years 2016”. Pemerintah Provinsi Papua diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhamad Musa’ad. (*Cepos & Bintang Papua*)

9 Desember

Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (FPPMJ) di Jayapura melakukan aksi damai di Kantor LPMP Papua Kotaraja, Selasa (8/12). Dalam aksi tersebut mereka menolak kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung Kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan di Kantor LPMP Papua. Menurut mereka kegiatan tersebut adalah illegal, berdasarkan kemauan politik bupati dan wakil bupati Jayawijaya dan tidak berdasarkan UU Desa. (*Cepos*)

10 Desember

Dalam rangka meningkatkan kapasitas eksekutif dan legislatif, khususnya peningkatan PAD melalui pajak dan restribusi daerah di Kabupaten Tolikara maka Pemkab Tolikara, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Tolikara bekerja sama dengan Universitas Paramadina. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU dan digelar seminar pada Rabu (8/12) di Aula Kantor Bupati di Igari Karubaga, Tolikara. (*Cepos*)

11 Desember

Sebanyak 122 daerah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Penetapan ini ada dalam Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019. Sedangkan untuk Papua sebagai berikut: Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Lany Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai. *(Bintang Papua)*

12 Desember

Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, Gubernur Lukas Enembe akan memberikan perhatiannya pada penegakan HAM di Papua. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe ketika dalam pidatonya dalam merayakan hari HAM 10 Desember di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Inilah pernyataannya dalam pidato, “Penegakan HAM menjadi komitmen kita bersama, saya bersama wakil gubernur akan memasuki tahun ketiga kepemimpinan, kami memberikan perhatian serius terhadap penanganan HAM di Papua. *(Cepos)*

22 Desember

Gubernur Lukas Enembe, dalam rapat paripurna di DPR Papua, Senin (21/12), mengatakan, Pemprov Papua tetap berkomitmen mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri melalui pendekatan hukum dan kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan mengalokasikan dana dalam penanganan konflik sosial termasuk pelanggaran HAM. *(Bintang Papua)*

2. PENDIDIKAN

7 Januari

Anggota DPR RI Pdt. Elion Numberi meminta Presiden Jokowi untuk memberi perhatian serius terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan SDM orang asli Papua dalam hal mengisi sejumlah jabatan struktural di berbagai kementerian yang ada pada saat ini. (*Cepos*)

12 Januari

Nobertus Koray warga Kampung Tambat, Kabupaten Merauke mengaku jika hingga sekarang ini proses belajar mengajar di SD Kampung Tambat belum berjalan. Karena guru tidak ada terpaksa anak-anak pulang ke rumah. Dengan kondisi tersebut Nobertus mengharapkan pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke untuk memperhatikan hal tersebut. (*Cepos & Suluh Papua*)

22 Januari

Fakultas Kedokteran Uncen sampai sekarang belum melaksanakan proses belajar mengajar. Disebabkan oleh staf administrasi dan dosen melakukan mogok mengajar. (*Bintang Papua*)

9 Februari

Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad mengatakan bahwa pendidikan semua jalur dan jenjang menjadi tanggung jawab Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Hal ini seperti diamanatkan dalam UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. (*Cepos*)

10 Februari

Pemerintah Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada kabupaten dan kota untuk menetapkan kurikulum di masing-masing sekolah mengikuti kurikulum 2013 atau kurikulum 2006. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda. (*Suluh Papua*)

11 Februari

Direktur YPPK (Yayasan Pendidikan Pengajaran Katolik) Jayawijaya Stefanus Ngadimin, Selasa (10/2), di ruang kerjanya, mengatakan, pihak YPPK masih mengalami kekurangan guru sebanyak 144 tenaga guru. Salah satu langkah yang sudah mulai dilakukan oleh YPPK adalah mendatangkan guru-guru secara bertahap pada sekolah-sekolah yang dianggap prioritas. (*Suluh Papua*)

23 Februari

Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, khususnya di SMP Negeri Kiwirok terhenti pelajaran akibat para guru tidak mengajar. Hal ini menyebabkan sebanyak 18.000 siswa-siswi sekolah dasar terancam putus sekolah karena tidak semua siswa melanjutkan pendidikan ke SMP. (*Bintang Papua*)

4 Maret

Peserta Ujian Nasional untuk seluruh sekolah baik SD, SMP, dan SMA atau sederajat di Provinsi Papua mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda menyebutkan bahwa total jumlah peserta UN mencapai 103.673 siswa di Provinsi Papua. (*Cepos*)

10 Maret

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda mengungkapkan bahwa untuk penyaluran dana BOS akan disalurkan secara langsung ke rekening dinas pendidikan kabupaten/kota. (*Cepos*)

Kepala Pendidikan Kota Jayapura I Wayan Mudiya mengatakan, jumlah peserta UN tingkat SMA/SMK di Kota Jayapura pada 14-16 April 2015 berjumlah 4.606 siswa. Para siswa ini adalah mereka yang sudah layak atau sah diverifikasi oleh database komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. (*Cepos*)

12 Maret

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar penerimaan pendaftaran siswa baru via online di Provinsi Papua harus ada keberpihakan terhadap orang asli Papua. Pihaknya berharap kepala dinas kabupaten/kota bersama pihak sekolah membuat kebijakan tersebut. (*Cepos*)

15 April

Di SMKN 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, masyarakat pemilik hak ulayat melakukan pemalangan di sekolah tersebut. Hal ini menyebabkan siswa-siswi SMKN 1 Sentani terancam tidak mengikuti ujian nasional. Masyarakat melakukan pemalangan karena masalah ganti rugi belum diselesaikan dengan baik. (*Cepos*)

20 Mei

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Jayapura, mengatakan, penyaluran dana BOS tahap pertama ke sekolah-sekolah sebagai penerima dana BOS sebesar Rp200 miliar. (*Cepos*)

15 Juni

Kepala Dinas P & P Kabupaten Jayapura Alpius Toam, di Distrik Ebungfauw Sentani, Senin (8/6), mengatakan bahwa daerahnya masih kekurangan guru. Jumlahnya mencapai \pm 234 orang. Kekurangan tenaga guru ini lebih banyak di Sekolah Dasar. (*Bintang Papua*)

2 Juli

Masyarakat Prafi, Manikwai melakukan pemalangan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan karena berhentinya beberapa pekerjaan fasilitas sekolah seperti pagar, ruang guru dan ruang kelas. Padahal fasilitas ini sangat diperlukan oleh sekolah. Pemalangan ini juga melibatkan orang tua siswa SMK Negeri 3 Prafi. (*Bintang Papua*)

15 Juli

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya mendatangkan 35 guru PAUD. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut. (*Cepos*)

12 Agustus

Pemerintah Kabupaten Yalimo memberikan beasiswa kepada 424 mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Jayapura. Penyerahan beasiswa ini langsung diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Yalimo Nahor Nekwek. (*Cepos*)

2 Oktober

Para mahasiswa Kabupaten Yalimo, di Kantor Redaksi Cepos, Kamis (1/10), menyampaikan protesnya atas pembagian bantuan studi oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (BPP-HKYM) yang dianggap tidak transparan. Koordinator Mahasiswa Distrik Welarek Dani Peyon mengatakan bahwa pembagian tahap kedua itu sudah masuk ke rekening BPP-HKYM namun banyak yang terdata tetapi tidak menerimanya. (*Cepos*)

15 Oktober

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda, di Main Hall Kantor Gubernur Papua, Senin (12/10), mengharapkan agar pemerintah pusat tetap memprioritaskan pengiriman guru dari berbagai program ke Papua mengingat hingga kini Provinsi Papua masih sangat membutuhkan tenaga guru. (*Cepos*)

23 Oktober

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura I Wayan Mudiyasa, di ruang kerjanya, Selasa (20/10), mengatakan bahwa Pemkot Jayapura akan bekerja sama dengan USAID guna meningkatkan kapasitas para kepala sekolah, guru dan komite sekolah serta dewan pendidikan. (*Cepos*)

12 Oktober

Sekretaris Dinas P dan P Kabupaten Merauke Benhur Retandtu, di Merauke, Sabtu (10/10), mengungkapkan bahwa masalah kekurangan guru di beberapa sekolah di daerah pedalaman Merauke masih terus terjadi. Faktor utama adalah karena adanya program sertifikasi. Program itu mewajibkan semua guru untuk menyanggah gelar sarjana. Sertifikasi guru ini diwajibkan oleh pemerintah pusat sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan tenaga pendidik di beberapa sekolah dasar di pedalaman Merauke. (*Bintang Papua*)

5 November

Aktivitas seluruh sekolah di Kabupaten Dogiyai ditutup mulai Rabu (4/11) karena para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuntut dan meminta agar tunjangan kinerja di Dogiyai disamakan dengan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai. Para guru mengakui bahwa selama ini mereka tidak mendapatkan insentif daerah. (*Cepos*)

7 November

Sekitar 20-an pengelola PAUD di Kabupaten Jayapura melakukan audiens di Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura. Para pengelola PAUD ini meminta kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura untuk membayarkan insentif bagi PAUD yang belum dibayarkan selama setahun belakangan. (*Cepos*)

10 November

Pemerintah Kota Jayapura memberikan bantuan dana operasional daerah sebesar 3,4 miliar dan buku tulis kepada anak sekolah dari SD-SMA/SMK di Kota Jayapura. Penyerahan bantuan diberikan oleh Walikota Jayapura Benhur Tomy Mano secara simbolis pada Senin (9/11) di Kantor Walikota Jayapura. (*Cepos*)

12 November

Direktur Jendral PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI Haris Iskandar, di LPMP Kotaraja, Rabu (11/11), mengatakan, banyak guru aktif di Indonesia termasuk di Papua yang tidak berkompeten sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan. (*Cepos*)

13 November

Dalam sambutan Gubernur Lukas Enembe yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal dalam peringatan hari Aksara Internasional di Auditorium Uncen Jayapura, Kamis (12/11), terungkap bahwa angka buta aksara atau tidak tahu membaca di Papua telah mencapai 32,69%. Hal ini berarti 67,31% penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Papua yang tidak dapat membaca dan menulis. (*Bintang Papua & Cepos*)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anis Baswedan, di Auditorium Uncen Jayapura, Kamis (12/11), mengatakan, akan ada program mendatangkan guru-guru dalam program Guru Garis Depan yang berkomitmen untuk ditempatkan di daerah pedalaman termasuk untuk di Papua. Dan Papua menjadi prioritas utama dalam program tersebut. (*Cepos*)

17 November

Puluhan pelajar dan mahasiswa dari Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan aksi demo damai di Kantor Perwakilan Kabupaten Mamberamo Tengah, Senin (16/11), di Sentani, Kabupaten Jayapura. Massa menuntut agar Pemkab Mamberamo Tengah mencairkan dana bantuan studi akhir dan juga dana pemondokan tahun 2015. (*Bintang Papua*)

26 November

Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awoitauw, di Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, Sentani, Rabu (25/11), mengatakan,

Pemkab memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua guru-guru yang sudah berdedikasi dalam dunia pendidikan. Untuk itu pada tahun 2016, Pemkab Jayapura akan menaikkan uang lauk pauk kepada PNS termasuk para guru. (*Cepos*)

Ketua PGRI Waropen Minami Aronggear pada Rabu (25/11) di Lapangan Budi Utomo Waren mengatakan, penempatan guru selama ini tidak adil karena terjadi penumpukan guru di kota. Hal ini mengakibatkan murid-murid di daerah pedalaman tidak menerima pelajaran dengan baik. (*Cepos*)

3 Desember

Komisi V DPR Papua yang menangani Bidang Pendidikan dan Kesehatan menemukan sejumlah universitas jarak jauh di Papua yang beroperasi secara illegal. Hal itu dilihat dalam waktu enam bulan mahasiswa sudah mendapatkan gelar S1, S2 dan S3. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Komisi V DPR Papua Nasson Uti dalam keterangan persnya, Rabu (2/12). (*Bintang Papua & Cepos*)

12 Desember

Mahasiswa Akademi Keperawatan Jayapura (Yanmas) melakukan aksi pemalangan kampus yang berada di jalan pasar Yotefa. Para mahasiswa meminta penjelasan terkait status dari kampus tersebut. Menurut informasi yang mereka peroleh bahwa kampus ini belum terakreditasi dan belum terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. (*Cepos*)

Pemerintah Kabupaten Lany Jaya menerima penghargaan anugerah peduli pendidikan 2015 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan. Penghargaan ini diserahkan oleh Anis kepada Bupati Lany Jaya Befa Jigibalom di Gedung KI Hadjar Dewantara Senayan, Jakarta, Jumat (11/12). Penghargaan diberikan karena Pemkab Lany Jaya memiliki kesadaran, komitmen dan peduli terhadap pendidikan. (*Cepos*)

3. KESEHATAN

16 Januari

Terkait adanya pemalangan di Puskesmas Heram yang dilakukan oleh masyarakat pemilik hak ulayat, Unit Percepatan Pelayanan Kesehatan Papua meminta agar Dinas Kesehatan Kota Jayapura segera mengambil langkah-langkah mediasi guna menuntaskan hal tersebut. (*Suluh Papua*)

22 Januari

Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Jayawijaya mengungkapkan di Kabupaten Jayawijaya banyak mengalami kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS. Ketua KPA Jayawijaya Siregar menjelaskan, kendala yang dihadapi di antaranya tidak bisa berjalannya program sesuai rencana akibat pencairan dana di KPA yang terlambat. (*Cepos*)

29 Januari

Ketua Harian KPA Kota Jayapura Nur Alam mengatakan dari data yang diterima per Desember 2014 penderita HIV/AIDS mengalami peningkatan, kenaikan mencapai 760 kasus. Sekarang tercatat penderita HIV-AIDS mencapai 4.630 orang. (*Suluh Papua & Cepos*)

27 Februari

Anggota Komisi V DPR Papua (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan) Nioluen Kotouki meminta Pemprov Papua untuk segera menerapkan Perdasus Kependudukan No. 15 Tahun 2008. Dalam Perdasus telah menginstruksikan kabupaten/kota di Papua mengenai kependudukan termasuk proteksi untuk orang asli Papua. (*Bintang Papua*)

4 Maret

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mendeklarasikan Gerakan Nasional Rehabilitasi 100

ribu orang penyalahgunaan narkoba dan khususnya di Provinsi Papua mendapat jatah 1635 orang untuk direhabilitasi. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol. Antonius Kadarmanta melalui Kabag TU BNN Provinsi Papua Magdalena. (*Cepos*)

16 Maret

Ketua Pusat Studi Penanggulangan HIV AIDS Uncen Jayapura Jhon Rahail mengatakan, dengan melihat angka penyakit HIV/AIDS di Provinsi Papua pertanda bahwa kita harus kerja sungguh-sungguh dan menggunakan potensi-potensi lokal yang berdampak positif terhadap pencegahan HIV agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. (*Bintang Papua*)

28 Maret

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloisius Giay mengatakan, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2013 jumlah distrik di Provinsi Papua sebanyak 440 distrik, sementara jumlah Puskesmas yang secara aturan memenuhi syarat menjadi Puskesmas per Maret 2014 sebanyak 394. Dengan demikian sebanyak 46 distrik yang tidak mempunyai Puskesmas. (*Cepos*)

10 April

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai, Selasa (7/4), di Kantor UP2KP, mengatakan, orang asli Papua bisa berobat secara gratis di seluruh pelayanan kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun TNI/Polri. (*Cepos*)

18 April

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Biak Numfor tercatat jumlah kasus HIV AIDS mencapai 1.565 kasus dan 143 orang sudah meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Petrus Yapen mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menekan perkembangan kasus tersebut. (*Cepos*)

2 Mei

Di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara ditemukan kasus HIV AIDS. Sejak tahun 2014 ditemukan 44 pasien dan 10 diantaranya sudah meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh suster Rini Sukava. (*Cepos*)

4 Mei

Berdasarkan data di Provinsi Papua per 31 Desember 2014 kasus HIV AIDS mencapai 19.202. Hal ini ditanggapi oleh Pdt. Ester Sanggenafa. Menurut Pdt. Ester, kasus tersebut harus disikapi dengan bijak dan terus melakukan terobosan baru. (*Cepos*)

12 Mei

Untuk menangani masalah kesehatan pihak Kementerian Kesehatan RI meluncurkan program Nusantara Sehat. Program ini berisi para petugas kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke dr. Stef Osok, untuk wilayah Merauke sejak Sabtu (9/5) sudah ada 7 orang yang datang. (*Cepos*)

15 Mei

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Program HIV dan IMS serta program Manager Chai Kabupaten Jayawijaya di beberapa distrik di Kabupaten Tolikara dari 5525 orang ditemukan bahwa terindikasi positif HIV mencapai 250 lebih termasuk 6 ibu hamil. (*Cepos*)

18 Mei

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dr. Nevil Muskita mengatakan, sepanjang Januari-Maret 2015 terdapat 215 kasus kekurangan gizi pada anak-anak. Menurut Nevil, faktor ekonomi dan kurang menjaga kebersihan menjadi penyebab kekurangan gizi. (*Suluh Papua*)

20 Mei

Pihak Pemkab Jayapura mengadakan mobil klinik untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan di tujuh wilayah terpencil Kabupaten Jayapura yakni Kampung Umbron, Mabuwarong, Muara Pasrah (Distrik Kaureh), Kampung Hulu Atas, Pagai Naira (Distrik Airu), Kampung Nandalzi (Distrik Unurumguay) dan Kampung Iwon (Distrik Gresik Selatan). Penyerahan secara simbolis mobil ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Selasa (19/5) oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Robert Djoenso. (*Cepos & Bintang Papua*)

Komisi Penanggulangan HIV AIDS Kabupaten Jayawijaya mencatat angka kasus HIV AIDS di Wamena sampai saat ini mencapai 5.100 kasus. Menurut Ketua Harian KPA Jayawijaya Gaad Tabuni, perkembangan kasus ini cukup signifikan. (*Bintang Papua*)

21 Mei

Berdasarkan data dari pihak RSUD Merauke selama Januari-Maret 2015 tercatat 215 orang yang mengalami kurang gizi dan gizi buruk. Jumlah ini belum termasuk di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Merauke. Direktur RSUD Merauke dr. Nevil Muskita, di ruang kerjanya, Rabu (20/5), menjelaskan dari 215 orang 79 orang rawat jalan dan 136 rawat inap. (*Cepos*)

13 Juli

Pelayanan kesehatan belum saja berjalan secara maksimal. Di Kampung Sabon, Distrik Wan, Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan lancar. Bangunan Pustu yang dibangun sejak tahun 2011 sampai sekarang belum ada petugas medis yang melayani di kampung itu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kampung Sabon Petrus Awi. (*Bintang Papua*)

15 Juli

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa 11 orang meninggal dunia di Kabupaten Lanny Jaya akibat fenomena embun beku. Fenomena ini melanda 26 kampung di 3 distrik Kabupaten Lanny

Jaya. Fenomena embun beku menyebabkan lahan pertanian rusak sehingga masyarakat mengalami gagal panen. (*Cepos & Bintang Papua*)

16 Juli

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, di Kantor UP2KP, Rabu (15/7), mengungkapkan luasnya daerah Papua dan minimnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan maka Papua masih membutuhkan 1000 tenaga dokter. Pada saat ini Papua hanya memiliki 400 dokter. (*Cepos*)

6 Agustus

Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai pada Rabu (5/8) di Kantor Balai Latihan Tenaga Kesehatan Padang Bulan mengatakan, para pegawai di lingkungan dinas kesehatan baik kabupaten/kota maupun provinsi harus saling bersinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Papua. (*Cepos*)

15 Agustus

Para honorer perawat yang bekerja di Kabupaten Paniai kecewa dengan intensif yang diberikan oleh Pemkab Paniai. Para perawat mengakui bahwa honor intensif yang diterima tidak sebanding dengan pengabdian yang telah dilakukan. Seorang perawat Marnitus mengatakan mereka terima insentif hanya sebesar 1 juta untuk tiga bulan, tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. (*Bintang Papua*)

18 Agustus

Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Lany Jaya sejak 3 Juli lalu kembali menelan korban jiwa. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebanyak 4 warga meninggal. Hal ini dibenarkan oleh Sekda Lany Jaya Christian Sohiliat. (*Cepos*)

22 Agustus

Menteri Sosial Khofifah Parawansa pada Jumat (21/8) di Timika

mengatakan akan mendorong peningkatan status Puskesmas Tolikara menjadi RSUD agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada warga setempat. Hal ini diungkapkan oleh Khofifah ketika melakukan kunjungan kerja di Tolikara beberapa waktu yang lalu. (*Bintang Papua*)

23 Oktober

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Arif Dwi Darmanto di Gedung BPYPK Argapura, Kamis (21/10), mengatakan bahwa tenaga kesehatan diwajibkan melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat sehingga dapat betul-betul tahu kondisi masyarakat, termasuk bisa melakukan pertolongan terhadap pasien saat sakit dan juga bisa memberikan layanan secara promotif. (*Cepos*)

24 Oktober

Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak, di Jayapura, Jumat (23/10), mengatakan, masyarakat Papua yang hidup di wilayah perkotaan relatif telah mendapat pelayanan kesehatan sudah memadai. Hal ini disebabkan telah hadir unit-unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas hingga klinik-klinik kesehatan. Namun, masyarakat Papua di kampung-kampung terjauh masih harus bergelut dengan masalah kurangnya tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan mantri. Serta sejumlah persoalan lain yang ikut memperburuk kondisi pelayanan kesehatan seperti keterbatasan fasilitas penunjang kesehatan, jauhnya akses terhadap pusat pelayanan kesehatan. (*Bintang Papua*)

2 November

Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Jayapura dr. Anton Mote, Sabtu (31/10), mengatakan, sistem rujukan pasien ke luar Papua harus diperhatikan dan dievaluasi lagi. Beberapa pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta harus menunggu berbulan-bulan untuk pelayanan di sana. (*Cepos*)

6 November

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Papua akan membangun rumah sakit tipe D di Kabupaten Waropen. Pembangunan rumah sakit ini memanfaatkan dana dari APBN 2016 senilai 35 miliar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giay pada Kamis (5/11) di Hotel Aston Jayapura. (*Bintang Papua*)

7 November

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jayapura Nuralam, Jumat (6/11), mengatakan, beberapa bulan terakhir ini kasus HIV AIDS di Kota Jayapura sudah mencapai 4000 kasus. Faktor yang banyak menyebabkan penularan HIV AIDS adalah melalui seks bebas. (*Cepos*)

9 November

Kepala Dinas Kesehatan Merauke dr. Stefanus Osok, Minggu (8/11), mengatakan, penularan HIV AIDS di Merauke sekarang didominasi oleh kelompok umum seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, PNS dan profesi lainnya. Sebelumnya didominasi oleh PSK. Kasus HIV AIDS sejak tahun 1992 sampai Oktober 2015 berjumlah 1.800 kasus. (*Bintang Papua*)

Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura dr. Michael Demetouw, Jumat (6/11), mengakui bahwa di RSUD Yowari masih mengalami kekurangan tenaga medis sehingga perlu ada penambahan tenaga medis. (*Cepos*)

13 November

Kementerian Kesehatan RI menggelontorkan dana kepada Pemprov Papua sebesar 1,3 triliun untuk pelayanan kesehatan dasar di kampung-kampung. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai pada Kamis (12/11) di Lapangan Kantor Dinas Otonom Provinsi Papua, Jayapura. (*Bintang Papua*)

25 November

Sebanyak 41 Balita di Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga pada 24 November dilaporkan meninggal dunia karena mengalami sakit pneumonia dan bronchitis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Nduga Mesak Kogoya, peristiwa meninggalnya Balita ini secara tiba-tiba sejak Oktober 2015. (*Cepos*)

26 November

Informasi terkait kematian 41 Balita ditanggapi oleh pihak keamanan dan pemerintah. Pihak Polres Jayawijaya dan dokter dari Polda Papua, Kamis (26/11) melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut di Kabupaten Nduga. Selain itu Bupati Nduga dan Kepala Dinas Kesehatan Nduga juga turun untuk melakukan pengecekan. (*Cepos*)

27 November

Terkait dengan peristiwa kematian Balita di Kabupaten Nduga, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, bukan 41 Balita tetapi 31 Balita. Lokasinya adalah di Distrik Mbua (Kampung Doigimo, Barapngin dan Labirik). Penyebab kematian Balita ini juga belum jelas. Hal ini dikatakan oleh drg. Aloysius di Kantor UP2KP Jayapura, Kamis (26/11) untuk mengklarifikasi informasi kematian Balita di Kabupaten Nduga. (*Bintang Papua & Cepos*)

30 November

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Stefanus Osok mengakui bahwa beberapa petugas kesehatan kabur dari tempat tugasnya di daerah pedalaman. Pihak dinas telah mengetahui hal tersebut dan akan memanggil petugas sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan baik. (*Bintang Papua*)

Kepala Kepolisian Resort Jayawijaya AKBP Rony Thaba meminta agar kepada Pemkab Nduga untuk terus menyalurkan obat-obatan

dan makanan untuk masyarakat di Distrik Mbuwa. (*Cepos*)

1 Desember

Provinsi Papua mengeluarkan data kasus HIV AIDS sampai bulan Maret 2015 sebanyak 20.114 kasus. Menurut Ketua Harian KPA Provinsi Papua drh. Konstan Karma, selama 9 tahun angka penyakit HIV AIDS mencapai 20 ribu. Berikut data tersebut. (*Cepos*)

Jumlah Kasus HIV AIDS per Desember 2014
(Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Desember 2014)

No	Kabupaten/Kota	HIV	AIDS	Jml	Meninggal
1	Asmat	0	41	41	0
2	Biak Numfor	421	1144	1565	143
3	Boven Digoel	21	28	49	12
4	Deiyai	33	30	63	12
5	Dogiyai	0	35	35	0
6	Intan Jaya	0	2	2	0
7	Kab. Jayapura	631	824	1455	196
8	Jayawijaya	441	1769	2210	160
9	Keerom	4	32	36	5
10	Kep. Yapen	91	248	339	102
11	Kota Jayapura	379	2900	3279	172
12	Mappi	10	89	99	20
13	Merauke	909	738	1657	124
14	Mimika	2189	1732	3921	170
15	Nabire	1937	1823	3760	316
16	Paniai	101	95	196	31
17	Pegunungan Bintang	84	219	303	11
18	Puncak Jaya	2	17	19	4
19	Supiori	14	30	44	2
20	Tolikara	33	84	117	7
21	Yahukimo	18	4	22	4
22	Sarmi	0	0	0	0
23	Mamberamo Raya	0	0	0	0
24	Waropen	0	0	0	0
25	Puncak	0	0	0	0
26	Lanny Jaya	0	0	0	0
27	Nduga	0	0	0	0
28	Mamberamo Tengah	0	0	0	0
29	Yalimo	0	0	0	0

2 Desember

Ketua KPA Kabupaten Jayawijaya Yohanes Walilo pada Selasa (1/12) di Lapangan Pendidikan Wamena mengatakan, jumlah penderita HIV AIDS di Kabupaten Jayawijaya kini mencapai 5500 orang. (*Cepos*)

Sekretaris KPA Papua Konstan Karma di Kantor Gubernur Papua, Senin (30/11), mengatakan, dari data terakhir yang ada jumlah kasus HIV AIDS di Kabupaten Nabire mencapai 4.162 kasus yang terdiri dari 2.042 HIV dan 2.120 kasus AIDS yang menyebabkan 316 sudah meninggal dunia. (*Bintang Papua*)

3 Desember

Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPA Kep. Yapen, jumlah kasus HIV AIDS di Kep. Yapen sampai 31 Oktober 2015 adalah 457 kasus yang terdiri dari 66 orang HIV dan 391 orang AIDS. (*Bintang Papua*)

Selama bulan November 2015 ada 8 balita gizi buruk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. Empat diantaranya sudah meninggal dunia. Menurut salah satu pejabat rumah sakit, hingga Desember 2015 ini tinggal 2 balita yang masih dirawat. Empat balita yang meninggal tersebut akibat komplikasi, bukan hanya gizi buruk tetapi juga ada penyakit paru-paru dan tertular HIV AIDS. (*Bintang Papua*)

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk segera melakukan penanganan kematian puluhan balita di Kabupaten Nduga, Papua. Kematian dari 32 balita di Nduga tersebut belum diketahui meskipun sudah berjalan satu bulan. (*Bintang Papua*)

Terkait dengan persoalan kematian di Kabupaten Nduga, Gubernur Lukas Enembe mengirimkan tim internal yang terdiri dari Dinas Kesehatan Papua yang juga turun di Nduga. Hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan informasi secara rinci tentang kejadian luar biasa tersebut. (*Cepos*)

4 Desember

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sebanyak 121 orang yang sudah meninggal karena HIV AIDS sejak 2002-2015. Sebanyak 1183 kasus terdapat di Manokwari. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Henri Sembiring. (*Bintang Papua*)

Gubernur Lukas Enembe di Kantor Gubernur Papua mengatakan, Pemprov Papua berkomitmen mendorong pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu program yang dilaksanakan adalah meningkatkan akreditasi rumah sakit yang di Provinsi Papua. Tujuan peningkatan pelayanan kesehatan ini adalah agar derajat kesehatan masyarakat Papua meningkat dan angka kematian semakin menurun, khususnya ibu dan balita. (*Cepos*)

12 Desember

Gubernur Lukas Enembe akan memanggil Bupati Nduga Yairus Gwijangge untuk meminta keterangan resmi terkait peristiwa kematian di sana. Peristiwa ini menurut Kementerian Kesehatan sudah termasuk dalam kategori kejadian luar biasa. Hal ini disampaikan oleh Sekda Provinsi Papua Herry Dosianaen. (*Cepos & Bintang Papua*)

Berdasarkan hasil investigasi Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga (SKJWM) ditemukan beberapa data di tiga distrik, yakni distrik Mbua, Dal dan Mbulmu Yalma. Kejadian Luar Biasa ini bermula dengan kematian yakni; kematian Katak dan ular di alam bebas (September-Oktober 2015), kematian hewan peliharaan dan budi daya masyarakat, yaitu, babi, ayam, kelinci dan ikan antara Oktober-November 2015, dan kematian misterius warga lokal terjadi dari Oktober 2015 sampai 3 Januari 2016, berjumlah 54

orang/jiwa. Selain itu ditemukan tidak adanya petugas kesehatan dan obat yang kedaluwarsa beredar di masyarakat. Beberapa rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Mendesak kepada pemerintah pusat terlebih khusus Kemenkes RI, Dinkes Papua dan Kabupaten Nduga sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab untuk mencari dan mengumumkan virus yang menyebabkan penyakit PERTUSIS di Distrik Mbua, Dal dan Mbulmu Yalma.
2. Mendesak kepada DPR Papua dan DPRD Kabupaten Nduga untuk segera membentuk tim khusus atau panitia khusus untuk memastikan berapa banyak manusia meninggal dunia dan hewan yang mati secara misterius itu.
3. Dengan tegas menolak pengobatan massal yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI-Polri serta bantuan sembako oleh aparat keamanan TNI-Polri di wilayah Pegunungan Tengah pada umumnya dan wilayah Mbua secara khusus.
4. Mendesak kepada pemerintah terutama pihak yang membidangi kesehatan untuk menetapkan petugas paramedis yakni dokter spesial, bidan dan perawat serta melengkapi sarana dan prasarana termasuk logistik obat yang dibutuhkan.
5. Mendesak kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk membuka pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Distrik Dal dan Mbulmu Yalma.
6. Mendesak kepada pemerintah pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga yang membidangi pembangunan perumahan rakyat dan sanitasi air bersih untuk membangun rumah layak huni. (*Laporan SKJWM*)

Rumah Sakit Umum Daerah Youwari Kabupaten Jayapura mendapatkan dokter internship atau dokter magang sebanyak 18 orang yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan RI. Para dokter ini bertugas sejak November 2015 dan dengan kehadiran dokter ini cukup memudahkan pelayanan di RSUD Yowari. Hal ini

disampaikan oleh Direktur RSUD Yowari dr. Michael Demetouw.
(*Bintang Papua*)

15 Desember

Dalam sambutan Gubernur Lukas Enembe yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Rosina Upessy ketika membuka sosialisasi *road map* pembangunan pendidikan dan kesehatan 2013-2018 di Hotel Horison, Jayapura, Senin (14/12), mengatakan, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan di Papua masih sangat memprihatinkan. Angka melek huruf masih di bawah rata-rata 75,92% (data BPS 2013). Sedangkan di bidang kesehatan angka kematian bayi 54/1000 kelahiran (BPS 2013), angka Balita gizi buruk 6,3, jumlah kasus HIV AIDS yang cukup tinggi 2.675 kasus (KPA 2014). (*Bintang Papua & Cepos*)

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mendatangkan dua dokter spesialis di RSUD Mulia. Dua dokter spesialis yang dimaksudkan adalah dokter penyakit dalam dan spesialis anak. Kepala RSUD Mulia dr. Bearly Lokopesy mengatakan tujuan didatangkan kedua dokter tersebut untuk memenuhi pelayanan di RSUD Mulia. (*Cepos*)

16 Desember

Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI sepakat melakukan pengawasan obat dan makanan di Papua. Hal ini terungkap ketika pertemuan antara Sekda Papua Heri Dosinaen dan Kepala BPOM RI Alexander Sparringa di ruang kerja Sekda Papua, Selasa (15/12). Hal ini dilakukan karena pengawasan obat dan makanan di Papua tidak berjalan dengan baik. (*Cepos*)

23 Desember

Kepala Dinas Kesehatan Papua dr. Aloysius Giyai mengatakan bahwa Satgas Kaki Telanjang yang diturunkan pada sembilan kabupaten

di Provinsi Papua telah melakukan kinerja memuaskan sehingga pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Papua akan meluncurkan lagi Satgas Kaki Telanjang Jilid II. (*Cepos*)

4. OTONOMI KHUSUS PAPUA

7 Januari

Anggota DPR-RI Dapil Papua dari Fraksi PAN H. Jamaluddin Jafar mengatakan Otsus adalah keberpihakan dan pemberdayaan Orang Asli Papua dan UU sebelumnya sudah mengakomodir semangat itu, sedangkan UU Otsus Plus perlu direvisi karena sangat diskriminatif. (*Suluh Papua*)

8 & 12 Januari

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua F.X. Mote sangat menyayangkan pernyataan yang dilontarkan anggota DPR RI H. Jamaluddin Jafar yang menyebutkan draf UU Otsus Plus sebagai UU yang diskriminasi dan menjurus kepada disintegrasi bangsa dan jauh dari konsep persatuan dan kesatuan NKRI. Menurut Mote, UU Otsus Plus merupakan direktif presiden yang kemudian diperintahkan kepada pemerintah dan rakyat Papua untuk menyempurnakan sesuai tuntutan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Willem Wandik anggota DPR RI Dapil Papua yang lainnya. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

12 Januari

Sebanyak enam kabupaten di Provinsi Papua terancam dipotong alokasi anggaran dana Otsus yang akan diterima tahun 2015 karena terlambat melakukan penetapan anggaran belanja pembangunan daerah (APBD) tahun 2015. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. (*Cepos*)

13 Januari

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dana Otsus sebanyak

60% diarahkan ke kabupaten/kota yang pengelolaannya otomatis dilakukan oleh bupati/wali kota, karena sebagian belanja ada di dana Otsus. Untuk itu kewajiban Pemprov Papua bersama kabupaten/kota untuk mensinkronisasi setiap program tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat Papua. (*Cepos*)

20 Januari

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa Pemprov Papua akan membuka secara transparan dana otsus yang diberikan kepada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Bahkan gubernur menyatakan siap untuk mempublikasikannya melalui media massa. (*Cepos*)

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada mahasiswa asal Papua yang menempuh studi di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, Manado mendukung Pemprov Papua memperjuangkan RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua atau yang dikenal dengan Otsus Plus. (*Cepos*)

21 Januari

Anggota DPR Papua Emus Gwijangge mengungkapkan tidak semua masyarakat atau semua pihak di Papua mendukung adanya pembentukan Perdasus 14 kursi untuk orang asli Papua (OAP). Hingga saat ini DPR Papua, MRP dan masyarakat adat belum sejalan dalam menyamakan persepsi mengenai 14 kursi. (*Bintang Papua*)

26 Januari

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua FX Mote meyakini sebagai sebuah era baru dalam pembangunan di berbagai bidang di Provinsi Papua dengan kehadiran Otsus Plus. Hal ini menjadi ketegasan keberadaan Papua dalam konteks NKRI serta memperkuat pembangunan di berbagai aspek sehingga bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. (*Cepos*)

28 Januari

Ketua MPR RI Zukifli Hasan menegaskan masalah RUU Otsus Plus harus segera diselesaikan, sebab ada terjadi tumpang tindih kepentingan pusat dan daerah. (*Bintang Papua*)

30 Januari

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menuturkan, saat ini Pemprov Papua sedang memperjuangkan revisi RUU Otsus Plus dengan melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga di Jakarta. Dengan adanya UU tersebut diharapkan ada kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah di Papua untuk mengatur rumah tangga dan segala aspeknya. (*Suluh Papua*)

Pihak DPD RI menggelar Rapat Paripurna Luar Biasa dan rapat tersebut disepakati bahwa dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU Otsus Plus menjadi prioritas dari DPD RI. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Komite I DPD RI H. Ahmad Subadri. (*Cepos*)

4 Februari

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI sudah memasukan RUU Otsus Plus sebagai usul inisiatif yang saat ini sedang dibahas bersama DPR-RI. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD Darouk Muhammad. (*Suluh Papua*)

12 & 13 Februari

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan penundaan pembahasan draf RUU Otsus Plus memunculkan rasa kekecewaan. Gubernur menjelaskan draf Otsus Plus itu sudah masuk dalam Prolegnas 2015 tapi ternyata diundur ke tahun 2016, padahal draf tersebut sudah disetujui dan sudah ada sikap tegas dari fraksi-fraksi di DPR-RI yang mendukung. (*Cepos & Bintang Papua*)

16 Februari

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua Ruben Magay mengatakan, kandasnya RUU Otsus Plus masuk dalam pembahasan Prolegnas DPR RI tahun ini akibat proses *bargaining* atau tawar menawar yang dilakukan Pemprov Papua terhadap Pemerintah Pusat dan DPR RI sangat lemah. (*Suluh Papua*)

23 Februari

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua Yan P.Mandenas menilai dana Otsus selama 14 tahun berjalan harus dievaluasi dari sisi penggunaan dan pemanfaatannya. Apalagi ada wacana dari Pemerintah Pusat agar penggunaan dana Otsus itu lebih memberikan dampak bagi rakyat Papua. (*Cepos*)

24 Februari

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa kebijakan pembagian dana Otsus (80 % untuk kabupaten/kota dan 20 % untuk Pemprov Papua) belum bisa dievaluasi karena pembagian dana Otsus tersebut baru berjalan satu tahun. (*Cepos*)

7 Maret

Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan Politik, Hukum dan HAM DPR Papua Emus Gwijangge menghimbau kepada DPRD di kabupaten/kota agar mengawal kebijakan anggaran Otsus yang dicairkan setiap tahun. Hal ini penting mengingat anggaran yang ada cukup besar. (*Suluh Papua*)

10 Maret

Wakil Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Adat Papua Bersatu Jhon Gobay meminta kepada Pemprov Papua dan DPR Papua segera mengeluarkan petunjuk teknis dalam rangka pembentukan Pansel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (*Cepos*)

12 Mei

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dan mewajibkan sebanyak 10% dari total dana Otsus diperuntukan bagi pembangunan keagamaan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bagian Bina Mental Spritual Biro Kesejahteraan dan Rakyat Setda Provinsi Papua Yosep Watori pada Senin (11/5) di Jayapura. (*Bintang Papua*)

9 Juni

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Benyamin Arisoy, di Kantor Gubernur Jayapura, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap Perdasus No. 25 tahun 2013 Tentang Pembagian dan Pengelolaan Dana Otsus. Juga pihaknya merevisi kelemahan-kelemahan di Perdasus tersebut selama dua tahun dilaksanakan untuk diberi muatan yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya mengharapkan Perdasus No. 25 tahun 2013 itu dapat digunakan dengan baik sehingga seluruh pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan Perdasus No. 25 dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, infrastruktur kampung di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. (*Bintang Papua*)

18 Juni

Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura Marinus Yaung, di Jayapura, Rabu (17/6), mengatakan bahwa tidak ada salahnya kalau OPM juga ikut menikmati dana Otsus. Sebab, dikucurkannya dana Otsus Papua sejak 2001 lalu melalui UU No. 21 tahun 2001 juga tidak lepas dari hasil perjuangan TPN-OPM, khususnya yang terus berjuang untuk kedaulatan kemerdekaan Papua Barat sebagai negara sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa uang Otsus yang banyak mengalir ke Papua sekarang ini karena OPM yang berjuang untuk Papua Merdeka, bukan karena kebaikan hati pemerintah pusat. (*Bintang Papua*)

14 Agustus

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan mengucurkan dana sebesar 100 miliar untuk SKPD dalam rangka membiayai sejumlah kegiatan. Kucuran dana ini untuk SKPD yang terfokus pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat asli Papua. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Biak Numfor Enias Rumbewas pada Rabu, 13 Agustus. (*Cepos*)

25 Agustus

Asisten I Deputi Bidang Otda Kemenkopolhukam RI Safei, di Jayapura, Senin (24/8), mengklaim penerapan Otsus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM dan percepatan pembangunan ekonomi di Papua. (*Bintang Papua*)

3 September

Tokoh Agama Herman Saud, di Jayapura, Rabu (2/9), mengatakan bahwa pengelolaan dana Otsus di Papua masih memerlukan perbaikan meskipun pembagian 80%:20% telah terlaksana ke kabupaten/kota. Pembagian dana Otsus ke kabupaten/kota juga perlu melapor kepada gubernur sebagai pimpinan di daerah supaya semuanya transparan. (*Bintang Papua*)

5 September

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (1/9), mengatakan bahwa sudah 80% dana desa telah disalurkan ke masing-masing kampung di Provinsi Papua bahkan terdapat satu kabupaten yang membiayai sendiri tenaga pendampingnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dana desa adalah wewenang pemerintah kabupaten dan kota sedangkan pemerintah provinsi selalu memantau penyaluran dan pembagian dana desa agar dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat setempat. (*Bintang Papua*)

16 September

Gubernur Papua Lukas Enembe, di Swiss-Belhotel Jayapura, Selasa (15/9), kembali meminta dukungan dari DPD RI agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua dengan mendorong regulasi atau kebijakan melalui UU. Selanjutnya gubernur mengatakan bahwa aspirasi masyarakat Papua terhadap RUU Otsus Plus telah diperjuangkan oleh pihaknya, namun karena satu dan lain hal maka RUU Otsus Plus didorong ke Prolegnas 2016. (*Cepos*)

22 September

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, di Jakarta, Senin (21/9), mengatakan bahwa pemerintah pusat harus mengawal pemanfaatan dana Otsus Papua. Dirinya menganggap selama ini dana Otsus dari pemerintah tidak terserap secara maksimal untuk kesejahteraan warga di Papua. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemerintah pusat bukannya tidak mengupayakan kesejahteraan Papua, tetapi dana Otsus hanya berputar di tingkat elit dan tidak sampai ke rakyat. (*Bintang Papua*)

23 September

Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Selasa (22/9), menyampaikan permintaan Gubernur Papua agar pemerintah Provinsi Papua mendorong lembaga keagamaan mengelola dana Otsus sebesar 10% secara akuntabel dan transparan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk mendorong dan memotivasi tugas dan pelayanan lembaga keagamaan yang ada di Papua dengan memadukan program kerja yang sejalan dengan visi-misi gubernur Papua. (*Bintang Papua*)

16 November

Pemerintah Provinsi Papua (Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda

Provinsi Papua Doren Wakerwa dan beberapa Pimpinan SKPD) dan Ketua MRP Timotius Murib melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut salah satu agenda yang dibahas adalah melihat peluang RUU Otsus Plus pada program legislasi nasional tahun 2016. Wakil Ketua DPR RI Fahri mengatakan, siap mendukung RUU Otsus Plus jika draf RUU Otsus Plus yang asli diterima. (*Cepos*)

19 November

Gubernur Lukas Enembe di Kantor Gubernur Papua mengatakan Pemprov akan terus berjuang agar RUU Otsus Plus masuk dalam Prolegnas tahun 2016. (*Cepos*)

14 Desember

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk melengkapi pelaksanaan Otsus di Papua yakni aturan untuk menyelesaikan permasalahan legalitas lahan komunal di Provinsi Papua. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan mengatakan kebijakan tersebut akan tertuang dalam Permen no 9 tahun 2015 tentang Hak Komunal yang di dalam mengatur penghormatan terhadap hak masyarakat adat. (*Cepos*)

16 Desember

Komisi V DPR Papua mengusulkan kepada Gubernur Lukas Enembe untuk mengubah format pembagian dana Otsus yang diperuntukan kabupaten/kota di Papua. Menurut Sekretaris Komisi V DPR Papua Nason Utti, pembagian dana yang sedang berjalan dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Lebih lanjut Nason mengusulkan sebaiknya dibagi 40% untuk provinsi dan 60% untuk kabupaten/kota. Hal ini dikatakan Nason pada Selasa (15/12) di Kantor DPR Papua. (*Bintang Papua & Cepos*)

18 Desember

Sekretaris Barisan Merah Putih Papua Yonas Nussy menyarankan agar Gubernur Papua dan Papua Barat mengatakan sebaiknya dana Otsus yang sisa dibagikan kepada orang asli Papua 50 juta perkepala. (*Bintang Papua*)

19 Desember

Salah satu tokoh Papua Thaha Alhamid, di Hotel Grand Abepura, Jumat (18/12), mengatakan, untuk sekarang tak penting besaran jumlah dana yang dialokasikan tetapi yang terpenting adalah pemisahan dana Otsus dan dana APBD sehingga publik akan lebih memahami dan bisa mengontrolnya. (*Cepos*)

5. MAJELIS RAKYAT PAPUA DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

20 April

Majelis Rakyat Papua menggelar rapat kerja dan dengar pendapat pada Jumat (17/4). Pertemuan ini untuk membahas dan mengevaluasi proses sosialiasasi. Menurut Ketua rapat dengar pendapat tersebut Yaobus Dumupa, pertemuan ini bertujuan melihat sejauh mana proses sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi ini dijumpai banyak masyarakat menyampaikan kehilangan hak ulayat mereka dan depopulasi (*Bintang Papua*).

4 Juli

Menanggapi kinerja MRP, Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobay mengatakan, sebaiknya MRP dibubarkan saja karena tidak bekerja sesuai dengan roh saat dibentuk. Masalah-masalah masyarakat seperti kasus Degeuwo di Paniai, Kelapa Sawit di Nabire, PT Freeport dan persoalan adat lainnya tidak dijalankan oleh MRP. (*Cepos*)

20 Oktober

Ketua MRP Provinsi Papua Timotius Murib di Jayapura mengatakan

bahwa seluruh masyarakat Papua termasuk mahasiswa di Papua perlu mengetahui bahwa MRP adalah organ pemerintahan Otsus Papua, yang taat asas melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Selain itu MRP dibentuk dalam rangka pelaksanaan Otsus di Tanah Papua. (*Bintang Papua*)

6. PEMEKARAN WILAYAH

6 Juli

Tim pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Okika menggelar doa bersama dan penggalangan dana di Kampung Sompaima, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (6/7). Kegiatan ini dilakukan guna mendukung terbentuknya dan berdirinya DOB tersebut. Wakil Ketua DOB Okika Yakobus Yogobi mengatakan bahwa tim pusat akan datang mengecek persiapan DOB Okika. (*Cepos*)

9 Juli

Presiden Joko Widodo ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7), meminta kepada DPR RI dan DPD RI untuk tidak tergesa-gesa terkait rencana pembentukan 87 DOB. Lebih lanjut dikatakan pembentukan DOB harus sangat berkaitan dengan ruang fiskal dan tidak boleh melenceng dari tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembentukan DOB harus dihindari dari niat-niat bagi jabatan dan kekuasaan. (*Bintang Papua*)

10 Agustus

Anggota DPR RI Komisi II Kristo Ibo dan Komarudin Watubun memfasilitasi pertemuan rombongan kerja DPR RI dengan Tim Pemekaran Kabupaten Puncak Trikora di Jakarta. Menurut Kristo Ibo, DPR RI pada prinsipnya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran Kabupaten Puncak Trikora. Pada kesempatan ini juga tim pemekaran menyerahkan semua dokumen

administrasi pemekaran tersebut. (*Bintang Papua*)

7. KESEJAHTERAAN UMUM

2 April

Pihak Pemda Lany Jaya memberikan dana bantuan dana ‘gerbang mas hasrat’ Papua tahun 2015 senilai 100 juta untuk pembangunan 200 unit rumah bagi masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Bupati Lany Jaya Befa Jigibalom, Selasa (31/3), di Kantor Gubernur Papua Jayapura. Menurut Befa hal ini menindaklanjuti program pembangunan 13.000 unit rumah sesuai kebijakan gubernur dan wakil gubernur Papua melalui program ‘gerbang mas hasrat’ Papua. (*Bintang Papua*)

5 Mei

Pihak MRP mengusulkan pembangunan 12.000 unit perumahan untuk tokoh adat dan agama dan para pelintas batas di Papua. Dan telah disetujui program ini diambil dari alokasi anggaran APBN untuk 310 unit perumahan di 29 kabupaten/kota di Papua. Hal ini terungkap ketika dalam acara dengar pendapat di Hotel Sahid, Jayapura, Senin (4/5) yang dihadiri oleh MRP dan anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua Willem Wandik. (*Bintang Papua*)

10 Oktober

Ketua DPRD Biak Numfor Zeth Sandy di Biak, Jumat (9/10), meminta agar Bulog memperhatikan kelayakan Raskin yang dikonsumsi masyarakat tidak mampu. Dikatakan lebih lanjut bahwa keluhan masyarakat terhadap Raskin yang kotor, berbatu dan kehitaman seringkali dilaporkan ke DPRD. (*Bintang Papua*)

12 November

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua mengklaim angka pengangguran di Provinsi Papua mengalami peningkatan mencapai di atas 100.000 orang. Menurut Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua Yan Piet Yawar, tingkat pengangguran dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan penduduk di Papua. (*Bintang Papua*)

8. KORUPSI

5 Januari

Ketua Fraksi Hanura DPRD Dogiay Markus Waine melaporkan Bupati Dogiyai dalam kasus bantuan sosial untuk tahun anggaran 2014 senilai Rp 27 miliar lebih. (*Bintang Papua, Suluh Papua & Cepos*)

9 Januari

Setelah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi trayek fiktif Perum Damri Jayapura yang menggunakan dana APBN, penyidik Tipikor Polresta Jayapura kembali menyelidiki dugaan korupsi trayek yang menggunakan dana APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012. Dari hasil penyelidikan terdapat dua tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp 936 juta. Hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare. (*Cepos*)

13 Januari

Koordinator Umum Mahasiswa Kabupaten Mappi Daniel Wagatu mempertanyakan komitmen dan keseriusan pihak Polda Papua dan Plores Mappi dalam menuntaskan kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 7 Miliar dari Rp 36 Miliar di Kabupaten Mappi tahun 2013. Pasalnya meski telah menetapkan Asisten II Setda Kabupaten Mappi sebagai tersangka, namun belum juga ditahan. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

20 Januari

Pihak Kejati Papua belum memutuskan kasus dugaan korupsi pengadaan empat mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kabupaten Nabire pada 2007 dengan kerugian negara mencapai

Rp 21 Miliar yang melibatkan mantan Bupati Nabire. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Herman da Silva. (*Suluh Papua*)

22 Januari

Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana honor kegiatan DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 senilai 5 miliar, yakni Edy Simbar sebagai mantan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayapura dan Korneles Yanuaring sebagai mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura. (*Suluh Papua*)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1081.K/TIB/PUS/2014 memutuskan bahwa terdakwa Labora Sitorus terbukti telah melakukan tindak pidana dan secara sah dan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, sehingga MA menguatkan vonis 15 tahun penjara dengan denda Rp 5 miliar kepadanya. Namun hingga kini putusan MA belum dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Papua karena yang bersangkutan hingga kini menghilang dari Lapas Sorong. (*Suluh Papua*)

23 Januari

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II B Sorong Maliki mengatakan, Labora Sitorus tidak pernah berada di Lapas. Bahkan menurutnya sebelum pihak kejaksaan menetapkan Labora sebagai DPO. Labora tidak pernah ada di Lapas terhitung tanggal 17 Maret 2014 (*Cepos*).

30 Januari

Pihak Polda Papua siap membackup Polda Papua Barat untuk mencari terpidana Labora Sitorus terkait dugaan pencucian uang, kepemilikan kayu dan bahan bakar minyak ilegal yang menghilang dari sel tahanan Lapas Sorong Papua Barat beberapa waktu lalu.

Untuk rencana tersebut Polda Papua mengutus anggota yang pernah bertugas menjadi Kapolres Sorong Kota yakni AKBP Golden Heart. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

3 Februari

Meskipun berada di rumahnya di Sorong, pihak Polda Papua Barat tidak bisa menangkap Aiptu Labora Sitorus. Hal ini disebabkan Labora memiliki surat keterangan bebas hukum yang dikeluarkan oleh Lapas Sorong. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua Barat Brigjen. Pol Paulus Waterpauw. (*Bintang Papua*)

4 Februari

Kejaksaaan Tinggi Papua meminta Kejagung mengeluarkan surat pencekalan terhadap Aiptu Labora Sitorus agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. (*Suluh Papua*)

5 Februari

Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap Labora Sitorus. (*Cepos & Bintang Papua*)

Meski ada bantahan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sorong Samaludin Bogra atas surat bebas yang dikeluarkannya, namun juru bicara LS Fredik Faldawer mengakui surat itu memang ada dan Faldawer sendiri yang menerima dari Kalapas yang saat itu menjabat. (*Cepos*)

7 Februari

Labora Sitorus, terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak dan pembalakan liar kayu, menuturkan sejumlah alasan dibalik keluarnya dari sel. Menurut Labora, instansi kepolisian, kejaksaan dan Lapas telah melakukan pembohongan publik di media massa. Labora mengatakan bahwa selama ini ia berada di rumahnya, padahal para petinggi dari tiga instansi tersebut sering datang ke rumahnya. (*Suluh Papua*)

Kementerian Hukum dan HAM meminta Polda Papua menjemput Labora Sitorus untuk melanjutkan hukumannya. (*Suluh Papua*)

10 Februari

Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengungkapkan 13 temuan di Kabupaten Jayawijaya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua yang bernilai mencapai Rp 19,7 miliar terkait pembayaran honorarium belanja pegawai pada sekretariat DPRD Jayawijaya yang tidak sesuai dengan ketentuan pimpinan dan anggota DPRD Jayawijaya pada tahun 2014-201. (*Suluh Papua*)

Mantan Bupati Nabire Aselmus P. Youw ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Penahanan AP Youw ini terkait dugaan penyimpangan dana pada proyek pengadaan empat unit mesin pembangkit listrik diesel tahun 2007 senilai Rp 21 miliar. (*Bintang Papua & Cepos*)

11 Februari

Tokoh Intelektual Papua Andarias Gobay dan Pemuda Papua sangat menyayangkan sikap Kejati Papua yang menangkap dan menahan mantan Bupati Nabire AP Youw. (*Bintang Papua*)

12 Februari

Mantan Bupati Nabire AP Youw akhirnya dimasukkan ke Lapas Klas IIA Jayapura karena terbukti melakukan penyalagunaan PLTD dengan pola penyertaan modal antara PT. Utama Mandiri dengan Pemda Nabire tahun 2010 yang merugikan Rp 30-an miliar. (*Suluh Papua*)

Tokoh Intelektual Kabupaten Dogiyai Andreas Gobay meminta kepada Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Papua untuk segera menahan mantan kepala Badan Keuangan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dogiyai Soleman Tomasoyan

yang diduga korupsi dana Bansos senilai Rp 32 miliar tahun anggaran 2012-2013. (*Bintang Papua*)

13 Februari

Pihak Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Papua kembali memeriksa Bupati Dogiyai Thomas Tigi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos tahun anggaran 2012-2013 sebesar Rp 32 miliar. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende. (*Bintang Papua*)

17 Februari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjend Pol Paulus Waterpauw menegaskan pihaknya kembali menambah waktu deadline dua hari untuk Aiptu Labora Sitorus menyerahkan diri sebelum dilakukan eksekusi paksa. (*Cepos & Kompas*)

18 Februari

Pihak Komnas HAM menegaskan tidak akan memberikan perlindungan pada terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak dan pembalakan liar Aiptu Labora Sitorus. (*Suluh Papua*)

20 Februari

Menanggapi kasus yang menimpah dirinya, Aiptu Labora Sitorus mengatakan kasus yang menimpahnya adalah rekayasa terutama saat pemberkasan kasus. Ia mengaku tidak pernah diperiksa dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka. (*Cepos*)

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura AKBP Jeremias Rontini mengatakan unit Tipikor Satreskrim Polres Jayapura Kota menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi pada trayek fiktif Perum Damri Jayapura senilai Rp 963 juta yang berasal dari APBD Provinsi Papua tahun 2012. (*Cepos*)

21 Februari

Pihak kejaksaan yang di-back up aparat keamanan baik TNI maupun Polri berhasil melakukan eksekusi terhadap terpidana Iptu Labora Sitorus. Eksekusi tersebut melibatkan 700 aparat keamanan. (*Suluh Papua & Cepos*)

28 Februari

Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu ditahan oleh KPK. Barnabas ditahan bersama tersangka lainnya terkait status tersangka korupsi proyek PLTA di Sungai Mamberamo. (*Cepos*)

7 Maret

Kepala Dinas Pendidikan Elly Wenggy dan Direktur CV. Ravalo Mandiri Cristofel Wonatorey yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Waropen diduga terlibat dalam kasus pembangunan pagar sekolah SMU Negeri Ureifaisei pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 yang berjumlah Rp 950 juta. Pekerjaan pagar sekolah ini dalam kenyataannya tidak dikerjakan sampai tuntas. (*Suluh Papua*)

18 Maret

Pihak Kejati Papua menetapkan tiga tersangka dalam kasus pengadaan satu unit alat kesehatan oksigen konsentrator atau mesin penghasil oksigen di RSUD Yowari Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2010 senilai Rp 7,8 miliar. Ketiga tersangka tersebut adalah SR (Pejabat Pembuat Komitmen), NB (kuasa pengguna anggaran) dan tersangka LA bertindak sebagai penyedia barang dan jasa. (*Suluh Papua*)

20 Maret

Jejaksaan Tinggi Papua mengklaim telah berkontribusi melalui litigasi maupun non litigasi yang sudah mulai berjalan di Provinsi Papua. Pihak Kejati Papua menyelamatkan uang negara sebesar Rp 33 miliar. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan

Tinggi Papua Herman da Silva. (*Cepos*)

23 Maret

Kepala Kejati Papua Herman da Silva mengungkapkan dari Januari sampai Maret 2015 pihaknya telah menangani sejumlah kasus pidana korupsi. Ada 33 kasus tahapan penyelidikan, 27 kasus dalam penyelidikan dan 49 kasus dalam tahap penuntutan. (*Cepos*)

24 Maret

Pihak kepolisian menyerahkan dua tersangka ke Kejaksaan Negeri Jayapura kasus penyalahgunaan dana subsidi trayek bagi Perum Damri Wilayah IV Jayapura tahun anggaran 2012 senilai Rp 3 miliar. Penyerahan tersangka setelah dinyatakan lengkap. (*Bintang Papua*)

Kejaksaan Negeri Serui menetapkan Sekretaris Kampung Kairawi Nikolas Raubaba sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana bantuan bagi masyarakat kampung Kaiwai, Distrik Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen hingga ratusan juta. Dana bantuan yang disalahgunakan tersebut yakni bantuan desa untuk perbaikan infrastruktur. (*Suluh Papua*)

27 Maret

Kejaksaan Tinggi Papua berencana memeriksa 4 tersangka kasus pengadaan satu unit alat kesehatan oksigen konsentrator atau mesin penghasil oledigen di Rumah Sakit Yowari Kabupaten Jayapura dengan menggunakan anggaran tahun 2010 senilai Rp 7,8 miliar pada awal April 2015. (*Suluh Papua*)

Kejaksaan Negeri Serui melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Petra Wonda dan Leo Yakadewa menuntut Bupati Waropen Yesaya Buiney penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 200 juta serta membayar uang pengganti 1 miliar. (*Suluh Papua*)

30 Maret

Pihak DPRD Kabupaten Waropen mendesak Kejaksaan Negeri Serui untuk segera menahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waropen yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembangunan pagar SMU Negeri Urei Faisei tahun anggaran 2013. (*Suluh Papua*)

31 Maret

Kejaksaan Negeri Jayapura menyelidiki kasus dugaan *mark up* pembuatan brojong di Sungai Doyo, Sentani, Kabupaten Jayapura. Tim Penyidik Kejati Jayapura John W. Rayar mengungkapkan pembangunan tersebut menggunakan dana APBD Kabupaten Jayapura tahun 2013 sebesar Rp 15 miliar. Dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua diduga adanya penggelembungan harga sehingga merugikan negara sekitar Rp 3,2 miliar. (*Cepos*)

1 April

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Supiori inisial EA ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembangunan 40 unit rumah bantuan di Sowek, Distrik Kepulauan Aruri pada tahun 2013. (*Cepos*)

2 April

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Waropen yang melibatkan Bupati Waropen Yesaya Buney, Rabu (1/4), di Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura terungkap bahwa bupati tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan korupsi. Bupati hanya menjalankan tugasnya untuk mensukseskan Pilkada. Terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang menjelaskan keterlibatan bupati. Tidak ada yang mengakui terkait siapa yang mencairkan dana tersebut. (*Cepos*)

11 April

Terkait dengan dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Dogiyai,

Kapolda Papua Yotje Mende pada Jumat (10/4) mengatakan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam penyelidikan sudah ditetapkan seorang pegawai Pemkab Dogiyai inisial SK. Dugaan korupsi ini merugikan negara sebesar Rp 32 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Papua (BPKP) terdapat 33 kasus korupsi yang menyebabkan negara rugi Rp 49 miliar. Menurut Kepala BPKP Perwakilan Papua Ketut Suadnyana Merada, Minggu (12/3), kasus penyalahgunaan dana hampir terjadi di semua kabupaten/kota di Papua antara lain Jayapura, Biak Numfor, Waropen, Boven Digoel, Puncak, Merauke, Tolikara, Sarmi, Nabire, Yahukimo dan Asmat. (*Cepos & Kompas*)

16 April

Bupati Waropen Yesaya Buinei divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jayapura pada pembacaan putusan, Rabu (15/4). Bupati Yesaya tidak terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah APBD Kabupaten Waropen yang diperuntukan penyelenggaraan Pilkada Waropen 2010. (*Cepos, Suluh Papua*)

18 April

Pihak Kejaksaan Negeri Jayapura, Papua belum mengeksekusi penahanan dua terpidana kasus korupsi Mathias Sarwa dan Jantje Lagu. Kedua orang ini sudah dijatuhkan sebagai terpidana pada 4 Maret. Mathias adalah Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan Jantje adalah direktur keuangan. Mereka divonis lima tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan beras bagi PNS di Pegunungan Tengah pada 3 Desember 2009. (*Kompas*)

23 April

Penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sarmi Mesak Manibor belum juga ada kemajuan. Mesak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyalahgunakan dana

APBD tahun 2012 untuk membangun pagar dan merehab rumah pribadinya sejak Oktober 2014. (*Kompas*)

27 April

Pihak Kejaksaan Tinggi Papua melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang (SR adalah pembuat komitmen, MB adalah kuasa pengguna anggaran dan LA adalah penyedia jasa dan barang) yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Yowari, Kabupaten Jayapura. (*Cepos*)

6 Mei

Pihak Polda Papua meningkatkan penyelidikan terhadap Bupati Dogiyai Thomas Tigi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kabupaten Dogiyai. Kepala Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige di Jayapura pada Selasa (5/5) mengatakan status Bupati Thomas Tigi sebagai saksi ditingkatkan menjadi tersangka. Sebelumnya pada Oktober 2014, bendahara di Sekda Dogiyai berinisial SK ditetapkan sebagai tersangka. Pada 30 April 2015 Polda menetapkan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dogiyai ST juga sebagai tersangka. (*Kompas, Cepos, Suluh Papua & Bintang Papua*)

Pihak Polres Manokwari masih mengejar salah satu tersangka kasus DR dugaan korupsi APBN tahun 2012 pada Dinas Peternakan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 40 miliar. Pihak kepolisian susah mengejarnya karena DR berpindah-pindah tempat tinggalnya. (*Bintang Papua*)

8 Mei

Dua tersangka terpidana kasus korupsi PD Irian Bhakti Jayapura Mathias Sarwa dan Janjte Lagu segera dieksekusi oleh Kejati Papua. Kedua tersangka tersebut telah diputuskan melalui putusan kasasi MA pada 24 Agustus 2011 namun hingga sekarang atau 4 tahun

ini belum dieksekusi. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejati Papua Herman da Silva. (*Cepos*)

12 Mei

Ketiga tersangka kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Daerah Yowari Kabupaten Jayapura telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar ke Kejaksaan Tinggi Papua di Kantor Kejati Papua, Senin (11/5). Ketiga tersangka berinisial NB, MB dan SR terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat oksigen dan instalasinya di RSUD Yowari Kabupaten Jayapura. (*Cepos & Bintang Papua*)

13 Mei

Pihak Kejati Papua menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyalagunaan dana pendistribusian beras Papua Barat untuk PNS tahun anggaran 2014 sebesar Rp 9 miliar. Dua tersangka tersebut adalah berinisial PS sebagai pejabat pembuat komitmen dan DSR sebagai direktur PT MKL Tunas Papua. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejati Papua Herman da Silva pada Selasa (12/5). (*Suluh Papua, Cepos*)

15 & 18 Mei

Pihak Kejagung dan Polda Papua menangkap secara paksa Bupati Sarmi Mesak Manibor di kediamannya Kota Baru Petam, Kabupaten Sarmi, Kamis (14/5) dini hari. Bupati Mesak dibawa ke Jakarta menggunakan jasa penerbangan Garuda. Mesak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Sarmi untuk membangun rumah pribadinya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 4,5 miliar. Dalam perkembangan penyelidikan diketahui bahwa pihak Polres Sarmi juga menerima dana Bansos sebesar Rp 4.400.000.000 dan Kodim Rp 4.690.000.000 berdasarkan SK Bupati Sarmi No.48 tahun 2013. Selain itu juga ada beberapa partai politik juga menerima Bansos diantaranya Golkar Rp 76 juta, PDIP Rp 57 juta, PPP Rp 38 juta,

Hanura Rp 38 juta, Demokrat Rp 19 juta berdasarkan SK Bupati No.45 tahun 2013. (*Cepos, Suluh Papua dan Bintang Papua*)

21 Mei

Kepala Kejaksaan Negeri Wamena Dian Frits Nalle menyesal terhadap keputusan majelis hakim Pengadilan Jayapura yang mengalihkan status 4 terdakwa kasus dugaan korupsi menjadi tahanan kota. Menurut Nalle hal ini akan menyulitkan jaksa menghadirkan terdakwa ke persidangan lanjutan karena beberapa terdakwa berdomisili di luar Jayapura. Keempat terdakwa tersebut adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Yalimo Yusuf Tandipare, Iwan Turangan, Amos Hubi dan Samuel Paluruang. Yusuf, Iwan dan Amos terjerat kasus penyalahgunaan dana proyek PLTA di Distrik Elelim tahun 2011 senilai Rp 5,1 miliar. (*Kompas & Cepos*)

16 Juni

Massa yang tergabung dalam Forum Pembela Demokrasi Papua (FPDP), di Kantor Kejati Papua, Senin (15/6), melakukan aksi demonstrasi damai menuntut agar Kejati mengusut tuntas dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Papua tahun 2012 yang juga diterima oleh beberapa anggota DPR Papua. Lebih lanjut, Koordinator FPDP Yan Matuan mengatakan bahwa pihaknya menilai Kejati Papua tidak serius dalam melakukan penyelidikan kasus Bansos tahun 2012. (*Cepos*)

18 Juni

Kepala Kejati Papua Herman Lose da Silva, di Gedung Kejati Papua, Rabu (17/6), mengungkapkan bahwa tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tolikara berinisial DS selaku pejabat pengguna anggaran pada Dinas PU Kabupaten Tolikara tahun 2013; Direktur PT. RM berinisial LG sebagai penyedia barang dan pejabat teknis kegiatan berinisial SL, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juni 2015. (*Cepos dan Bintang Papua*)

7 Juli

Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu didakwa memperkaya diri Rp 550 juta dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED) Danau Paniai dan Sentani tahun 2008 serta Sungai Urumuka dan Mamberamo tahun 2009 dan 2010. Hal ini dikatakan oleh Jaksa Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/7). (*Bintang Papua*)

8 Juli

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara menggelar unjuk rasa di Kantor Kejati Papua, Selasa (7/7). Dalam aksi ini massa mendesak pihak kejaksaan agar segera mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat Pemkab Tolikara. (*Bintang Papua & Cepos*)

24 Juli

Massa yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Papua, Kamis (23/7), menggelar aksi damai di Kantor Kejati Papua. Massa menuntut agar Kejati segera menahan Bupati Dogiyai terkait dugaan korupsi dana Bansos Dogiyai 2014 sebesar Rp 32 miliar. (*Cepos & Bintang Papua*)

28 Juli

Dalam rangka memberantas dan mencegah maraknya korupsi, Gubernur Lukas Enembe meminta agar segera bentuk tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemda yang diketuai oleh Sekda provinsi, kabupaten dan kota yang dibantu oleh asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan. Hal ini dikatakan oleh Lukas dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Papua Hery Dosinaen ketika membuka acara sosialisasi penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Senin (27/7) di Kantor Gubernur. (*Bintang Papua*)

30 Juli

Ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Dogiyai Markus Waine, Rabu (29/7), mengaku kecewa karena Kejati Papua tidak menahan Bupati Dogiyai Thomas Tigi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana Bansos tahun 2013. (*Bintang Papua*)

1 Agustus

Masyarakat Boven Digoel yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Boven Digoel meminta agar KPK ke Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan audit keuangan di Pemkab Boven Digoel. Hal ini disampaikan pada Jumat (31/7) oleh Koordinator Paguyuban Boven Digoel Laurensius Menka. (*Bintang Papua*)

6 Agustus

Tim Penyidik Tipikor Polres Mimika masih terus mengumpulkan bukti untuk mengungkapkan praktik korupsi dana hibah Pemkab Mimika ke KONI tahun anggaran 2013. Menurut Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Galih Wardani, pihaknya masih meneliti dokumen laporan keuangan pengelolaan dana tersebut. (*Bintang Papua*)

7 Agustus

Bupati Sarmi Mesak Manimbor yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi Rp 4,5 miliar menjalani penahanan di LP Abepura. (*Bintang Papua*)

11 Agustus

Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Papua hingga saat ini sudah menangani 128 kasus korupsi di Papua dan Papua Barat. Sebagian sudah diproses hukum dan sebagian masih dalam penyelidikan. Khusus untuk Provinsi Papua, Kejati menangani 46 kasus yang masih dalam penyelidikan, sedangkan kasus yang sudah masuk dalam tahapan penyidikan 39 kasus, terdiri dari 26 kasus dari

tahun sebelumnya dan 13 kasus yang sedang berjalan. Beberapa contoh kasus seperti dugaan korupsi di Mamberamo Raya dan Tolikara. Hal ini dinyatakan pada Senin (10/8) oleh Kepala Kejati Papua Herman da Silva di ruang kerjanya. (*Cepos*)

14 Agustus

Mantan Bendahara Kejar Wamena Firman Rahman dijemput di rumahnya di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Papua pada Kamis (13/8). Firman merupakan terpidana kasus korupsi penyalahgunaan anggaran penyelidikan di Kejar Wamena tahun anggaran 2012-2013 sebesar Rp 3,5 miliar. (*Cepos*)

26 Agustus

Kejaksaan Negeri Jayapura akhirnya menetapkan anggota DPRD Kota Jayapura inisial JB sebagai tersangka dalam kasus pengadaan pakaian batik di lingkungan kota Jayapura. Kasus ini juga menyeret Sekda Kota Jayapura inisial RDS dan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Selasa (25/8), RDS dituntut dengan hukuman 4,6 tahun. (*Cepos*)

23 September

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LP3D) RI Provinsi Papua Thomas Sondegau di Hotel Horizon Jayapura, Selasa (22/9), mempertanyakan kepada pihak kepolisian Papua tentang kejelasan kasus korupsi kasus Mess DPRP. Sebab sudah lama kasus ini mencuat ke permukaan tapi hingga kini terkesan mulai tenggelam. (*Cepos dan Bintang Papua*)

30 September

Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Timbul Tambah pada Senin (29/9) menahan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kandispora) Provinsi Papua Barat dan yang menjabat sebagai Asisten II Sekda Papua Barat berinisial SK terkait dugaan korupsi anggaran Dispora Papua Barat tahun 2013 sebesar Rp 672 juta lebih untuk kegiatan Liga Pendidikan Indonesia tingkat Nasional. (*Cepos*)

9 Oktober

Kaur Humas Polres Jayapura Kota Jahja Rumra pada Kamis (8/10) menyatakan masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penyalahgunaan dana pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bagi 14 kampung di Kota Jayapura tahun 2014 dengan total anggaran Rp 2.797.000.000. (*Cepos*)

6 November

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Danang Prasetyo Dwiharjo di Sorong mengatakan, total nilai asset terpidana kasus illegal logging dan pencucian uang Labora Sitorus yang disita mencapai Rp 6 miliar. (*Bintang Papua*)

Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Byak melakukan aksi demo ke Kantor DPR Papua, Kamis (5/11). Massa meminta kepada DPR Papua untuk mempertanyakan dan mengawal kasus dugaan korupsi dana APBD Mamberamo Raya yang diduga dilakukan oleh mantan bendahara Kabupaten Mamberamo Raya inisial TEO. (*Bintang Papua & Cepos*)

9 November

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan roda empat dan dua serta komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Boven Digoel bertambah dua orang lagi yang sebelumnya menjadi saksi. Kedua tersangka yang baru itu adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa inisial SAW dan Bendahara pengadaan barang dan jasa inisial SU. (*Cepos*)

12 November

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua telah menetapkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen MNL sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana APBD dan dana Otsus tahun 2013 untuk pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan senilai Rp 5,06 miliar. (*Cepos*)

18 November

Wakil Ketua KPK RI Adnan Pandu Praja di Auditorium Uncen Jayapura pada 17 November mengatakan lembaga yang paling terkorup dalam pemerintahan adalah DPR dan DPRD. Setelah itu kepala lembaga atau dari kementerian, disusul duta besar dan komisioner. (*Cepos*)

14 Desember

Pelaksana tugas Bupati Sarmi Albertus Suripno menyurati Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terkait tahanan kota terhadap Bupati Sarmi dalam kasus korupsi pembangunan pagar dan rehabilitas rumah pribadi bupati yang menggunakan APBD sebesar Rp 4,6 miliar. Menurut Albertus, surat tersebut menanyakan status tahanan kota Mesak Manibor karena Mesak telah melakukan aktivitas pemerintahan layak sebagai seorang bupati dan telah membuat pernyataan ke publik Sarmi bahwa kasus yang menimpa dirinya telah gugur demi hukum. (*Bintang Papua*)

16 Desember

Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Merauke Simon F yang divonis terbukti bersalah dalam kasus korupsi Rp 1,2 miliar dieksekusi ke LP Abepura Jayapura pada 11 Desember. Hal ini dikatakan oleh Kajari Merauke Raja Sakti Harahap melalui Kasi Pidsus Yasosisokhi Zebua pada Selasa (15/12) di ruang kerjanya. (*Cepos*)

9. PILKADA

6 Januari

Para anggota DPRD Kabupaten Sarmi periode 2014-2018 bersama massa melakukan aksi demo damai di kantor DPRD Kabupaten Sarmi guna meminta kepastian pelantikan yang hingga kini tidak ada kejelasannya. (*Suluh Papua & Bintang Papua*).

7 Januari

Ketua Umum LMA Kabupaten Sarmi Zakarias J Sakueray menegaskan penolakan pelantikan anggota DPRD Sarmi terpilih periode 2015-2019 sampai dikeluarkannya hasil rekomendasi yang diberikan oleh LMA dan MRP kepada KPU Sarmi, KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat. Rekomendasi tersebut berdasarkan UU Otsus mengenai keberpihakan terhadap orang asli Papua dan kearifan lokal dengan 80% anak asli Sarmi dan 20% non Sarmi. (*Cepos*)

Bupati Sarmi Mesak Manibor menyatakan bahwa pelantikan anggota DPRD Sarmi terpilih periode 2014-2019 akan dilantik dalam waktu dekat, hanya menanti kepastian waktu dari Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. (*Suluh Papua*)

16 Januari

Komisi I DPR Papua melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua, KPU Papua, Bawaslu dalam rangkai membahas persoalan terkait belum dilantiknya anggota DPRD di sejumlah kabupaten. Menurut Ketua Komisi I DPR Papua Elvis Tabuni, harusnya pelantikan anggota DPRD terjadi sejak Juli – Oktober 2014 (*Cepos & Suluh Papua*).

21 Januari

Sebanyak 30 anggota DPRD Lanny Jaya Periode 2014-2019 secara resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wamena Berlinda U. Mayor di Gedung DPRD Jayawijaya. (*Cepos & Suluh Papua*)

22 Januari

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Orgenes Wanimbo mengungkapkan 14 kursi Otsus bagi orang asli Papua bukan untuk satu atau dua kelompok saja tetapi semua orang asli Papua termasuk mereka yang berseberangan dengan NKRI. (*Bintang Papua*)

Tercatat empat kabupaten di Papua akan menggelar Pilkada serentak pada Desember 2015 yakni Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom dan Waropen. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPU Papua Betty Wanane. (*Bintang Papua*)

26 Januari

Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2014-2019 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena Berlinda Ursula Mayor di Gedung DPRD Pegunungan Bintang. (*Bintang Papua & Cepos*)

9 Februari

Anggota Komisi A DPR Papua Ruben Magai menegaskan pihaknya tak terlibat di dalam pembentukan Tim Seleksi 14 kursi DPR Papua. Namun demikian pihaknya memiliki kewenangan mengawasi proses yang dilaksanakan tim seleksi. (*Bintang Papua*)

14 Februari

Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tetap konsisten untuk pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015. Meski demikian KPU sebagai penyelenggara Pilkada justru menginginkan Pilkada serentak dimundurkan ke tahun 2016 dan kemungkinan dilaksanakan dua putaran. (*Cepos*)

16 Februari

Dewan Perwakilan Rakyat Papua akan mengutus perwakilan ke masing-masing daerah pemilihannya untuk mensosialisasikan Perdasus 14 kursi untuk orang asli Papua dari 5 wilayah daerah pengangkatan. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR Papua Emus Gwijangge. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

Bupati Kabupaten Yahukimo Ones Pahabol mengatakan anggota DPRD Yahukimo belum dilantik karena kinerja KPU dinilai cacat di mata hukum. (*Suluh Papua*)

18 Februari

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengklarifikasi masalah keterlambatan pelantikan 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 ke Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende. Menurut Bupati Eltinus, sebagai bupati tidak pernah menghalangi pelantikan anggota DPRD Mimika sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. (*Bintang Papua*)

24 Februari

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2015 akan diikuti 272 daerah di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebanyak 68 daerah tetap dapat melaksanakan Pilkada, meski belum menganggarkan biaya pelaksanaan dalam APBD 2015. (*Cepos*)

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua Yan P. Mandenas tetap menolak keras pengangkatan 14 kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua. Pasalnya perlu ada sinkronisasi antara DPR Papua dan MRP terlebih dahulu dalam rekrutmen dan format 14 kursi. (*Bintang Papua*)

25 Februari

Sebanyak 300 personil anggota TNI/Polri serta satu pleton Brimob akan dikirim ke Tolikara untuk mengamankan pelantikan anggota DPRD Tolikara terpilih di Karubaga. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Tolikara AKBP Suroso. (*Cepos*)

Anggota Badan Legislasi DPR Papua Emus Gwijangge membantah keras pernyataan ketua Fraksi Hanura DPR Papua Yan Mandenas yang menolak pengangkatan 14 kursi untuk orang asli Papua. Sebab 14 kursi tersebut merupakan aturan UU Otsus tahun 2001 yang harus dilaksanakan. (*Bintang Papua*)

26 Februari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan 5

Komisioner KPUD Paniai, Papua, setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berupa pengalihan suara. Kelima komisioner tersebut adalah Ham Nawipa, Penggafer Zonggonau, Fransiska Kadepa, Philipus Tenauye, Frederik Mote. Hal ini dikatakan oleh Valina Singka saat membacakan putusan. (*Cepos*)

3 Maret

Ketua KPUD Mimika Yohanes Kemong melaporkan bupati Mimika ke Polda Papua atas dugaan pemalsuan surat dalam proses pengusulan penetapan calon anggota DPRD Mimika kepada gubernur Papua melalui SK 16a yang disampaikan ke Kesbangpol Provinsi Papua. (*Bintang Papua*)

4 Maret

Sekretaris Komisi I DPR Papua Mathea Mamoyau berharap kisruh pelantikan anggota DPRD terpilih Mimika tidak mengorbankan masyarakat yang tidak bersalah. (*Bintang Papua*)

5 Maret

Bupati Mimika Eltinus Omaleng berencana akan menggugat kembali KPU Mimika jika laporan di Polda Papua tidak terbukti. Di pihak lain, KPUD Mimika menyatakan siap membuktikan laporannya di Kepolisian sebab SK 20 sudah menjadi keputusan tetap dan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. (*Suluh Papua*)

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan agar sebelas kepala daerah yang menggelar Pilkada mengikuti aturan yang ditetapkan KPU Papua. (*Suluh Papua & Cepos*)

Pihak DPR Papua berencana membentuk tiga Pansus pada pertengahan Maret. Ketiga Pansus itu adalah Pansus terkait 14 kursi, illegal Logging, dan mama-mama Papua serta terkait Perdasi Miras. Hal ini disampaikan oleh anggota Baleg DPR Papua Emus

Gwijangge. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan berdasarkan UU No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota diharapkan para bupati beserta DPRD di 11 Kabupaten di Papua diwajibkan mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada 2015 dan semester satu pada 2016. Upaya ini bertujuan menyelesaikan masalah pembiayaan Pilkada serentak sesuai yang diusulkan KPU Papua. (*Bintang Papua*).

6 Maret

Empat anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) MRP masa jabatan 2011-2016 mengikuti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang dipimpin oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. (*Cepos*)

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil semua pihak terlapor termasuk Bupati Mimika Elitinus Omaleng. Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut laporan KPUD Mimika terkait dugaan pemalsuan SK nomor 16a tentang penetapan calon anggota DPRD tahun 2014-2019 yang disinyalir ditetapkan sepihak oleh bupati Mimika. (*Suluh Papua*)

10 Maret

Ketua KPUD Mimika Yohanes Kemong menyatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam SK 16a 2014 tentang Calon Anggota DPRD yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Gubernur Papua. (*Bintang Papua*)

13 Maret

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan Pilkada serentak di 11 Kabupaten di Provinsi Papua yang dilaksanakan pada Desember mendatang. (*Cepos*)

Sebanyak 1648 lembar surat suara Pilkada 2015 ditemukan rusak. Surat suara yang rusak ini ditemukan di 10 kabupaten yang akan mengadakan Pilkada serentak di Kabupaten Merauke, Keerom, Mambramo Raya, Supiori, Waropen, Yalimo, Asmat, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Nabire. (*Cepos*)

30 Maret

Komisi Nasional Hak Asasi manusia RI perwakilan Papua menilai pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakn di 11 kabupaten di Provinsi Papua tahun ini tetap memiliki potensi konflik tinggi. Oleh sebab itu Komnas HAM Papua mengingatkan pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri serta partai politik dan kandidat untuk melakukan langkah antisipasi. (*Cepos*)

1 Juli

Gubernur Lukas Enembe pada Senin (29/6) di Kantor Gubernur Papua menegaskan agar semua pihak memahami rekomendasi yang dikeluarkan oleh MRP terkait dengan Pilkada bahwa kepala daerah harus orang asli Papua. Hal ini berdasarkan amanat UU Otsus no 21. (*Cepos*)

2 Juli

Terkait dengan pernyataan MRP bahwa kepala daerah harus orang asli Papua, ditanggapi oleh Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy. Menurut Adam, urusan Pilkada merupakan kewenangan KPU sedangkan MRP dapat melaksanakan pekerjaan yang lainnya. Lebih lanjut Adam menjelaskan pihaknya hanya mengakomodir gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua sedangkan bupati, wakil bupati atau walikota perlu amandemen UU Otsus dulu. (*Bintang Papua*)

25 Juli

Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke akan dibuka pada Minggu (26/7). Hal ini dikatakan oleh

Ketua KPUD Merauke Antonius Kaize. Dalam pendaftaran tersebut, Polres Merauke menurunkan 150 personil untuk mengamankan proses tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh KPUD Supiori. (*Bintang Papua*)

Terkait dengan permintaan masyarakat Kabupaten Boven Digoel untuk tidak meloloskan bakal calon bupati Boven Digoel mantan narapidana ditanggapi oleh pihak KPU. Dalam keterangan persnya di Kantor KPU Papua, Jumat (24/7), Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan, tidak ada larangan di dalam UU untuk melarang mantan narapidana terlibat dalam Pilkada. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua KPU Boven Digoel Yohanes Okyap. (*Cepos*)

11 Juli

Pemerintah Kabupaten Manokwari pada Kamis (9/7) menyerahkan anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 5 miliar kepada Polres Manokwari yang diterima oleh Wakapolres Manokwari Kopol Fredrik. Bupati Manokwari Bastian Salabai mengatakan anggaran Pilkada tersebut diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (*Cepos*)

4 Agustus

Ketua Tim Peduli Demokrasi Pegunungan Bintang Mevin Mimin pada Senin (3/8) di Abepura dalam keterangannya meminta agar KPUD Pegunungan Bintang tidak meloloskan atau menolak pendaftaran pasangan Cabup dan Wabup yang bukan orang asli setempat dalam Pilkada serentak. (*Bintang Papua*)

6 Agustus

Pemerintahan Kabupaten Supiori memberikan dana keamanan sebesar Rp 1 miliar dalam pengamanan Pilkada Supiori sedangkan untuk KPUD Supiori diberikan dana sebesar Rp 12,4 miliar. Hal ini dikatakan oleh Sekda Supiori Oktovianus Rumere. (*Cepos*)

12 Agustus

Massa pendukung Balon Bupati Nabire Paulus Jingga dan Melki Rumawi merusak kantor KPUD Nabire pada Senin (10/8). Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige mengatakan, massa ini dipimpin langsung oleh Melki Rumawi. Mereka mempertanyakan dukungan KTP yang berkurang, semula berjumlah 29.000 lalu berkurang menjadi 17.000. (*Bintang Papua*)

25 Agustus

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan pasangan bakal calon bupati dalam Pilkada Desember 2015. Penetapan ini dilakukan di Hotel Grand Talent Kotaraja pada Senin (24/8). Hal yang sama juga dilakukan oleh KPUD Waropen, Supiori dan Merauke. (*Bintang Papua & Cepas*)

26 Agustus

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy di Kantor Gubernur Papua pada Selasa (25/8) mengatakan rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati 11 kabupaten untuk Pilkada Papua berjalan dengan lancar dan aman. Rapat pleno ini dilaksanakan pada Senin-Selasa, 24-25 Agustus 2015. (*Bintang Papua & Cepas*)

2 November

Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Selatan di Kota Jayapura memberikan keterangan persnya di Abepura pada Sabtu (31/10) terkait Yusak Yaluwo yang ikut dalam Pilkada Boven Digoel. Mahasiswa meminta KPU Papua agar membatalkan kepesertaan Yusak Yaluwo dalam Pilkada Boven Digoel karena masih berstatus terpidana. Di tempat yang lain Ketua DPRD Boven Digoel Ayub Santi mengingatkan kepada KPU Boven Digoel untuk tidak mengeluarkan pernyataan publik yang menimbulkan konflik di masyarakat. (*Bintang Papua & Cepas*)

9 November

Situasi politik menjelang Pilkada Boven Digoel semakin memanas sehingga Polda Papua menambah kekuatan personelnya dengan menurunkan 25 anggota Brimob ke Boven Digoel pada Sabtu, 7 November. (*Cepos*)

Ketua dan anggota Panwaslu Boven Digoel diberhentikan sementara oleh Bawaslu Papua sejak 2 November 2015. Menurut Ketua non aktif Panwaslu Boven Digoel Felix Yokbari, pemberhentian itu karena tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap pasangan nomor 4. (*Cepos*)

10 November

Pihak Polda Papua akan mengerahkan 2/3 kekuatan untuk mengamankan Pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua. Hal ini dikatakan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw pada Senin (9/11) di Mapolda Papua. (*Bintang Papua & Cepos*)

11 November

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya telah memetakan enam kabupaten masuk dalam kategori rawan selama Pilkada serentak di Papua. Enam kabupaten yang dimaksudkan adalah Kabupaten Boven Digoel, Nabire, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang (rawan kamtibmas) sedangkan Kabupaten Supiori (kondisi alam). (*Bintang Papua*)

16 November

Ketua KPU Waropen Maurid Yermias Mofu pada Sabtu (14/11) mengatakan surat suara untuk Pilkada sudah diterima dan sementara dipersiapkan untuk didistribusikan. Dalam pendistribusian surat suara tersebut KPU Waropen telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,5 miliar dari anggaran Rp 5 miliar. (*Cepos*)

Dalam pengamanan Pilkada serentak, Kasat Brimob Papua Kombes Pol. Mathius Fakhiri, pada Sabtu (14/11) mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 400 anggota Brimob dalam pengamanan Pilkada serentak. (*Bintang Papua*)

21 November

Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengajak agar semua pihak baik itu DPR Papua, Pemprov Papua maupun Pemkab/Pemkot untuk mendukung proses pengangkatan 14 kursi orang asli Papua di DPR Papua. (*Bintang Papua*)

26 November

Tiga komisioner KPU Boven Digoel diberhentikan sementara karena menetapkan kembali pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba untuk ikut dalam Pilkada Boven Digoel. (*Bintang Papua*)

27 November

Yusak Yaluwo salah satu kandidat pada Pilkada Boven Digoel akan menggugat KPU di Pengadilan PTUN Makasar terkait keputusan KPU yang menganulir pencalonan dirinya karena masih berstatus bebas bersyarat pada Senin (23/11). Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Advokasi Yusak Aloysius Renwarin. (*Cepos*)

2 Desember

Kepolisian Resor Merauke menyiapkan 1295 personel yang terdiri dari 343 Polri, 60 Brimob, 283 TNI dan 892 Linmas untuk melakukan pengamanan Pilkada di Merauke. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Merauke AKBP Sri Satyatama pada Selasa (1/12) di Mapolres Merauke. (*Cepos*)

3 Desember

Komisi Pemilihan Umum Papua mengatakan pendistribusian logistik surat suara dan formulir ke Kabupaten Boven Digoel agak terlambat. Pada Rabu (2/12), Komisioner KPU Papua Tarwinto

di Jayapura mengatakan keterlambatan ini disebabkan karena kepastian dan keputusan pencalonan Yusak Yaluwo & Yakob Weremba dalam Pilkada di Boven Digoel. (*Bintang Papua*)

Keputusan KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mencoret pasangan Yusak Yaluwo & Yakob Weremba dalam Pilkada Boven Digoel serta menunjuk KPU Provinsi Papua mengambil alih KPUD Boven Digoel dengan menonaktifkan 3 komisioner, akibatnya massa pendukung kandidat Yusak melakukan demo di Kantor DPRD Boven Digoel. (*Cepos*)

4 Desember

Dalam rangka pengamanan Pilkada Yalimo, Polres Yalimo menggelar apel pasukan pengamanan Pilkada serta pengamanan pendistribusian logistik Pilkada. (*Cepos*)

5 Desember

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu memecat Ketua Panwaslu Kabupaten Boven Digoel Felix Yokbari. Pemecatan ini dilakukan karena Felix tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Papua untuk tidak meloloskan Yusak Yaluwo yang masih berstatus bebas bersyarat. Hal ini dikatakan oleh Komisioner Bawaslu Papua Fegie Watimena. Di kesempatan lain, Tim kampanye Yusak Yaluwo minta kepada KPU Papua agar menunda pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sambil menunggu keputusan dari PTUN Makassar. Hal ini terungkap ketika Ketua Tim Kampanye Yusak Rondong Sabara dan Kuasa Hukum Yusak Aloisius Renwarin melakukan jumpa pers pada Jumat (4/12) di Kopi Tiam, Abepura. (*Cepos*)

Dalam masa tahapan kampanye, para kandidat Pilkada di Kabupaten Keerom pasangan Beni & Nursalim, Jansen Monim & Ignasius Hasim mulai melakukan kampanyenya di sejumlah

wilayah di Kabupaten Keerom. (*Cepos*)

7 Desember

Kepolisian Daerah Papua mendapatkan bantuan satu buah pesawat dari Mabes Polri untuk membantu dalam pemantauan pengamanan Pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua. Bantuan pesawat ini diharapkan bisa digunakan untuk mengirimkan pasukan jika ada wilayah yang membutuhkan pengamanan ekstra. Hal ini dikatakan oleh Wakapolda Papua Brigjen Rudolf Alberth Rodja. (*Cepos & Bintang Papua*)

Di daerah Manokwari, jajaran Polres Manokwari mengantisipasi mobilisasi massa antar kabupaten dalam Pilkada serentak. Menurut Kapolres Manokwari AKBP Jhony Edison Isir, pihak Polres membuat pos di beberapa titik di daerah perbatasan seperti antara Manokwari-Tambrau, Manokwari-Manokwari Selatan. (*Cepos & Bintang Papua*)

Koordinator tujuh kepala suku di Kabupaten Keerom Nerius May meminta agar masyarakat adat di Keerom untuk tetap menyalurkan suaranya dalam Pilkada Keerom. Ketujuh kepala suku yang membuat pernyataan tersebut adalah Kepala Suku Web Bernard Welilif, Kepala Suku Skanto Hicarles Wake, Kepala Suku Manem Longginus Fatagur, Kepala Suku Senggi Dominggus Manggui, Kepala Suku Towe Yakob Mera, Kepala Suku Walsa Nerius May dan Kepala Suku Daigat Ferdinand Tuamis. Pernyataan ini dibuat pada Sabtu (5/12) di Keerom. (*Cepos*)

8 Desember

Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam Pilkada serentak di Papua adalah dana. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy anggaran yang dibutuhkan adalah 340 miliar tetapi masih kurang 54 miliar. Di Kabupaten Yahukimo kekurangan 26 miliar, Pegunungan Bintang 26 miliar dan sisa yang lainnya di beberapa

daerah. Hal ini dikatakan oleh Adam ketika selesai rapat dengan Komisi II DPR RI dan Polda Papua pada Minggu (6/12) di Kantor KPU Provinsi Papua. *(Cepos)*

Sebanyak 40 personel Brimob Kelapa Dua Jakarta dikirim ke Kabupaten Boven Digoel untuk membantu Brimob yang sudah dikirim di sana dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel. Menurut Ketua Tim Asistensi Polda Papua untuk Kabupaten Boven Digoel Kombes Pol. Daniel Priyo Dwiatmoko, 40 anggota Brimob tersebut berasal dari Mabes Polri berjumlah 61 orang, tetapi dari kebijakan Kapolda Papua 40 orang ditempatkan di Kabupaten Boven Digoel sedangkan sisanya berada di Jayapura dan Kabupaten Keerom. *(Cepos)*

9 Desember

Sebanyak 11 kabupaten di Papua melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpinnya. Kesebelas kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Supiori dan Nabire. Menurut Kepala Divisi Teknik Penyelenggara KPU Papua Beatrix Wanane, kesebelas kabupaten tersebut secara umum telah siap menggelar Pilkada. *(Cepos)*

10 Desember

Pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah di Papua dari pantauan media berjalan lancar dan aman seperti di Kabupaten Asmat, Waropen. Sedangkan di Kabupaten Keerom terjadi pemukulan KPPS di salah satu TPS, selain itu ada mobilisasi massa. Sedangkan di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo belum bisa melaksanakan Pilkada. Ketua Dewan Adat Keerom Herman Yoku menemukan foto copy surat undangan fiktif mencapai ribuan dan mobilisasi massa. Menurut Herman, hal ini dilakukan oleh beberapa calon kandidat bupati di Keerom. *(Cepos & Bintang Papua)*

Pihak kepolisian dan Panwaslu Kabupaten Manokwari mengamankan 9 orang petugas KPPS di Polres Manokwari, Rabu (10/12). Kesembilan orang ini diamankan karena petugas KPPS di Masni Barat, Distrik Masni diduga melakukan pencoblosan lebih awal dari waktu yang ditentukan. (*Bintang Papua*)

11 Desember

Berdasarkan pantauan Panwas Keerom terhadap Pilkada Keerom ditemukan beberapa pelanggaran Pilkada. Pelanggaran pertama adalah mobilisasi massa dari luar Keerom sebelum Pilkada, di Kampung Arso ditemukan ada warga yang memilih di dua tempat pada TPS berbeda dan di Kampung Kwimi, Distrik Arso ditemukan penyelenggara membagikan sisa surat suara. (*Bintang Papua*)

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan bahwa pihak kepolisian menahan 16 warga terkait kasus perampasan 51 paket logistik Pilkada di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo. (*Bintang Papua*)

12 Desember

Tim koalisi pasangan kandidat Pilkada Keerom Beny dan Nursalim meminta KPUD Keerom agar melakukan pelaksanaan ulang pemungutan suara di TPS yang dianggap bermasalah. Menurut Ketua Tim Advokasi Beny Aloisius Renwarin, Pilkada di Keerom dianggap gagal, penuh rekayasa dan mencederai demokrasi. Sedangkan di Kabupaten Supiori ditemukan sebanyak 22% warga memilih menjadi Golput/tidak memberikan suaranya. (*Cepos & Bintang Papua*)

Pasangan calon bupati dalam Pilkada Merauke Romanus Mbraka mengakui perolehan suara dari pasangan Fredi Gebze dan menerima kekalahannya. Pada Jumat (11/12), Romanus menyatakan sebagai seorang lelaki sejati kita harus menerima kenyataan kalah. (*Bintang Papua*)

15 Desember

Ketua Bawaslu Papua Pdt. Robert Horik menegaskan bahwa proses Pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua masih ada bermasalah di beberapa TPS. Untuk itu kami mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di dua kabupaten yakni di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo yakni dua TPS dan di Distrik Odate dan di Kampung Sowiwa, Kabupaten Waropen. (*Bintang Papua & Cepos*)

16 Desember

Massa pendukung pasangan Yusuf Wali melakukan aksi demo damai di Kantor KPU Keerom, Selasa (15/12). Massa mempertanyakan banyaknya pelanggaran pada saat Pilkada Keerom. Di tempat terpisah tim kuasa kandidat Beny Sweny ke Kantor Panwas Keerom untuk mempertanyakan sekitar 8000-an daftar pemilih tetap yang tidak memiliki nomor induk kependudukan maupun kartu keluarga. Di Kampung Kwimi, Keerom dilakukan pemungutan suara ulang. Sedangkan suasana di Kabupaten Asmat masih menegangkan karena massa pendukung dari kandidat yang kalah dalam Pilkada Asmat melakukan protes. Menurut seorang tokoh pemuda Asmat Arie Soeprapto, warga takut keluar rumah malam hari, kantor-kantor dan posko-posko diserang dan kantor KPUD Asmat dirusak. (*Bintang Papua & Cepos*)

17 Desember

Komisi Pemilihan Umum Daerah Manokwari, Papua Barat menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara. Komisioner KPUD Manokwari Aplena Rumaikew di Manokwari mengatakan panitia di wilayah distrik (PPD) sudah menyerahkan hasil rekapitulasi. (*Bintang Papua*)

18 Desember

Pleno rekapitulasi suara di Nabire digelar oleh KPU Nabire pada Kamis (17/12) berlangsung dengan suasana menegangkan karena

salah satu pasangan Pilkada menyatakan keberatannya walaupun demikian rekapitulasi tetap berjalan dalam pengawasan pihak kepolisian. (*Cepos*)

Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy di Kantor KPU Papua pada Kamis (17/12) mengatakan, para calon bupati dan wakil bupati yang kalah dalam Pilkada dapat mengajukan gugatannya ke MK. (*Bintang Papua*)

Masyarakat pendukung kandidat Yusuf Wali melakukan aksi pemalangan Kantor Panwas Keerom. Masyarakat menilai bahwa anggota Panwas tidak bekerja baik sesuai tugasnya, khususnya melakukan pengawasan di lapangan. Setelah itu massa melakukan aksi demo dan pemalangan di Kantor KPUD Kabupaten Keerom. Massa meminta agar KPUD Keerom menunda pelaksanaan pleno karena ada permasalahan Panwas Keerom yang belum jelas. Sedangkan perkara pelanggaran Pilkada di Raja Ampat yang dilaporkan oleh Panwas mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Sorong. (*Bintang Papua*)

19 Desember

Berdasarkan hasil pleno KPUD Keerom, Jumat (18/12), pasangan Wetae dan Markum jumlah suaranya unggul dalam Pilkada Keerom. Pasangan ini menang di 7 distrik. Ketua KPUD Keerom Bonefasius Bao mengatakan, KPU Keerom telah melakukan pleno rekapitulasi perhitungan suara untuk Pilkada Keerom. Terkait dengan keberatan atau pelanggaran dalam Pilkada itu merupakan urusan Panwas bukan KPU. Sedangkan di Kabupaten Yahukimo pasangan Abock Busup dan Yulianus Heluka memperoleh suara terbanyak dalam pleno KPUD Yahukimo. (*Bintang Papua*)

21 Desember

Walaupun kalah dalam Pilkada Yahukimo, pasangan David Silak

dan Septinus Pahabol mengucapkan selamat kepada pasangan Abock Busup yang menang dalam Pilkada Yahukimo. David Silak mengatakan dengan hasil yang diumumkan oleh KPUD Yahukimo, kami menerima dengan besar hati hasil tersebut. (*Cepos*)

22 Desember

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat Silvester Siforo & Yulius Patandianan membawa permasalahan Pilkada ke MK. Mereka menilai bahwa Pilkada di Asmat tidak berjalan dalam asas Luber dan Jurdil. (*Cepos*)

10. TAHANAN

10 Juli

Lima tahanan politik yang mendapatkan grasi oleh Presiden Joko Widodo pada (9/5) di Lapas Abepura menagih janji pada Presiden Joko Widodo. Pada saat pemberian grasi presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan hidup bagi Tapol seperti bantuan biaya kesehatan, rumah dan modal usaha. Hal ini disampaikan dalam siaran pers di Abepura pada Kamis, 9 Juli. (*Bintang Papua & Cepos*)

15 Juli

Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Selasa (14/7), mengatakan, langkah yang diambil oleh presiden untuk membebaskan para Tapol dan Napol merupakan suatu langkah baik tetapi tidak menyelesaikan masalah di Papua. Persoalan Papua sebaiknya diselesaikan melalui dialog. (*Cepos & Bintang Papua*)

11 Agustus

Tahanan di Lapas kembali melarikan diri. Dua tahanan di Lapas Serui kabur dari tahanan dalam waktu yang berbeda pada malam hari, Minggu (9/8). Kejadian ini dibenarkan oleh Kalapas Serui I Putu Murdiana pada Senin (10/8). I Putu Murdiana mengakui

bahwa mereka lalai dan kecolongan. Upaya pengejaran masih dilakukan. (*Bintang Papua*)

14 Agustus

Tujuh tahanan kasus makar Sorong dipindahkan dari Lapas Sorong ke Lapas Serui, pada Kamis (13/8). Proses pemindahan ini berjalan dengan lancar dan tertib. Ketujuh warga ini dihukum penjara dengan pidana 3,6 tahun. (*Bintang Papua*)

18 Agustus

Sebanyak 80 Napi Lapas Narkotika Doyo, Kabupaten Jayapura mendapatkan remisi pada peringatan HUT RI ke-70. Sedangkan di Lapas Kelas IIB Serui sebanyak 46 narapidana (napi) mendapatkan remisi, selain itu salah satu tahanan politik Fillep Karma menolak pemberian remisi. (*Bintang Papua & Cepos*)

3 November

Sebanyak 26 tahanan di Lapas Wamena kabur pada Senin (2/11), pukul 11.20 WIT. Kaburnya para tahanan ini merupakan yang kedua kalinya. Walaupun demikian, empat orang tahanan sudah ditangkap tetapi 22 orang masih dalam pengejaran. (*Cepos & Bintang Papua*)

10 November

Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 19 narapidana yang kabur dari Lapas Klas IIB Wamena pada Senin, 2 November. (*Cepos*)

19 November

Salah satu tahanan politik Papua Fillep Karma, Selasa (19/11), dibebaskan dari Lapas Abepura. Fillep Karma dibebaskan berdasarkan juga potongan masa tahanan dari setiap remisi yang diberikan negara. Bebasnya Fillep Karma akan dijemput oleh

massa KNPB yang mengundangnya untuk bersama merayakan HUT KNPB ke-7. (*Cepos*)

BAB 2

SUMBER DAYA ALAM DAN PERSOALAN TANAH ULAYAT

1. SUMBER DAYA ALAM DAN PERSOALAN TANAH ULAYAT

27 Januari

Ketua LMA Port Numbay George Awi mengharapkan agar pemilik tanah ulayat di Kota Jayapura tak lagi menjual tanah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib anak cucu ke depannya. (*Cepos & Suluh Papua*)

29 Januari

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta mengutuk tindakan perusahaan kelapa sawit yang menggunakan

jasa aparat keamanan untuk melindungi diri dari masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Sima, Nabire Papua. Menurut AMP, beroperasinya PT Nabire Baru tanpa ada persetujuan dari mayoritas masyarakat adat suku besar Yerisiam dan beberapa suku lainnya sebagai pemilik hak ulayat. (*Suluh Papua*)

31 Januari

Dewan Adat Papua dan LMA hendaknya tidak terjerumus dalam politik praktis di atas Tanah Papua. Mereka harus mengurus hak-hak masyarakat adat, batas-batas wilayah dan melindungi budaya adat setempat. Hal ini dikatakan oleh Ketua Pemuda Pancasila Kota Jayapura Koundrat Tukayo. (*Suluh Papua*)

2 Februari

Ketua Lembaga Koservasi Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua Yehuda Hamokwarong menegaskan bahwa perusakan hutan mangrove merupakan bentuk kejahatan lingkungan. Menurutnya sesuai dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) posisi jalan tidak seperti yang ada sekarang yang menyebabkan rusaknya hutan. (*Suluh Papua*)

13 Februari

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua John Nahumury mengatakan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan maka setiap perusahaan kelapa sawit di Papua diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip pelestarian dalam kegiatan investasi dengan menerapkan Indonesia Sustainable Palm Oil/ ISPO. (*Cepos*)

16 Februari

Anggota Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan Natan Pahabol mengatakan, pertemuan dengan sejumlah SKPD Pemprov dan Pemkab Keerom untuk membahas rencana PT. Bio Budidaya Nabati untuk melakukan penanaman kelapa sawit di

Kabupaten Keerom dengan luas lahan 15.000 Ha. Namun Pemkab Keerom hanya mengeluarkan ijin 7400 Ha dan ijin tersebut disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Penanaman Modal. (*Bintang Papua*)

17 Februari

Masyarakat Suku Moni yang mendiami wilayah Kabupaten Intan Jaya menolak dengan tegas rencana masuknya sejumlah perusahaan baik yang bergerak di bidang pertambangan dan pariwisata di wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Agustinus Somau. (*Suluh Papua*)

18 Februari

Ketua Komisi II DPR Papua Deerd Tabuni mengatakan, Perdasi dan Perdasus tentang Tanaman Pangan di Provinsi Papua sudah didorong atau dirampungkan oleh DPR Papua dan harus diimplementasikan di lapangan. (*Cepos*)

Komisi II DPR Papua Deerd Tabuni meminta aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah Kabupaten Keerom. Karena banyak kontainer yang mengangkut kayu dari Keerom dan dicurigai tidak memiliki dokumen yang lengkap. (*Suluh Papua*)

20 Februari

Empat kontainer yang memuat 16 ton kubik kayu yang diduga ilegal disita oleh dinas kehutanan (Dishut) Provinsi Papua. Kayu ilegal beserta kontainer dan truk pengangkut kini diamankan di Markas Satuan Polisi Operasi Reaksi Cepat (SPORC) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Papua. (*Bintang Papua*)

24 Februari

Gubernur Papua Lukas Enembe tegas mengatakan bahwa

masyarakat Papua jangan lagi ada yang menjual tanah dan hutan. Karena, akibat seringnya menjual tanah masyarakat Papua sendiri yang dirugikan dan menjadi miskin di atas tanahnya sendiri. (*Suluh Papua*)

2 Maret

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Jan Jap L. Ormuseray mengatakan bahwa Operasi Pengamanan Hutan Terpadu yang dilakukan pihaknya didukung penuh oleh Menteri Kehutanan RI Siti Nurbaya. (*Cepos*)

16 Maret

Fraksi Partai Hanura DPR Papua meminta Pemprov Papua menginstruksikan kepada daerah (kabupaten/kota) untuk mengajak masyarakat dalam melindungi hutan Provinsi Papua yang mulai terancam punah akibat penebangan liar. (*Cepos*)

28 Maret

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pihaknya menyiapkan 15.000 hektare hutan tanaman industri (HTI) untuk dijadikan kebun energi. (*Suluh Papua*)

30 Maret

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperhatikan hak masyarakat adat dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya. (*Cepos*)

1 April

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Ormuseray pada Selasa (31/3) di ruang kerjanya mengatakan, gubernur Papua telah mengajukan agar 13 izin HPH yang beroperasi di Papua dan tidak aktif segera dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Namun hal ini belum dilaksanakan. Menurut Yan, dengan adanya izin yang tidak aktif ini hutan Papua sepertinya digadaikan dan masyarakat serta Pemda Papua tidak menggunkan hutan tersebut. (*Cepos*)

2 April

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Ormuseray pada Rabu (1/4) di ruang kerjanya mengatakan, sebenarnya sudah ada Peraturan Gubernur Papua No 13 tahun 2010 tentang pengelolaan hutan adat, namun hal ini tidak berlaku secara optimal karena pada saat itu ada penggabungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sehingga ada pembenahan. Walaupun demikian, pihak Pemda Papua telah menyampaikan ke kementerian agar segera memberikan akses legal kepada masyarakat dengan peraturan menteri (Permen) untuk mengelola hutan ulayatnya. (*Bintang Papua*)

9 April

Di dalam rapat koordinasi pembangunan kehutanan Provinsi Papua pada Rabu (8/4) Gubernur Lukas Enembe mengatakan, rumusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah untuk memberikan ruang kelola dan usaha kayu bagi masyarakat adat pemilik ulayat sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Ormuseray mengatakan, menyelamatkan hutan adalah tugas semua orang di Papua. (*Cepos*)

14 April

Masyarakat di Distrik Muting dan Eligobel, Kabupaten Merauke merasa terintimidasi dengan kehadiran aparat keamanan yang berlebihan di beberapa perusahaan kelapa sawit di Merauke. Menurut seorang tokoh masyarakat Paulus Ndiken, TNI yang berada di perusahaan kelapa sawit itu bukan berasal dari Koramil melainkan kebanyakan dari luar. (*Bintang Papua*)

Masyarakat Adat Senggi pada Senin (13/4) mengadakan aksi demonstrasi damai di Kantor DPR Papua. Masyarakat mendesak agar HPH (Hak Pengelola Hutan) dan izin perusahaan ilegal di Kabupaten Keerom segera dicabut. Masyarakat Senggi merasa dirugikan dengan pemberlakuan HPH dan meminta agar pengelolaan hutan dikembalikan kepada pemilik hak ulayat setempat. (*Bintang Papua*)

17 April

Masyarakat adat di Muting, Kabupaten Merauke melakukan penolakan terhadap investasi kelapa sawit di daerahnya. Masyarakat menolak karena menilai bahwa perusahaan kelapa sawit merusak alam dan membuat warga sulit mencari sagu sebagai makanan pokoknya. Sekretaris LMA Distrik Muting Faustinus Ndi ken mengatakan sejak 2010 ada tujuh perusahaan sawit yang masuk ke wilayah adat Malind Mbyan Anim dan memakai kira-kira 280.000 hektare. (*Kompas*)

20 April

Masalah yang timbul akibat pelanggaran perjanjian antara investor kelapa sawit dan masyarakat adat di Kabupaten Merauke ditanggapi oleh Ketua Komisi B DPRD Merauke Fransiskus Xaverius Sirfe fa. Menurut Sirfe fa, DPRD Merauke akan memeriksa pelanggaran tersebut. Kalau terjadi pelanggaran izin perusahaan tersebut akan dicabut. (*Kompas*)

27 April

Salah seorang tokoh masyarakat Manokwari Daud Indow pada Minggu (26/4) mengatakan, pihak Pemda dan DPRD Manokwari harus mempunyai komitmen untuk membebaskan hak ulayat masyarakat yakni kawasan hutan yang berada di Wosi sampai dengan Pami, Distrik Amban, Kabupaten Manokwari. Hal ini dikatakan karena dampak dari pegusuran hutan demi kepentingan jalan berdampak pada banjir dan longsor. (*Bintang Papua*)

7 Mei

Pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Papua telah menyerahkan berkas kasus empat truk kontainer kayu ilegal yang disita oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan pihak keamanan ke pihak Jaksa Penuntut Umum pada Rabu (6/5). Keempat truk yang berisi kayu ilegal ini ditangkap pada bulan 19 Februari 2015 di Jalan Lintas Keerom Jayapura. (*Cepos & Bintang Papua*)

Maraknya penambangan emas ilegal di Degeuwo ditanggapi oleh anggota Komisi IV DPR Papua Thomas Sondegau. Menurut Thomas, Pemkab Paniai sebaiknya melakukan penutupan pertambangan tersebut karena banyak praktik prostitusi gelap dan miras. (*Cepos*)

19 Juni

Masyarakat Adat Ogeiye bersama Lembaga Masyarakat Adat Ogeiye “Diyoweitopoke” pada Kamis (18/6) di halaman Kantor Bupati Deiyai melakukan aksi demonstrasi menolak kehadiran PT. Power Papua Indonesia (PPI), dan hanya menerima kehadiran PT. Kopaikabu Papua Indonesia untuk mengelola PLTA Kali Yawei di Kopaikabu Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai. (*Bintang Papua*)

1 Juli

Masyarakat yang mengakui pemilik hak ulayat Pasar Prahara Sentani, Kabupaten Jayapura melakukan pemalangan pada Selasa (30/6). Selain memalang pasar, massa juga ke Kantor DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan aspirasinya. Massa meminta agar Pemkab dan DPRD Kabupaten Jayapura meninjau kembali dokumen penjualan tanah tersebut. (*Cepos*)

3 Juli

Pemerintah Provinsi Papua Barat menghibahkan lahan seluas 20,5 hektare untuk pembangunan markas Polda Papua Barat di Manokwari. Sebagai ucapan terima kasih, pihak Polda Papua Barat

memberikan penghargaan kepada Pemprov Papua Barat, dalam hal ini Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi. (*Bintang Papua & Cepos*)

14 Juli

Kepala Dinas Hubingsaker dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Kabupaten Keerom Erwin Patiung di ruang kerjanya pada Senin (13/7) mengatakan, banyak perusahaan di Keerom yang tidak memiliki peraturan perusahaan. Seharusnya setiap perusahaan harus memiliki peraturan perusahaan yang telah ditetapkan dalam UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (*Bintang Papua*)

22 Oktober

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Keerom pada Rabu (21/10) mengungkapkan bahwa dari hasil diskusi yang dilakukan dengan masyarakat adat Kabupaten Keerom ditemukan masih banyak persolan hak ulayat yang belum sepenuhnya dituntaskan. Pihak Komnas HAM mencatat bahwa sejarah beberapa tahun lalu ketika perusahaan kelapa sawit mulai beroperasi di Keerom pada saat itulah banyak lahan adat milik masyarakat yang beralih fungsi dan berpindah tangan. Dari 2011-2014 pihaknya mendapat banyak pengaduan tentang hak-hak yang diduga dikuasai pihak perusahaan secara sepihak karena kala itu perusahaan didukung TNI dan pengambilalihan lahan dilakukan secara paksa. (*Cepos*)

29 Oktober

Ketua DPR Papua Yunus Wonda di Jayapura pada Rabu (28/10), secara tegas meminta kepada gubernur Papua agar mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang selama ini telah beroperasi di Tanah Papua. Lebih jauh dikatakan bahwa kelapa sawit di Papua tidak mengembangkan perekonomian tetapi justru membuat daerah semakin rusak. Kelapa sawit tidak cocok di

Papua, contohnya saja di daerah Arso hingga kini tidak ada perkembangan. Oleh karena itu izinnya dicabut saja. (*Bintang Papua*)

2 November

Sejumlah masyarakat adat yang lokasinya dicaplok oleh perusahaan kelapa sawit PT Nabire Baru meminta agar perusahaan tersebut ditutup. Masyarakat adat telah mengajukan keberatan dengan melakukan gugatan hukum ke PTUN untuk menggugat SK Gubernur no 142 tahun 2008 yang memberikan izin kepada PT Nabire Baru. Hal ini disampaikan oleh juru bicara suku Yerisiam Gua Gunawan Ingeruhi saat berkunjung ke Kantor surat kabar Cenderawasih Pos. (*Cepos*)

6 November

Warga pemilik hak ulayat SD Inpres Abeale, Sentani melakukan pemalangan di halaman SD pada Kamis (5/11). Pemalangan ini dilakukan karena pemerintah yang membayar lokasi tanah SD sebesar Rp 1 miliar kepada pihak yang tidak berhak. (*Bintang Papua & Cepos*)

11 November

Warga pemilik ulayat di wilayah Sentra Perumahan Dua Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke menolak lahannya seluas 400 hektare dikelola oleh pemerintah menjadi lahan persawahan. (*Bintang Papua*)

13 November

Akademisi dan Dosen Fisip Antropologi Universitas Cenderawasih Leni Manalik di Jayapura pada Kamis (12/11) mengatakan masyarakat adat harus dilibatkan dalam usaha penyelamatan hutan di Papua. Masyarakat sangat dinamis ketika dilibatkan oleh pemerintah dalam usaha penyelamatan hutan. (*Bintang Papua*)

14 November

Pihak Komnas HAM RI meminta kepada PT FI untuk lebih terbuka dalam pemenuhan hak-hak masyarakat Papua. Pada Jumat (13/11) di Kantor Komnas HAM Jakarta, Ketua Komnas HAM RI Nurcholis mengatakan, pemenuhan hak-hak asasi masyarakat Papua sudah mutlak dan harus dipenuhi jikalau ingin mendapatkan restu perpanjangan kontrak. (*Bintang Papua*)

Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobay pada Jumat (13/11), dalam siaran persnya meminta agar semua aparat TNI dan Polri yang berada di wilayah investasi Nabire dan Paniai ditarik. Selain itu ia meminta agar Pemprov Papua mencabut semua IUP perusahaan kelapa sawit dan pertambangan di Papua. (*Bintang Papua*)

19 November

Ketua Pansus penyelamatan hutan Papua Ruben Magai pada Rabu (18/11) mengatakan, hutan Papua terus menjadi target para pengusaha. Hutan Papua ibarat perempuan cantik yang diperebutkan oleh semua orang dari luar. (*Cepos*)

20 November

Sejumlah warga di sekitar Bandara Sentani (Kampung Yahim, Yobe, Ifar Besar dan Hobong) melakukan aksi demonstrasi damai menuntut ganti rugi tanah yang digunakan untuk perluasan pembangunan Bandara Sentani. (*Cepos*)

21 November

Anggota DPR RI Soleman Hamzah di Hotel Matos, Jayapura, mengatakan kehadiran perusahaan kelapa sawit di Papua berdampak menyulitkan warga dan pemilik ulayat, karena hutan adalah tempat penghidupan masyarakat. Lebih lanjut Soleman mengatakan agar dapat dikaji kembali berapa luasan hutan yang sudah terpakai dan kontribusi apa yang sudah diberikan kepada masyarakat pemilik ulayat. (*Cepos*)

1 Desember

Ketua Working Group ICCAs (*Indigenous Peoples and Community Conserved Areas*) Kasmita Widodo mengatakan bahwa pada saat ini banyak masyarakat adat yang menjadi korban sebuah regulasi dari pemerintah yang jarang mengakui bahwa tanah yang ada merupakan milik masyarakat. Berdasarkan peraturan yang ada UU No. 5 tahun 1990 dan putusan MK No. 35 dikatakan bahwa hutan adat diakui bukan milik negara sehingga masyarakat berhak penuh mengelola dan mengontrol kepemilikannya. (*Cepos*)

2 Desember

Dalam pertemuan antara Komisi I DPR Papua dengan masyarakat Keerom di Balai Adat Kabupaten Keerom pada Senin (30/11), terungkap bahwa Pemkab Keerom jarang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah adat oleh investor. Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi I DPR Papua Mathea Mamoyou, H. Syamsunar Rashid dan Ruben Magai. Mantan Ketua Dewan Adat Keerom Hubert Kwambre mengatakan, program transmigrasi selama ini belum menguntungkan masyarakat adat meskipun program tersebut telah membuka perekonomian kawasan Keerom. Selain itu masyarakat adat kehilangan tanah adatnya. (*Bintang Papua*)

4 Desember

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano menyerahkan ratusan sertifikat kepada warga pemilik asset tanah di Koya Koso, Koya Tengah, Holtekam dan Asano dalam kegiatan program nasional agraria tahap kedua. Penyerahan sertifikat ini secara simbolis pada Kamis (3/12) di Aula Sian Sior. (*Bintang Papua*)

Di Kabupaten Biak Numfor, Kantor Pertanahan Kabupaten Biak membagikan secara gratis sebanyak 1022 sertifikat tanah kepada masyarakat di dua distrik yakni Distrik Supiori Utara dan Supiori Timur. Pembagian sertifikat ini dibagikan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Bika Numfor Jhon Wiclif Aufa. (*Cepos*)

8 Desember

Di dalam diskusi yang digelar oleh Jaringan Perempuan Papua “TIKI” pada Senin (7/12) di Aula Susteran Maranatha Waena, banyak peserta diskusi mempertanyakan kontribusi perusahaan kelapa sawit di Papua. Kegiatan ini menghadirkan Dinas Kehutanan Papua, MRP, DPR Papua, perusahaan kelapa sawit dan LSM. (*Cepos*)

23 Desember

Pemilik ulayat tanah SMAN 3 Sentani mengharapkan ganti rugi di akhir bulan Desember 2015. Pihak sekolah sempat membayar ganti rugi tetapi tidak kepada pemilik tanahnya. Kepala Suku Ongge Bartolomeus Ongge mengatakan kalau tidak dibayar maka pihaknya akan melakukan pemalangan sekolah tersebut. (*Cepos*)

BAB3

FREEPORT DAN PERJUANGAN MAMA-MAMA PAPUA

1. FREEPORT DAN KONTRAK KARYA

2 Januari

Wakil Ketua DPR Papua Fernando Yansen Tinal mendukung penuh perjuangan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk pembangunan pabrik smelter tembaga di Papua. (*Bintang Papua, Cepos & Suluh Papua*)

7 Januari

Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto meminta perpanjangan kontrak hingga 20 tahun ke depan. Dengan

demikian maka keberadaan Freeport akan mencapai 2041. Perpanjangan kontrak akan mengikuti pemerintah dan amandemen kontrak. Hal ini akan dilakukan paling lambat 24 Januari 2015. (*Bintang Papua*)

8 Januari

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Maroef Sjamsoeddin menjadi presiden/direktur PTFI setelah menyelesaikan karir panjang di angkatan bersenjata Republik Indonesia. Salah satu pertimbangan PT FI adalah karena kemampuannya di bidang bisnis secara akademis. (*Cepos*)

9 Januari

Ditunjuknya Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Maroef Sjamsoeddin menjadi presiden direktur PT Freeport Indonesia menggantikan Rozik B Soetjipto mendapat reaksi keras dari beberapa pihak. Bahkan anggota Komisi I DPR Papua Emus Gwijangge dengan tegas menolak pengangkatan tersebut. (*Cepos*)

16 Januari

Ketua Pokja Keagamaan MRP Pdt. Samuel K. Waromi menegaskan, pihaknya setuju apabila mantan Wakil Kepala BNI Maroef Sjamsudin menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang penting memiliki jiwa kebangsaan dan berhati Papua. (*Bintang Papua*)

21 Januari

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku kecewa terhadap PT Freeport Indonesia yang tidak menunjukkan kesungguhannya membangun pabrik smelter. Padahal perusahaan tersebut punya izin ekspor produksinya selama 6 bulan saja. (*Bintang Papua*)

22 Januari

Adanya ancaman pemerintah pusat untuk menghentikan

ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia mendapat dukungan dari Komisi IV DPR Papua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR Papua Boy Markus Dawir. (*Bintang Papua*)

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mewajibkan PT Freeport membangun pabrik pemurnian konsentrat tembaga (smelter) di Timika, Papua. Pembangunan smelter tertuang dalam risalah yang juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Bangun Manurung. (*Bintang Papua*)

Ketua Komisi IV DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan, pihak DPR Papua mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk membekukan izin PT Freeport. Hal ini disebabkan oleh ketidaksungguhan PT Freeport membangun pabrik smelter di Papua. (*Bintang Papua*)

23 Januari

Pihak PT Freeport Indonesia menggelontorkan investasi 15 miliar USD atau senilai Rp 189 triliun untuk terus beroperasi di Papua. Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin mengatakan, nilai investasi tersebut untuk mengeruk emas bawa tanah dalam jangka waktu panjang. (*Suluh Papua & Cepos*)

24 Januari

Gubernur Papua Lukas Enembe menolak rencana PT FI untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua. Menurut Lukas, pembangunansmeltermerupakanamanatUUMineraldanBatuBara. Berdasarkan UU itu, perusahaan eksplorasi diwajibkan membangun smelter sebagai bagian dari kebijakan pengembangan industri hilir. Namun rencana Freeport membangun smelter di Gresik dinilai merugikan. Sebab tidak ada nilai tambah bagi masyarakat Papua. (*Cepos & Bintang Papua*)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDA) R Sukhyar mengatakan meskipun ada kemungkinan diperpanjang kontrak, PT Freeport tetap harus menunjukkan perkembangan dari nota kesepakatan MoU pertama tetap valid dan harus diikuti seperti smelter dan sebagainya. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

26 Januari

Tokoh masyarakat Papua Thaha Allhamid mengajak seluruh rakyat Papua untuk mendukung gagasan gubernur agar Freeport segera menghentikan pembangun smelter di Gresik, tapi dikembalikan dan dibangun di Papua. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kontrak PT Freeport Indonesia habis tahun 2021. Ada beberapa item dalam amandemen yang disepakati. Kontrak baru belum diputuskan butuh tambahan waktu untuk memperpanjang MoU. Ada dua dari enam poin yang masih menggantung yakni soal jumlah kontribusi PT Freeport dan soal smelter atau pabrik pemurnian. (*Cepos*)

27 Januari

Sikap protes Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak pembangunan smelter di luar Papua mendapat dukungan dari Wakil Ketua I MRP Pdt. Hofni Simbiak. Ia mengatakan sebelumnya pihak MRP meminta Freeport untuk ditutup. (*Bintang Papua*)

Perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri ESDM untuk 6 bulan ke depan mendapat reaksi keras dari Ketua Komisi IV DPR Papua Boy Markus Dawir. Menurut Boy, menteri menetapkan batas waktu izin hingga tanggal 25 Januari 2015. Namun hal ini baru dilakukan oleh pemerintah pusat. (*Bintang Papua*)

Menteri ESDM Sudirman Said ketika mengklarifikasi ke DPR terkait kontrak Freeport mengatakan, pemerintah tidak memperpanjang

kontrak dan belum memutuskan apapun terkait kontrak Freeport.
(*Suluh Papua*)

28 Januari

Pemerintah Papua bersikukuh meminta agar PT Freeport Indonesia tetap membangun smelter di Papua. Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Bangun Manurung, hal itu mengikuti keputusan pada pertemuan di Bali.
(*Cepos & Bintang Papua*)

Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas ESDM Bangun Manurung menyesalkan sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM karena tidak dilibatkan dalam perpanjangan kontrak enam bulan izin ekspor yang dilakukan antara pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dengan pihak PT Freeport. (*Suluh Papua*)

Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah tidak memberi izin ekspor konsentrat pada PT Freeport. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis. Menurut Fary, pemberian izin menabrak aturan yang berlaku. (*Bintang Papua*)

29 Januari

Komisi VII DPR RI melarang PT Freeport mengeksport konsentrat sebelum perusahaan tersebut membereskan pembangunan pabrik peleburan logam (smelter). Hal ini ditegaskan oleh anggota DPR RI Hadi Mulyadi. (*Suluh Papua*)

3 Februari

Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Papua menegaskan menolak pembangunan smelter di luar Papua oleh PT Freeport. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPD KNPI Papua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lukman N Reliubun.
(*Suluh Papua & Bintang Papua*)

4 Februari

Anggota Komisi I DPR Papua Ruben Magai mengatakan PT FI diduga melanggar pasal 74 UU No 40 tahun 2007 tentang kewajiban perusahaan membayar masyarakat yang ada di sekitar daerah tambang. Hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2007 hingga hari ini. (*Suluh Papua*)

7 Februari

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan segera melihat rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Pihaknya akan mengajak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta gubernur dan bupati setempat untuk mengecek langsung lokasi pembangunan smelter. (*Suluh Papua*)

9 Februari

Anggota DPD RI Dapil Papua Pdt. Charles Simare-mare menegaskan dirinya terus berjuang untuk menuntut pemerintah pusat membangun smelter di Timika, Papua. (*Cepos*)

10 Februari

Bupati Timika Eltinus Omaleg mengatakan, lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) PT FI cukup tersedia. Tidak ada masalah terkait lokasi pembangunannya. (*Suluh Papua*)

14 Februari

Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Yogyakarta menggelar mimbar bebas untuk menuntut PT Freeport Indonesia dan perusahaan lainnya ditutup. (*Suluh Papua*)

16 Februari

Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan selama dua hari dan melakukan rapat bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan para pejabat lainnya serta PT Freeport Indonesia. Akhirnya disepakati bahwa pembangunan pemurnian hasil tambang atau smelter dipastikan dibangun di Timika, Papua. (*Cepos, Bintang Papua & Suluh Papua*)

17 Februari

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan smelter di Papua dan tidak akan selesai pada tahun 2017 sebab pembangunan smelter memakan waktu paling tidak 52 bulan. (*Suluh Papua*)

Anggota Komisi I DPR Papua Mathea Mamoyau meminta pemerintah melihat berbagai aspek dan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan smelter di Timika, Mimika, Papua. Perlu diperhatikan hak-hak masyarakat dan berbagai permasalahan yang akan terjadi. (*Suluh Papua*)

18 Februari

Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan menindaklanjuti rencana pembangunan smelter di Timika, pihaknya telah membentuk tim untuk mengurus tahapan yang berhubungan dengan pembangunan tersebut. Tim tersebut berasal dari provinsi dan kabupaten dan penasehat dari PT FI. (*Cepos*)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika telah menyediakan lahan seluas 10.000 hektare untuk membangun smelter di Papua. (*Suluh Papua*)

20 Februari

Perusahaan Freeport Indonesia akan memperoleh kepastian perpanjangan operasi dari pemerintah sebelum 25 Juli 2015. Hal ini dikatakan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. (*Suluh Papua*)

2 Maret

Pembangunan smelter di Timika yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe, menurut Bupati Puncak Willem Wandik, perlu diberi pemahaman yang baik. Karena pembangunan smelter akan memberikan dampak positif bagi daerah diantaranya bisa meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). (*Cepos*)

4 Maret

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung mengatakan bahwa persiapan untuk pembangunan smelter sudah dilakukan di tingkat lokal. Persiapan seperti lokasi pembangunan smelter di Timika. Penetapan lokasi smelter tersebut berdasarkan kajian dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua. (*Cepos*)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar mengatakan *Non Ferrous China Company (NFC)* adalah investor yang digandeng Pemkab Mimika, Papua untuk membangun smelter. (*Bintang Papua*)

6 Maret

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Juru Bicaranya Lamadi De Lamato mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Kelemen Tinal, Ketua Tim Pembangunan Smelter Bangun Manurung bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Dalam pertemuan tersebut gubernur menyampaikan bahwa pembangunan smelter di Timika telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (*Cepos & Suluh Papua*)

Pihak MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua memandang perlu pembangunan pabrik pemurnian hasil tambang atau smelter PT FI ada di Papua dan ini wajib hukumnya. Hal ini dikatakan oleh

Ketua MRP Timotius Murib. (*Bintang Papua*)

9 Maret

Pemerintah Provinsi Papua berencana akan menggugat PT FI sebab PT FI tidak membayar retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sesuai Perda yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung. (*Bintang Papua*)

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung menegaskan, percepatan pembangunan smelter di Pomako, Kabupaten Mimika tergantung dua tahapan, yakni pemilihan investor dan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemprov Papua dan PT Freeport yang menyatakan kesediaannya untuk pengolahan smelter milik Pemprov Papua. (*Bintang Papua*)

17 Maret

Puluhan Karyawan PT FI yang mengatasnamakan tujuh suku di Timika yang tergabung dalam karyawan Grassberg Operation, Maintenance, Underground dan Mill menggelar aksi pemalangan di pertigaan ridge camp mile 72. Aksi tersebut terkait dengan putusan yang merugikan karyawan. (*Suluh Papua & Cepos*)

20 Maret

Areal tambang PT FI di Mile 72 Tembagapura Papua diblokade oleh karyawan yang mengatasnamakan tujuh suku pemegang hak ulayat tambang. Perwakilan karyawan menggelar aksi blokade Arnold Beanal mengatakan, pihaknya tidak bersedia berunding dengan perwakilan tapi harus dengan manajemen perusahaan. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

19 Mei

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport dibubarkan oleh pihak kepolisian pada Senin (18/5). Dalam

pembubaran tersebut belasan karyawan ditahan dan diamankan karena dianggap sebagai provokator. Massa melakukan pemalangan jalan dan menuntut agar pihak Freeport menyelesaikan masalah mogok kerja yang terjadi pada tahun lalu. (*Kompas, Cepas, Bintang Papua dan Suluh Papua*)

2 Juli

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung pada Senin (29/6) di ruang kerjanya menegaskan Pemprov Papua berharap agar dilibatkan dalam pembicaraan atau pembahasan kontrak PT FI. Hal ini dilakukan karena selama ini Pemprov Papua tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kontrak tersebut. (*Cepas*)

3 Juli

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan negosiasi untuk menentukan kelanjutan operasi PT FI mengalami kemajuan pada enam bulan terakhir. Ada 15 aspek dalam negosiasi kontrak tersebut. Hal ini dikatakan Sudirman Said dalam konferensi pers pada Kamis (2/7) di Jakarta. (*Bintang Papua & Cepas*)

20 Agustus

Sebanyak 101 anggota Brimob Aceh dikirim ke Papua untuk melakukan pengamanan di daerah PT Freeport. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Pol. M. Husein Hamidi pada Rabu (19/8) di Banda Aceh mengatakan, personel Brimob yang dikirim tersebut dibawa kendali operasi Polda Papua. (*Bintang Papua*)

2 Oktober

Bupati Mimika Eltinus Omaleng, di Kantor BPN Papua, Senin (28/9), menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan permohonan kepada Kantor BPN Papua untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, termasuk tanah yang selama ini dikuasai PTFI di Distrik Tembagapura, serta lahan di Bandara Moses Kilangin serta perusahaan-perusahaan lain

yang beroperasi di wilayah Mimika. Hal ini dikarenakan tanah seluas 2 juta hektare yang berada di lokasi PT FI ternyata hingga kini belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Pihaknya juga telah mengirim dokumen tuntutan ganti rugi penguasaan tanah di lokasi Freeport kepada kementerian terkait di Jakarta. (*Bintang Papua*)

10 Oktober

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Carolus Bolly di Jayapura, Jumat (9/10), menyampaikan agar pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk membeli saham PT Freeport Indonesia supaya mempunyai andil dalam mengelola perusahaan tambang dan tembaga tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa semua orang Papua berpikir dan berperasaan yang sama mengingat Pemerintah Provinsi Papua diberi kesempatan yang lebih luas dalam penyertaan saham sehingga punya andil dalam perhitungan royalti maupun penentuan kebijakan strategis Freeport. (*Bintang Papua*)

17 November

Gubernur Lukas Enembe pada Senin di Jayapura mengatakan, pihaknya tidak pernah dilibatkan di dalam perpanjangan kontrak PT FI. Menurut Lukas, harus dan perlu melibatkan Pemprov Papua dalam perpanjangan kontrak tersebut. (*Bintang Papua*).

20 November

Salah satu anggota DPR Papua Ruben Magai mengatakan setuju dengan wacana penghentian kontrak PT FI pada tahun 2021. Menurut Ruben, kehadiran PT FI tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan orang Papua, justru dengan kehadiran PT FI orang Papua selalu dicap sebagai separatis. Hal senada dikatakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Luhut Panjaitan. Menurut Luhut, PT FI tidak layak mendapatkan perpanjangan kontrak karya kalau tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. (*Bintang Papua*)

1 Desember

Massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Papua, Senin (30/11), melakukan aksi damai di Kantor DPR Papua. Massa mempertanyakan masalah kontrak PT Freeport yang dianggap tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Papua. Koordinator aksi Elias Koso meminta agar DPR Papua meneruskan aspirasi ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (*Cepos*)

2 Desember

Pemerintah Provinsi Papua mendukung perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia. Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang dihadiri oleh Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Maroef mengatakan, kehadiran PT FI sejatinya memberikan kontribusi pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua. Selain itu terdaftar 500 pengusaha lokal yang menjadi supplier tenaga kerja bagi PT FI. Perpanjangan kontrak ini karena PT FI akan mengakhiri kontraknya pada tahun 2021. Sedangkan Gubernur Lukas Enembe mengatakan, kehadirannya di dalam jumpa pers tersebut adalah untuk membuka komunikasi dengan PT FI. Menurut Lukas, cepat atau lambat pemerintah pusat bakal memperpanjang kontrak PT FI tersebut. Di tempat yang lain anggota DPR Papua Deki Nawipa mengatakan kontrak PT FI harus melibatkan juga masyarakat adat atau pemilik hak ulayat. (*Cepos*)

Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Selasa (1/12), menegaskan bahwa tidak akan berpolemik dengan jajaran menteri kabinet kerja terkait dengan keputusan perpanjangan kontrak PT FI. Sampai saat ini pemerintah belum memberikan kepastian perpanjangan kontrak bagi PT FI. Perpanjangan kontrak PT FI harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. (*Bintang Papua*)

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa (1/12) menyebutkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam skandal perpanjangan kontrak PT FI menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Kalla, perpanjangan PT FI tidak pernah

diatur oleh Ketua DPR RI selaku badan legislatif. (*Bintang Papua*)

4 Desember

Menanggapi rencana perpanjangan kontrak PT FI, tokoh intelektual Pegunungan Tengah Zakeus Wakerwa mengatakan dan mengharapkan kontrak PT FI benar-benar ada keberpihakan kepada orang Papua. Sebab pengalaman masa lalu kontrak PT FI hanya menguntungkan orang-orang asing seperti Amerika dan Jakarta saja. (*Bintang Papua*)

5 Desember

Pemerintah Provinsi Papua mempertegas minatnya untuk ikut memiliki saham PT FI. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2014 yang mengatakan Pemprov juga mempunyai hak untuk saham PT FI. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhamad Musa'ad di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Jumat (4/12). Menurut Musa'ad, sampai saat ini besaran porsi saham yang diinginkan oleh Pemprov Papua belum diketahui karena pemerintah pusat juga belum menentukan mekanisme divestasi saham PT FI. (*Bintang Papua*)

7 Desember

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diharapkan tidak bertele-tele dalam pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam dugaan kasus pencatutan nama dan penyalahgunaan wewenang terkait renegotiasi perpanjangan kontrak PT FI. Kasus ini dilaporkan oleh Menteri ESDM. Hal ini dikatakan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio pada Minggu (6/12). (*Bintang Papua*)

8 Desember

Direktur Indonesia Resources Studies Marwan Batubara tidak yakin pemerintah berani menghentikan kontrak karya PT FI. Buktinya, Jokowi-Kalla telah menandatangani MoU jelang

renegosiasi dengan PT FI. Hal ini diungkapkan oleh Marwan pada Sabtu (5/12) di Cikini, Jakarta. (*Bintang Papua*)

10 Desember

Terkait dengan rencana renegosiasi perpanjangan kontrak PT FI, anggota DPR Papua Laurens Kadepa mengingatkan kepada semua pihak agar pemilik hak ulayat menjadi korban dari kepentingan PT FI. Hal ini dikatakan oleh Laurens untuk menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe yang mendukung perpanjangan kontrak PT FI. (*Bintang Papua*)

11 Desember

Perbincangan terkait kontrak PT FI masih terus dibicarakan. Anggota Komisi I DPR Papua Syamsunar Rasyid, Kamis (10/12), mengatakan, kalau mengacu pada UU Otsus no 21 tahun 2001 berarti hak itu adalah hak masyarakat dalam hal ini Pemprov Papua. Kewenangan untuk mengurus kontrak PT FI hendaknya diarahkan kepada Pemprov Papua sebagaimana yang diatur dalam UU Otsus tersebut. (*Bintang Papua*)

15 Desember

Saham PT FI terus dipersoalkan. Anggota DPR Papua Yan Mandenas mengatakan sebaiknya para petinggi pusat untuk tidak lagi meminta saham PT FI. Menurut Yan, yang paling berhak untuk meminta saham PT FI adalah masyarakat Papua. (*Bintang Papua*)

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai kedudukan PT FI masih menguntungkan. Salah satunya adalah PT FI mampu menyediakan puluhan ribu tenaga kerja di Papua. Hal ini dikatakan Luhut pada Senin (14/2) di Gedung DPR RI, Jakarta. (*Bintang Papua*)

18 Desember

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan Rakyat

Papua (AMPERA) melakukan aksi demo di Kantor DPR Papua pada Kamis (17/12) terkait PT FI. Massa menilai kehadiran PT FI di Papua telah memicu pelanggaran HAM di Kabupaten Mimika. Koordinator demo Stenly Salamahu dalam orasinya mengatakan mahasiswa menolak perpanjangan kontrak PT FI, yang berakhir pada tahun 2021. (*Cepos & Bintang Papua*)

28 Desember

Sejumlah tokoh masyarakat adat dan pemilik ulayat Suku Amungme dan Kamoro menyatakan sikap untuk memperjuangkan kelanjutan operasi PT FI setelah tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin di Rimba Papua Hotel, Sabtu (26/12). Kepala suku umum Lemasa Yunus Omabak mendukung penuh PT FI terus beroperasi di wilayahnya. Menurut Yunus, PT FI harus terus beroperasi karena banyak hal yang mau diperbaiki untuk masyarakat adat. Banyak kerusakan dan harus diperbaiki kembali. (*Cepos*)

30 Desember

Pemerintah Pusat telah menentukan lokasi pembangunan smelter (pabrik peleburan biji besi) di Bintuni, Papua Barat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada Minggu (27/12) di kediamannya di Angkasa, Jayapura. (*Bintang Papua*)

2. PERJUANGAN PASAR MAMA

14 Januari

Komisi II DPR Papua mendukung aspirasi mama-mama Papua yang berharap adanya bantuan truk dari Pemprov Papua. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Papua Pendis Enumbi. (*Cepos*)

2 Maret

Solidaritas Pedagang Asli Papua akan melakukan demo di Kantor

Gubernur Provinsi Papua. Mereka mendesak gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH untuk membangun pasar permanen seperti yang dijanjikan gubernur sebelumnya. (*Suluh Papua*)

4 Maret

Massa pedagang asli Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) melakukan demo guna meminta pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua, segera membuat perdasus di seluruh Tanah Papua agar pedagang nusantara tidak menjual hasil komoditas khas asli Papua seperti pinang, sirih, kapur, sagu dan sayur-sayuran. (*Cepos & Bintang Papua*)

6 Maret

Koordinator Solpap Robert Jitmau mengatakan, Solpap sebagai wadah penghimpun Pedagang Asli Papua menilai tidak ada itikad baik dari eksekutif dan legislatif untuk segera membangun pasar permanen bagi mama-mama Pedagang Asli Papua. Panitia khusus yang dibentuk DPR Papua pun dinilai tidak serius, bahkan tidak ada hasilnya. (*Cepos*)

7 April

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Papua Yan Ukago mengatakan, pembuatan desain pasar mama-mama Papua sudah diambil alih pusat. Tim dari Jakarta sudah menyerahkan desain tersebut kepada Solpap. Menurut Yan, pihak PU Papua sudah membuat desain dan telah mengusulkannya berdasarkan nilai-nilai budaya Papua tetapi sudah diubah oleh pusat. (*Cepos*)

15 April

Mama-mama pedagang asli Papua yang tergabung dalam Solpap melakukan aksi di Kantor DPR Papua, Selasa (14/4). Mereka meminta kepada DPR Papua untuk membantu mereka menggantikan tenda-tenda tempat jualan yang sudah mulai rusak di pasar sementara mama-mama Papua di Jln. Percetakan, Kota Jayapura. (*Bintang Papua*)

27 April

Ketua Badan Legislasi DPR Papua Yan Ayomi mengatakan, semua komoditi lokal akan dijual hanya orang asli Papua saja. Selain itu hal ini akan diusulkan agar dilindungi dalam Perdasi. (*Bintang Papua*)

2 Juli

Tim Pokja Rumah Transisi yang dibentuk Presiden Joko Widodo sepertinya membawa kabar gembira bagi perjuangan Solpap. Sekretaris Solpap Robert Jitmau, Senin (1/7), mengatakan, sebaiknya semua pihak baik itu Pemprov Papua, DPR Papua, Pemkot Jayapura mendukung tim ini sehingga janji pembangunan pasar dapat direalisasikan pada tahun ini. (*Cepos*)

7 Juli

Komisi II DPR Papua bidang ekonomi merekomendasikan tiga hal untuk ke pemerintah pusat untuk memajukan perekonomian di Papua. Ketiga rekomendasi tersebut adalah meminta kepada Pemprov Papua segera membangun pasar mama-mama Papua, membangun honai untuk pembatik Papua dan membangun pabrik pengelolaan petatas. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam sidang Paripurna DPR Papua pada Senin (6/7). (*Bintang Papua*)

22 Juli

Koordinator Solpap Robert Jitmau, Selasa (21/7), mempertanyakan kejelasan pembangunan pasar mama-mama Papua. Menurut Robert, masih ada tolak menolak antara Pemda Provinsi Papua dengan Perum Damri sebagai BUMN untuk mencapai kesepakatan pemindahan terminal Damri ke lokasi baru di Jalan Baru Kotaraja. Sedangkan lokasi baru tersebut sudah diselesaikan pembayarannya. (*Bintang Papua*)

1 Agustus

Terkait dengan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo pada

Desember tahun ini, Sekretaris SOLPAP Robert Jitmau mengatakan, ada rencana presiden untuk meresmikan pasar Prahara Sentani dan mama Papua berarti pembangunan pasar mama-mama Papua harus dibangun tahun ini, namun hal itu sampai sekarang belum dilaksanakan. (*Cepos*)

15 Agustus

Wakil Ketua II DPR Papua Fernando Tinal, Jumat (14/8), mengatakan, DPR Papua telah membentuk Pansus dari Komisi IV DPR Papua untuk pembangunan pasar mama-mama Papua. Tugas dari Pansus ini adalah mendorong agar pembangunan pasar secepatnya dilakukan. (*Cepos*)

29 Agustus

Pembangunan pasar mama-mama Papua di tengah kota Jayapura direncanakan mulai Oktober 2015. Ketua Komisi IV DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan DPR Papua dan pemerintah tetap konsisten untuk membangun pasar mama-mama Papua guna mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat. (*Bintang Papua*)

18 November

Ketua Panja Panitia Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua Nathan Pahabol pada Selasa (17/11) mengatakan, akhir tahun 2015 lahan Perum Damri akan dikosongkan. Setelah itu dilanjutkan peletakan batu pertama oleh Gubernur Lukas Enembe untuk pembangunan pasar. (*Cepos*)

21 Desember

Belum adanya tanda-tanda pembangunan pasar mama-mama Papua di Kompleks Damri, dipertanyakan oleh mama-mama pedagang kepada Walikota Jayapura Benhur Tomi Manu dalam tatap muka pada Sabtu (19/12) di pasar sementara mama-mama Papua. Pada kesempatan ini Walikota Benhur Tomi Manu menjelaskan bahwa pengelolaan pasar itu sepenuhnya tanggung jawab Pemprov

Papua. Pada kesempatan ini juga walikota menyerahkan sebuah truk untuk digunakan sebagai sarana transportasi. (*Cepos*)

BAB4

KONFLIK, REKONSILIASI, DAN PROSES PENYELESAIAN KASUS

1. KONFLIK PEGUNUNGAN TENGAH

31 Januari

Sekretaris Daerah Lany Jaya Christian Sohilait pada Jumat (30/1) mengatakan, situasi keamanan di Lany Jaya pasca penembakan dua warga sipil di Kampung Popome (29/1) sudah aman dan kondusif. (*Cepos*)

9 Februari

Kasus penembakan terhadap dua warga sipil terjadi di Distrik Edera Bade Kabupaten Mappi 8 Februari 2015 sekitar pukul 03.00

WIT. Pelaku penembakan diduga oknum aparat keamanan yang melaksanakan tugas pengamanan di salah satu perusahaan di Bade. Dua warga tersebut masing-masing bernama Talema Wetipo (19) dan Yance (19). (*Bintang Papua*).

13 Maret

Pemerintah Kabupaten Lany Jaya mengucurkan dana bantuan Rp 5 miliar dan beras 5 ton untuk 150 kepala keluarga korban konflik di Distrik Prime dan Indawa. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lany Jaya Befa Jigibalom. (*Cepos*)

1 April

Pada Selasa (31/3), di Distrik Gume, Kabupaten Puncak, terjadi kontak senjata antara TPN/OPM dengan Tim Khusus Polda Papua, dan salah satu anggota TPN/OPM Agustinus Tabuni meninggal dunia. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin, kontak senjata itu terjadi pada pukul 10.00 WIT, ketika aparat keamanan bersama sejumlah pegawai Distrik Gume sedang meninjau sejumlah pos keamanan milik polisi dan TNI. Pihak kepolisian berhasil menyita satu senjata laras pendek jenis volver yang dipegang korban dan 50 butir amunisi. (*Kompas, Cepos, Suluh Papua dan Bintang Papua*)

2 April

Terkait dengan kejadian Selasa (31/3) di Distrik Gume, Kabupaten Puncak, Polda Papua mengirimkan satu pleton Brimob (30 personel) ke Kabupaten Puncak. Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan teror dari pasukan Tabuni. Menurut Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende, Rabu (1/4), usaha ini untuk menghentikan dan mengejar sejumlah rekan Agustinus yang masih berkeliaran di Ilaga. Sedangkan menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin, penguatan personil keamanan juga dilakukan di beberapa kabupaten seperti Paniai, Lany Jaya, Kepulauan Yapen dan Yahukimo. (*Kompas & Cepos*)

Pihak Polres Paniai melakukan sweeping sebagai antisipasi gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Paniai. Sweeping ini dilakukan di Jalan Poros Madi Enarotali, Gunung Merah, Kampung Ipakiye, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Rabu (1/4). Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin, razia ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak KKB. (*Cepos*)

4 April

Pihak Polda Papua menetapkan lima pengurus KNPB Yahukimo sebagai tersangka dalam kasus bentrok antara kelompok separatis dan aparat kepolisian pada 19 Maret 2015. Kelima orang ini dinilai telah melakukan upaya provokasi. (*Kompas*)

14 April

Forum Independen Mahasiswa (FIM) dan Pemuda Yahukimo mempertanyakan komitmen DPR Papua untuk membentuk tim investigasi kasus penembakan yang menewaskan dua warga sipil pada 19 Maret. Desakan ini juga sudah disampaikan oleh FIM dan Pemuda Yahukimo pada aksi damai di DPR Papua pada Senin, 30. Hal ini disampaikan ketika FIM dan Pemuda Yahukimo bertandang ke Kantor koran Cenderawasih Pos pada Senin (13/4). (*Bintang Papua & Cepos*)

16 April

Anggota Komisi I DPR Papua Tan Wie Long pada Rabu (14/4) di ruang kerjanya mengharapkan agar di masa kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe segera mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua. Komisi ini dapat membantu menyelesaikan persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. (*Cepos*)

24 April

Tim khusus HAM dari DPR Papua pada Kamis (23/4) ke Yahukimo

untuk melakukan investigasi kasus pelanggaran HAM di Yahukimo. Tim ini diketuai oleh Laurens Kadepa. (*Bintang Papua*)

2 Mei

Pihak Polda Papua dan tim khusus Polres Nabire melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Leonardus Magai Yogi yang dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Devisi II Pemka IV wilayah Paniai. Leonardus ditangkap bersama dua anak buahnya di Kampung Sanoba Atas, Distrik Nabire, Kamis (30/4). Sedangkan dua anggota yang lainnya berhasil meloloskan diri. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige, ketika ditangkap Leonardus melakukan perlawanan dengan senjata. (*Cepos & Suluh Papua*)

4 Mei

Terjadi aksi saling tembak di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, 1 Mei 2015 antara TNI Satgas Pamrawan Yonif 303/Raider dengan kelompok TPN-OPM. Seorang anggota TPN- OPM tewas tertembak oleh TNI. (*Bintang Papua*)

26 Mei

Kepolisian Daerah Papua menyiapkan 70 personel Brimob untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penembakan lima warga Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Penembakan yang terjadi pada Selasa (26/5) mengakibatkan seorang penghuni rumah meninggal dunia dan lima orang lainnya luka-luka. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin mengatakan, kejadian berlangsung sekitar pukul 23.00 WIT. Akibat penembakan itu Pengga Enumbi (31) meninggal dunia setelah tertembak di bagian kepala. Sementara lima orang lainnya, masing-masing Suryanto Tandri Payung (26), Alfred Tandri Payung (28), Yulianus Tandidatu (32), Yogi Rerang (21), dan Marthen Tandri Payung (39) mengalami luka terkena tembakan. (*Kompas.com*)

1 Juli

Kasus penembakan di Kampung Ugapuga Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni yang menewaskan Yoteni Agapa (19) dan melukai Melianus Mote (21) mendapat tanggapan dari Koordinator BUK dan Dewan Adat Paniai. Koordinator BUK Peneas Lokbere mengecam tindakan represif aparat yang tidak pernah berubah. Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobay menambahkan adanya bentuk mengkriminalkan masyarakat yang melakukan pemalangan dan sebagai pemicu penembakan tersebut. Hal ini disampaikan pada Selasa (30/6) ketika memberikan keterangan pers di Kantor KontraS Papua. (*Cepos*)

16 Juli

Bentrok antar warga terjadi di Kampung Gelo, Distrik Gika, Kabupaten Tolikara pada Rabu (15/7). Bentrok ini mengakibatkan 100 honai terbakar, tiga Puskesmas dan satu unit rumah Yayasan WVI, tiga orang meninggal dunia. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige membenarkan kejadian tersebut. Pihak Pemkab Tolikara, Kapolres dan DPRD Tolikara sudah ke tempat kejadian untuk menenangkan warga. Kemudian pihak keamanan menempatkan personelnya di tempat kejadian. (*Cepos*)

20 Juli

Kronologis kejadian Tolikara pada Jumat (17/7), pukul 08.30 WIT, beberapa pemuda Gereja GIDI mendatangi umat muslim yang sedang melangsungkan sholat ied. Kedatangan mereka ini dengan maksud menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka bahwa sesuai Perda Tolikara boleh melaksanakan ibadah tetapi tidak menggunakan pengeras suara atau toa karena dapat mengganggu umat lainnya yang siap untuk melangsungkan seminar dan KKR. Apalagi jaraknya berdekatan, sekitar 300 meter. Ketika menyampaikan aspirasinya, ada tembakan kepada seorang pemuda.

Tembakan ini dilakukan secara bertubi-tubi yang mengakibatkan 12 warga terkena peluru. Masyarakat tidak menerima tembakan tersebut dan langsung membakar beberapa kios yang merambat sampai ke mushola yang kebetulan berada di tengah-tengah kios tersebut. Selain mushola dan kios yang terbakar, beberapa rumah masyarakat Papua dan non Papua ikut terbakar. Salah satu korban penembakan meninggal dunia atas nama Endi Wanimbo (15) dan 11 orang masih dirawat di RSUD Dok II Jayapura. Setelah evakuasi korban, bupati Tolikara, DPRD Tolikara, Kapolres, tokoh agama dan masyarakat melakukan pawai damai untuk mengajak masyarakat kembali beraktivitas sehingga situasinya kembali kondusif. (*Cepos & Tim Independen atas Peristiwa Tolikara*)

22 Juli

Dalam kunjungannya ke Tolikara, Minggu (19/7), Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti mengatakan, masalah Tolikara adalah masalah miskomunikasi. Lebih lanjut dikatakan agar media tidak membesarkan kejadian di Tolikara tersebut. Di tempat lain, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin mengatakan, aparat kepolisian masih kesulitan untuk mendapatkan proyektil peluru yang bersarang di tubuh Alm. Endi Wanimbo (15), korban penembakan di Karubaga, Tolikara (17/7). Menurut Patrige, proyektil ini penting untuk membuktikan siapa yang melakukan penembakan. Dalam kunjungan ke Tolikara Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pada 21 Juli mengatakan akan menurunkan dua tim yang berjumlah 10 orang untuk memberikan trauma healing kepada anak-anak. (*Bintang Papua & Cepos*)

24 Juli

Setelah melakukan pemeriksaan terkait peristiwa Tolikara (17/7), Polda Papua telah mengamankan dua orang yakni DW dan JK yang diduga sebagai koordinator dalam aksi penyerangan dan

pembakaran. Hal ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin. (*Cepos & Bintang Papua*)

25 Juli

Terkait dengan kejadian di Karubaga, Tolikara, pihak DPR Papua membentuk tim Pansus untuk melakukan investigasi terhadap korban penembakan. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua II DPR Papua Yotam Wonda, Jumat (24/7). Di tempat lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan kasus Tolikara bukanlah kasus SARA. Kasus ini hanya dibesar-besarkan oleh media massa. Selain itu Ketua FKUB Papua Pdt. Lapius Biniluk mengharapkan aparat kepolisian tidak menahan dua pemuda yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. (*Bintang Papua*)

27 Juli

Penanganan Kasus Karubaga, Tolikara telah diambil alih oleh Polda Papua. Menurut Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende, kasus tersebut dianggap besar sehingga perlu penanganan khusus bahkan dibantu oleh Mabes Polri. Pihak kepolisian sudah memeriksa 50 saksi terkait kasus tersebut. (*Bintang Papua*)

30 Juli

Upaya perdamaian terkait kejadian di Karubaga, Tolikara, disepakati dilakukan secara adat. Kesepakatan ini muncul ketika terjadi pertemuan antara umat GIDI dan muslim pada Rabu (29/7) di Jayapura yang difasilitasi oleh FKUB Provinsi Papua. Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt. Lapius Biniluk mengatakan, kedua belah pihak yang bertikai sepakat untuk menyelesaikannya secara adat. (*Bintang Papua & Cepos*)

3 Agustus

Pihak Penyidik Polda Papua berencana memanggil Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo dan tiga pendeta lainnya untuk

dijadikan saksi dalam sidang kasus Tolikara pada Senin (3/8). Rencana ini ditanggapi oleh pemerhati HAM Papua Matius Murib. Menurut Matius pemanggilan ini dikhawatirkan memunculkan konflik horizontal yang baru di Papua. Selain itu dalam rangka melakukan pemulihan, Bupati Tolikara Usman Wandikbo telah membentuk tim pemulihan. (*Bintang Papua*)

Seorang warga bernama Duri Kogoya (25) dibunuh oleh seorang warga insial TW di kampung Kolome, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (1/8). Pelaku TW terpaksa ditembak oleh aparat TNI karena hendak kabur dari pos TNI di Distrik Tingginambut. (*Bintang Papua & Cepas*)

4 Agustus

Terkait dengan pemeriksaan Pdt. Dorman Wandikbo oleh Polda Papua, puluhan hamba Tuhan memberikan dukungan moril dengan datang dan menemani Pdt. Dorman di Mapolda Papua. (*Bintang Papua*)

5 Agustus

Terkait dengan kasus Tolikara, Kapolda Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw pada Selasa (4/8) di Mapolda Papua mengatakan, meskipun ada pihak meminta untuk menyelesaikan masalah Tolikara secara adat namun pihak Polda akan tetap memproses kasus ini secara hukum. (*Bintang Papua*)

Penyidik Profesi dan Pengamanan Polda Papua menyita 10 senjata milik anggota Brimob yang bertugas saat pengamanan sholat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara. Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan 10 senjata tersebut disita untuk dilakukan uji balistik di Laboratorium Forensik Polri. (*Bintang Papua & Cepas*)

6 Agustus

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan 4 pimpinan Gereja di Papua membahas kasus Tolikara di Kantor Sinode GKI Argapura pada Rabu (5/8). Keempat pimpinan Gereja adalah Ketua Sinode GKI Papua Pdt. Albert Yoku, Ketua Sinode Kingmi Papua Pdt. Beny Giyai, Ketua Sinode Baptis Papua Pdt. Socrates Yoman dan Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo. Menurut Luhut, masalah yang terjadi di Tolikara bukan merupakan masalah agama tetapi masalah pengertian. Oleh karena itu diharapkan media tidak membesar-besarkan masalah Tolikara. (*Bintang Papua & Cepas*)

7 Agustus

Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw pada Kamis (6/8) di Tolikara menegaskan masalah Tolikara akan diproses secara hukum positif yang berlaku. Permintaan untuk menyelesaikan secara adat untuk sementara ditahan karena mengikuti proses hukum yang berlaku. (*Cepas*)

8 Agustus

Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Pol. Paulus Waterpauw memberikan bantuan kepada 11 korban kasus Tolikara di Polres Tolikara. (*Cepas*)

12 Agustus

Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo pada Selasa (11/8) di Kantor Sinode GIDI Sentani meminta kepada pihak kepolisian untuk menghentikan pemeriksaan terkait kasus Tolikara karena proses perdamaian secara adat telah dilakukan. (*Bintang Papua & Cepas*)

18 Agustus

Masih terkait dengan kasus Tolikara, Ketua Pansus Kasus Tolikara Amerson Wenda mengatakan, pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan 11 warga dalam kejadian tersebut. (*Bintang Papua*)

21 Agustus

Bupati Tolikara Usman Wandikbo memenuhi panggilan Polda Papua untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus Tolikara. Dalam panggilan tersebut, Bupati Usman tanpa diwakili kuasa hukumnya. (*Bintang Papua*)

28 Agustus

Dua anggota TNI dari Kodim 1710/Mimika, Papua, Serka Makher dan Sertu Ashar menembak mati dua pemuda Gereja Katolik Katedral Tiga Raja Timika, Imanuel Mairimau (23) dan Yulianus Okoare (23), pada Jumat (28/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIT. Menurut anggota Komisi Realitas Sosial Keuskupan Timika Santon Tekege, kedua anggota ini dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi alkohol. (*suarapapua.com*)

29 Agustus

Pimpinan 3 sinode Gereja di Papua: Kingmi, Baptis dan GIDI, dalam jumpa pers Kantor Sinode Kingmi pada Jumat (28/8) meminta agar Polda Papua menghentikan proses hukum terhadap dua pemuda dalam kasus Tolikara. Menurut Ketua Umum Pelayanan Pusat Gereja Baptis Pdt. Socrates Yoman, pimpinan Gereja beranggapan penanganan insiden Tolikara sudah selesai melalui surat kedua yang dikirim ke Polda Papua pada 10 Agustus. Penahanan terhadap dua pemuda yang diduga sebagai tersangka akan mengganggu kesepakatan damai pada 29 Juli. (*Cepos & Bintang Papua*)

Anggota TNI dari Kodim 1710/Mimika dan Yonif 754/ENK menembak enam warga pada Jumat (28/8) di Koperapoka, Mimika. Dua warga yang tertembak, Yulianus Okoware dan Imanuel Mairimau meninggal dunia. (*Cepos & Bintang Papua*)

Dalam rangka pengucapan syukur, malam kesenian adat suku Kamoro dengan menampilkan acara “tifa duduk” (menabu tifa dalam posisi duduk / kadang berdiri sambil menyanyikan lagu adat

dan menari, yang biasanya berlangsung semalam suntuk) pada Jumat (28/8) di Koperapoka diwarnai insiden penembakan anggota TNI yang memakan korban enam orang warga sipil. Dua orang meninggal dunia dan empat orang luka-luka. Motif penembakan adalah balas dendam. Pelaku penembakan adalah Serka Makher Rehata, Praka Gergorius S Beta, Sertu Ashar dan Prada Imanuel Imbiri. Korban yang meninggal Imanuel Herman Mairimau dan Yulianus Okoware. Sedangkan yang masih hidup Thomas Apoka, Martinus Imaputa, Moses Emepu dan Martinus Afukafi. (*Laporan SKP Keuskupan Timika*)

31 Agustus

Sebagai bentuk kekecewaan dan protes atas ditahannya dua pemuda Judi Wanimbo dan Arianto Kogoya dalam kasus Tolikara, keluarga kedua pemuda tersebut melakukan pemalangan jalan sejumlah titik di Trans Tolikara Puncak Jaya pada Minggu (30/8). (*Bintang Papua*)

1 September

Tiga orang warga Kelurahan Tanjung Ria bersama dengan keluarga, tokoh masyarakat dan anggota dewan adat Biak di Propam Polda Papua, Senin (31/8), melaporkan diri terkait korban salah tangkap yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Menurut Ishak Ap, ketiga korban ditangkap usai membeli rokok di salah satu kios di pinggir jalan. Ketiganya dibawa dengan menggunakan mobil Avanza ke sejumlah tempat hingga terakhir di Sentani. Dalam perjalanan, keempat oknum polisi ini memaksa ketiga korban mengaku telah mencuri sepeda motor. Lebih lanjut dikatakan bahwa lebih parahnya setiba di Sentani ketiga korban disuruh berlari dan oknum polisi tersebut melepaskan tembakan. Untungnya tidak ada yang kena tembakan dan dua korban berhasil kabur, sementara yang satu ditangkap lagi dan dijebloskan di ruang tahanan Polres Jayapura Kota. (*Cepos*)

Anggota Komisi I DPR Papua Tan Wie Long di Jayapura, Senin (31/8), menegaskan bahwa ada ketidakadilan pemerintah pusat dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penembakan di Tanah Papua. Pada peristiwa Tolikara, sejumlah menteri datang ke Tolikara. Sekarang mereka juga harus datang ke Timika dan menyelesaikan persoalan di sana. Sehingga pihaknya meminta agar pemerintah pusat jangan hanya fokus pada peristiwa Tolikara saja tetapi kasus Timika sebab persoalannya adalah nyawa manusia yang hilang. (*Bintang Papua*)

Staf Khusus Presiden RI Lenis Kogoya, pada Senin (31/8) di Jakarta menilai insiden Tolikara sudah selesai melalui adat. Untuk itu pihaknya meminta kepada Polda Papua segera membebaskan dua warga GIDI yang ditahan yang dianggap provokator. Lebih lanjut Lenis meminta agar Kapolda Papua menyelidiki pelaku penembakan 12 warga GIDI. (*Bintang Papua*)

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Robertus Waroepa pada Senin (31/8) di kantornya, Timika, mengecam tindakan oknum anggota TNI yang melakukan penembakan terhadap enam warga pada Jumat 28 Agustus. Pihak Lemasko meminta TNI untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. (*Cepos*)

3 September

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, di Jayapura, terkait dengan adanya permintaan dari DPR Papua, FKUB dan para tokoh agama mengenai penghentian proses hukum kepada kedua pemuda GIDI mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui adanya surat yang dikirim oleh DPR Papua dan FKUB. Meskipun demikian proses hukum terhadap kasus Tolikara tetap jalan. Lebih lanjut dikatakan bahwa konflik yang terjadi seperti ini pihaknya tetap mengacu pada pihak korban

yang hingga kini rumah, kios, dan usaha mereka belum selesai. Para korban masih dalam pengungsian. (*Bintang Papua*)

11 September

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, di Polda Papua, Kamis (10/9), menemui Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw dan Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian. Pertemuan ini bertujuan membahas berbagai kasus HAM di Papua dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang akan diambil oleh kedua institusi di Papua ini. Pertemuan ini terkait masalah Timika, penegakan Kamtibmas di lingkungan Polda Papua sekaligus visi-misi penegakan Kamtibmasnya. Pada kesempatan ini didiskusikan juga perkembangan kasus Paniai, Timika, Yahukimo dan kasus 17 orang hilang di perairan Yapen menuju Mamberamo Raya, Tolikara. (*Cepos dan Bintang Papua*)

Ketua Tim Pansus Tolikara Amerson Wenda pada Kamis (10/9) di Café Cartensz, Entrop, meminta agar jangan lagi ada penambahan pasukan ke Tolikara. Sejumlah anggota Brimob yang diperbantukan ke Tolikara terkait insiden 17 Juli harus segera ditarik, karena persoalan Tolikara sudah selesai. (*Bintang Papua*)

15 September

Aktivis HAM Provinsi Papua Barat Jimi Liunsanda, di Manokwari, Senin (14/9), mengatakan bahwa pembunuhan tiga warga asal Toraja pada 27 Agustus lalu di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan pelanggaran HAM berat, karena korban dianiaya dengan senjata tajam layaknya hewan ternak. Selanjutnya, dirinya meminta agar semua pihak terutama Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Perempuan untuk memberikan dorongan kepada Polres Teluk Bintuni dan Polda Papua Barat untuk secepatnya mengungkap pelaku pembunuhan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya menilai Polres Teluk Bintuni

lambat dalam mengungkap pelaku dan motif kasus pembunuhan tersebut sehingga Polda Papua Barat harus membentuk tim untuk mengungkap pelaku. (*Bintang Papua*)

19 September

Ketua DAP Forkorus Yaboisembut di Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Jumat (18/9), menyambut positif hasil keputusan KTT-PIF yang akan mengutus tim pencari fakta ke Jakarta dan Papua untuk melihat pelanggaran HAM di Papua. (*Cepos dan Bintang Papua*)

29 September

Salah satu oknum Polisi di Timika, Senin (28/9), kembali menembak 2 warga sipil di Kompleks Gorong-gorong Timika yang mengakibatkan 1 orang meninggal bernama Kaleb Hagau dan yang lainnya mengalami luka tembak di bagian paha dan masih dirawat di RSUD Mimika. (*Cepos*)

1 Oktober

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, di Jayapura, mengatakan bahwa pihaknya melibatkan Laboratorium forensik karena insiden penembakan (28/9) terjadi pada malam hari sehingga ada banyak kemungkinan yang terjadi. Insiden ini harus diperiksa lebih lanjut guna mengetahui jenis peluru dan senjata yang digunakan termasuk lokasi penembakan dengan korban. (*Cepos & Bintang Papua*)

8 Oktober

Ketua DPR Papua Yunus Wonda, di Jayapura, Rabu (7/10), mengingatkan kepada aparat TNI dan Polri agar penembakan terhadap masyarakat asli Papua tidak terjadi lagi. Karena setiap masalah dengan masyarakat tidak harus diselesaikan dengan senjata. Diharapkan kepolisian dan TNI bisa saling menjaga agar masyarakat sipil bisa ada rasa memiliki kepada aparat. (*Cepos*)

16 Oktober

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw pada Kamis (15/10) di Polda Papua, mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya konflik di tengah masyarakat yang dipicu masalah SARA, pihaknya mengusulkan dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Lebih lanjut dikatakan bahwa forum seperti ini juga telah dibentuk di beberapa daerah dan dinilai efektif untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat karena ada keterwakilan dari berbagai kelompok masyarakat dalam forum ini. (*Cepos*)

11 November

Sidang perdana kasus Tolikara digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Selasa (10/11). Sidang perdana ini dipimpin oleh Hakim Adrianus dan Safrudin. Pada sidang ini Jaksa Penuntut Umum Suherman dan G. Seno Aji membacakan dakwaannya di depan terdakwa dan majelis hakim. (*Cepos*)

Pelaku penembakan warga di Koperapoka, Timika (28/8) Serka Makher Rehata, Sertu Ashar, Praka Gregorius Bete dan Prada Imanuel Imbiri, dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari dinas TNI AD oleh Oditur Militer Letkol Laut (KH) Jeri EA Papendang. Keputusan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Timika. (*Bintang Papua*)

Pengadilan Militer akhirnya dapat terlaksana di Timika pada 9-20 November 2015. Sidang Pengadilan Militer, menggunakan Pengadilan Negeri Mimika sebagai tempat Persidangan Militer. Sidang dipimpin Letkol Laut (KH) Ventje Bulu sebagai Ketua Hakim dan didampingi oleh dua anggota hakim, masing-masing Letkol Laut (KH) Asep RH dan Mayor Chk Ahmad Jailani. Ada 4 orang prajurit yang terlibat dan dinyatakan sebagai tersangka-terdakwa, masing-masing: Serka Makher Rehata, Prada Gregorius S Beta, Sertu Ashar dan Pratu Imanuel Imbiri. Sebanyak 23 saksi didatangkan untuk memberikan kesaksian. Para saksi terdiri

dari para korban luka tembak, masyarakat sipil di sekitar lokasi, anggota kepolisian Polsek Miru, Pihak TNI (POM dan Intel) dan para medis baik dari RSUD Mimika maupun dari RSMM Timika. Setelah Sidang Pengadilan Militer melakukan pemeriksaan saksi dan barang-barang bukti yang ada, maka para hakim memutuskan perkara. Bahwa, semua terdakwa DIPECAT dari Kesatuan dan dipenjarakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa Serka Makher Rehata, vonis pidana pokok 12 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 15.000,-
- b. Terdakwa Praka Gergorius S Beta, vonis pidana pokok 3 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 10.000,-
- c. Terdakwa Sertu Ashar, vonis pidana pokok 9 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 15.000,-
- d. Terdakwa Prada Imanuel Imbiri, vonis pidana pokok 3 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 10.000,-. (*Laporan Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Timika*).

14 November

Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo meminta agar umat muslim di Kabupaten Tolikara mencabut tuntutan terhadap kedua pemuda yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Lebih lanjut Pdt. Dorman mengatakan, massanya akan melakukan aksi demo untuk menuntut pembebasan terhadap kedua pemuda tersebut. (*Bintang Papua & Cepos*)

16 November

Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo menuding pemerintah karena telah melakukan pembohongan publik terkait kasus Tolikara. Menurut Dorman, kalau kasus ini dibawa ke pengadilan

berarti pemerintah telah melakukan pembohongan karena kasus Tolikara bukan kasus SARA. Hal ini dikatakan oleh Pdt. Dorman Wandikbo pada Sabtu (14/11) di Abepura. (*Bintang Papua*)

19 November

Terkait korban penembakan dalam kasus Tolikara, Ketua DPR Papua Yunus Wonda menegaskan penegak hukum harus membuktikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua karena sampai saat ini belum melihat proses pengungkapan terhadap para pelaku penembakan. Dalam kejadian tersebut ada 12 warga yang tertembak dan satu orang meninggal dunia. (*Bintang Papua*)

28 November

Penembakan terhadap warga sipil terjadi kembali. Seorang pemuda Paskalis Kossy, warga Kampung Kama, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya tertembak ketika makan pinang pada Jumat (27/11). Paskalis Kossy terkena tembakan karena pistol yang dibawa oleh Pratu FA seorang anggota Subdenpom XVII/B Wamena jatuh dan meletus sendiri. Pelurunya memantul dari dinding rumah dan mengenai Paskalis Kossy. Menurut Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Teguh Raharjo, peristiwa ini merupakan kelalaian Pratu FA. (*Cepos*)

1 & 2 Desember

Peristiwa saling tembak terjadi lagi di Kampung Namuni, Kabupaten Mambramo Raya. Berdasarkan berita yang dirilis penembakan ini bermula ketika anggota TNI pada 12.00 WIT melakukan patroli dalam pengamanan Pilkada di Mambramo Raya. Perwira Penghubung TNI Mayor Inf. Jhon Defretes dan dua anggotanya Kopda Simon dan Kopda Afan dihadang oleh sekelompok orang di Kampung Namuni. Dalam peristiwa ini Mayor Inf. Jhon Defretes ditemukan tewas. Jenasahnya ditemukan tim gabungan TNI-Polri, Selasa (1/12) berada di lokasi kejadian. (*Cepos*)

2 Desember

Terkait dengan perayaan 1 Desember, Kapolres Jayawijaya AKBP Semmy Roni Thabaa mengatakan, situasi keamanan di 4 kabupaten Pegunungan Tengah (Jayawijaya, Yalimo, Mambramo Tengah dan Nduga) dalam kondisi kondusif. (*Cepos*)

Kontak senjata terjadi lagi di Kampung Wanapompi, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kep. Yapen, Selasa (1/12). Kontak senjata ini antara aparat gabungan TNI-Polri dan OPM wilayah Saireri pimpinan Erick Manitory. Peristiwa ini menyebabkan Erick Manitory tertembak dan tewas. Pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata rakitan bentuk SSI lipat, 3 butir amunisi tajam kaliber 5,56 MM dan 1 buah bendera Bintang Kejora. (*Bintang Papua*)

Erik Manitori dan anak buahnya sudah ada di lokasi pengibaran bendera Bintang Kejora sekitar pukul 03.00 WIT. Sebelum mata hari terbit, pukul 06.00 WIT, Bendera Bintang Kejora dikibarkan di halaman rumah Erik Manitori di Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera, Kabupaten Kep. Yapen. Lalu dilanjutkan dengan ibadat-doa bersama. Setelah berdoa bersama, beberapa masyarakat yang mengikuti ibadat-doa membubarkan diri.

Sementara Erik Manitori dan anak buahnya masih ada di lokasi sambil berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 06.45 WIT datanglah sebuah Truk Dalmas Polres Kep. Yapen bersama 2 unit mobil sejenis Avanza dipimpin oleh Kabagops Polres Kep. Yapen AKP Yunus Ratu dan Kasat Intelkam AKP Imam Komari. Tanpa basa-basi rombongan Polres Kep. Yapen melakukan penembakan ke arah Kampung Wanampompi. Beberapa masyarakat yang masih ada di kampung (para orang tua-lanjut usia), panik, berlari mencari tempat berlindung. Warga yang masih ada di kampung hanya bisa bersembunyi di rumah dan tidak bisa berlari ke tempat lain karena posisi Kampung Wanampompi terletak di lembah di pinggir pantai. Sedangkan

rombongan Polres Kep. Yapen, berposisi di jalan raya yang terletak di ketinggian kurang lebih 8-12 meter.

Melihat kejadian seperti itu, maka Erik Manitori sebagai yang bertanggungjawab atas kegiatan pengibaran Bintang Kejora, berusaha berbicara-berdialog dengan rombongan Polres Kep. Yapen. Karenanya Erik berjalan menuju ke arah rombongan Polres Kep. Yapen. Akan tetapi kemudian dia ditembak lalu terjatuh. Melihat bahwa Erik telah jatuh, Yonas Manitori (kaka kandung Erik Manitori) bergegas lari mendekati Erik, namun Yonas pun ditembak dan meninggal di tempat. Lalu anak buah Erik yang ada di sekitar tiang bendera, berusaha juga untuk menyelamatkan Erik yang sedang terduduk dan tidak bisa bergerak lagi. Akan tetapi mereka juga ditembak.

Kepada yang masih hidup, Erik perintahkan agar segera mundur masuk hutan. Akan tetapi Erik Manitori dan Yulianus yang ditembak pada lutut kiri dan kanan, sudah tidak bisa berlari sehingga ditangkap oleh Tim Rombongan Polres Kep. Yapen. Setelah ditangkap, Erik dan Yulianus kemudian dinaikan ke Truk Dalmas Polres Kep. Yapen menuju ke Mabes Polres Kep. Yapen, yang kemudian kedua tahanan (Erik Manitori dan Yulianus Robaha) dinyatakan telah meninggal dunia. Kedua jenazah lalu diserahkan ke RSUD Kep. Yapen. Sementara korban yang lain tetap bersembunyi sambil berusaha sendiri mengatasi luka-luka terkena tembakan. Korban penembakan dalam peristiwa ini, berjumlah 12 orang; 4 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. (*Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika*).

3 & 4 Desember

Kepolisian Papua mengirimkan 1 pleton Brimob untuk membantu Polres Kepulauan Yapen dan mengantisipasi pergerakan kelompok OPM pasca penembakan di Kampung Wanapompi. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Rabu

(2/12), mengatakan, personil Brimob yang dikirim tersebut untuk memback-up pengamanan Polres Kep. Yapen. (*Bintang Papua & Cepas*)

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige di Mapolda Papua (2/12) mengatakan, aparat keamanan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan di Mamberamo Raya, Senin (30/11). Selain itu pihak kepolisian juga masih melakukan olah TKP. (*Cepas*)

Terkait penembakan di Kampung Wanapompi, Kepulauan Yapen, Plt. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey, Rabu (2/12), mengatakan, Komnas HAM melihat ada dugaan sementara penanganan atau negosiasi yang terjadi kebuntuan lalu diduga aparat agak sedikit lalai dalam menerapkan protap. Walaupun demikian Komnas HAM mewakili keluarga korban meminta kepada Kapolda Papua untuk mengevakuasi korban agar mendapatkan pelayanan medis. (*Cepas & Bintang Papua*)

15 Desember

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian di Makodam XVII/Cenderawasih Papua, Senin (14/12), menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus mengejar pelaku penembakan terhadap perwira di Mamberamo Raya pada 30 November 2015. Panglima Mayjen TNI Siburian meminta aparatnya agar tidak semena-mena, secara membabi buta melakukannya. (*Bintang Papua & Cepas*)

18 Desember

Penembakan terjadi lagi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Penembakan ini terjadi di Kampung Paro, Distrik Paro Atas pada Rabu (16/12). Peristiwa penembakan ini menyebabkan Kopda Pugu Yulianto anggota Kodim 1702/Wamena tertembak di lengan kiri. Menurut Pangdam XVII/Cenderawasih Hinsa Siburian

penembakan tersebut terjadi ketika anggota TNI melakukan pengamanan pembangunan jalan trans Papua. Penembakan ini diduga dilakukan oleh orang tak dikenal. (*Cepos & Bintang Papua*)

22 Desember

Komisi I DPR Papua mendesak proses hukum yang dijalani oleh dua pemuda yang dituduh sebagai pelaku dalam kejadian di Tolikara segera dihentikan. Hal ini karena saksi kunci yang dihadiri dalam persidangan mengakui tidak melihat kedua pemuda terlibat dalam kejadian tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Orgenes Wanimbo, kasus Tolikara segera dihentikan sebab permasalahannya yang terjadi tidak benar dan terkesan ada pembohongan publik. (*Bintang Papua*)

Pihak Yonif 751/Raider dan Satgas Ban menangkap dua anggota KKB pimpinan Kosmos Makabori yang diduga terlibat dalam penembakan Letkol Jhon Defretes di Kampung Namuni, Kabupaten Mamberamo Raya pada Senin (30/11). Keduanya ditangkap di tempat yang berbeda di Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah pada Jumat (18/12). (*Cepos*) Seorang buruh kontrak PT Tandan Sawita Papua di Kabupaten Keerom Marfel Doga ditembak oleh Satgas Pamtas Yonif 411/Raider di Kebun 5 Raflesia pada Minggu (20/12). Berdasarkan informasi yang diperoleh penembakan ini terjadi ketika korban meminta uang tunjangan hari raya (THR). Korban diduga dalam keadaan mabuk setelah minum miras. Korban membuat keributan karena tidak terima uang THR-nya belum dibayar oleh perusahaan. Korban sempat dilarikan ke RSUD Kwaingga Arso namun tidak tertolong. (*Bintang Papua & Cepos*)

29 Desember

Penembakan dan penyerangan pos polisi terjadi lagi. Pada Minggu (27/12) Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, diserang oleh kelompok

kriminal bersenjata. Penyerangan ini menyebabkan Bripda Ilham, Briptu Muhamad Ridho Matdoan dan Bripda Muhamad Armansyah tewas. Sedangkan Briptu Dumapa dan Bripda Riyan mengalami luka tembak dan berhasil selamat. Penyerangan ini diduga dilakukan oleh 25 orang yang juga membawa kabur senjata dan amunisi di Mapolsek Sinak. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige, kejadian bermula ketika tenaga bantuan Polsek Sinak membuka pintu belakang dan secara tiba-tiba 25 orang anggota KKB masuk dan menyerang anggota polisi yang lagi berada di ruangan penjagaan. Menanggapi peristiwa ini Plt. Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengharapkan agar semua pihak menahan diri dan menghentikan tindakan kekerasan yang menyebabkan korban jiwa berjatuh. Sedangkan Gubernur Lukas Enembe menilai peristiwa ini merupakan perilaku yang tidak berprilaku manusiawi sehingga diharapkan kepolisian mampu menangkap para pelakunya. (*Cepos*)

30 Desember

Pihak Polda Papua masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan Polsek Sinak. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige, dari hasil olah TKP yang dilakukan dan penyisiran tidak semua senjata dibawa kabur pelaku. Ketua Sinode GKI Papua Pdt. Albert Yoku meminta kepada penegak hukum agar segera menangkap para pelakunya. (*Cepos & Bintang Papua*)

31 Desember

Pengejaran terhadap para pelaku penyerangan Polsek Sinak terus dilakukan. Di dalam pengejaran tersebut terjadi saling tembak antara pihak keamanan dengan KKB. Peristiwa ini menyebabkan salah satu dari KKB tewas tertembak dan jenastuhnya tidak bisa diambil. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti di Bandara Wamena (30/12). (*Cepos*)

2. PENUNTASAN KASUS PANIAI 8 DESEMBER 2014

7 Januari

Massa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mee (IPME), tokoh agama, dan dewan adat Paniai melakukan demo damai ke Kantor DPR Papua. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus penembakan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, pada 8 Desember 2014. Massa juga meminta DPR Papua mengumumkan hasil investigasi tim Pansus DPR Papua. (*tabloidjubi.com*)

Dalam sidang paripurna yang digelar Komnas HAM RI pada 7 Januari 2015, pukul 23.00 WIB, di Kantor Komnas HAM RI, Jln. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, telah diputuskan membentuk tim penyelidikan yang dinamakan “Tim Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Paniai”, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil. Keputusan tersebut dikeluarkan dengan No. 01/SP/1/2015 dan menetapkan beberapa anggota tim yakni, Hafid Abbas (Ketua Komnas HAM), Natalius Pigai (anggota), Siti Noor Laila (anggota) dan Syane Indriyana (Wakil Ketua). Dari unsur tokoh masyarakat Pastor Neles Tebay, Pr (Penasehat Komnas HAM, juga Koordinator Jaringan Damai Papua), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi Papua), Farid Hussein (mantan Utusan Khusus Presiden SBY untuk Papua), Sylvana Apituley (Anggota Komnas HAM Perempuan) dan Agus Purwadianto (Dosen Universitas Indonesia) sedangkan dari unsur aparat keamanan Agus Widjojo (Mantan Kepala Staf Teritorial TNI), Letjen TNI (Purn) M. Noer Mu'is (Mantan Pangdam Bukit Barisan) dan Irjen Pol Bagus Eko Danto (Mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua). (*suarapapua.com*)

8 Januari

Gerakan Papua Itu Kita yang terdiri dari sejumlah aktivis HAM mengeluarkan siaran pers dan diskusi panel di Kantor LBH

Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB untuk mendesak Komnas HAM RI membentuk KPP-HAM untuk pengadilan HAM. (*bantuanhukum.or.id*)

Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobay mendesak agar Presiden Joko Widodo membuktikan komitmen dan janjinya dalam menuntaskan peristiwa penembakan di Lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014. Dewan Adat Paniai mendesak agar presiden menerbitkan Kepres untuk membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia (KPP HAM), bukan tim pencari fakta atau tim gabungan pencarian fakta. (*Bintang Papua*)

9 Januari

Amnesti Internasional (AI) mengeluarkan siaran pers secara resmi terkait kasus Paniai. Amnesti meminta tim penyelidikan pelanggaran HAM Paniai yang dibentuk Komnas HAM, pada 7 Januari 2015 untuk bisa memastikan temuan-temuannya dan dapat segera diumumkan ke publik. Selain itu mendesak Komnas HAM untuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keamanan dan keselamatan para saksi dan korban dari Paniai yang telah mengalami trauma akibat penembakan dan juga telah dilaporkan menjadi sasaran intimidasi dan ancaman. (*suarapapua.com*)

13 Januari

Pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Sutarmanto yang mengatakan bahwa sulit mengungkapkan pelaku penembakan di Paniai ditanggapi oleh Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobai. Menurut Jhon, pernyataan Kapolri sangat keliru karena jana'za tidak diotopsi, di dalam UU 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan di dalamnya terdapat penjabaran yang sangat jelas. Ada poin penganiayaan, penyiksaan dan itu terjadi di Paniai. (*Bintang Papua*)

Anggota Komisi A DPR Papua Laurens Kadepa mempertanyakan proses pengusutan kasus penembakan Paniai. Menurut Laurens, persoalan di Paniai akan terungkap bila ada niat dan keseriusan mengusut kasus tersebut. Ia juga mempertanyakan alasan apa yang menyebabkan pihak-pihak terkait menyatakan ketidakmampuannya mengungkapkan kasus tersebut ke publik, padahal para korban yang masih hidup sudah bersaksi dan mengaku pelaku penembakan adalah polisi dan tentara. (*Bintang Papua*)

14 Januari

Gerakan Papua Itu Kita menggelar diskusi di Kantor LBH Jakarta untuk mendesak Komnas HAM RI membentuk KPP-HAM untuk pengadilan HAM. Komnas HAM RI diminta membentuk tim berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM berat. Masyarakat adat meminta Komnas HAM melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam penyusunan Tim Ad Hoc yang akan melakukan investigasi. (www.satuharapan.com)

15 Januari

Dewan Adat Paniai dan sejumlah aktivis LSM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan melaporkan kasus Paniai ke Komite HAM PBB yang sedang berkunjung ke Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kekerasan/penembakan ditangkap. Pertemuan ini difasilitasi oleh sejumlah lembaga HAM yang tergabung dalam Human Rights Working Group (HRWG) yang berkedudukan di Jakarta. (suarapapua.com)

16 Januari

Dosen Hukum Internasional FISIP Ucen Jayapura Marinus Young mengingatkan kepada pihak polisi dan TNI bahwa situasi Papua saat ini, dimana konflik dan kekerasan semakin meningkat bahkan kasus Paniai tidak diselesaikan maka hanya akan membawa Papua pada tuntutan politik yang jauh lebih besar yakni referendum. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

19 Januari

Ketua Dewan Adat Paniai John Gobay didampingi oleh Koordinator Gerakan Papua Itu Kita Zelly Ariane (19/1), di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta Pusat, melakukan pertemuan dengan dua komisioner LPSK dan meminta perlindungan kepada para korban yang akan memberikan keterangan kepada tim Ad Hoc Paniai yang dibentuk Komnas HAM. Tanggapan LPSK bahwa mereka bersedia untuk memberikan perlindungan kepada para saksi. (*suarapapua.com*)

29 Januari

Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobai, Jayapura, berharap agar Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih tidak melakukan pergeseran pasukan. Khususnya pasukan yang selama ini bertugas di Paniai karena hingga saat ini kasus tewasnya 5 warga sipil di Paniai pada 8 Desember belum terungkap siapa pelakunya. (*Cepos*)

28 Januari

Kepolisian Sektor Abepura, Papua membubarkan massa yang tergabung dalam FIM ketika melakukan aksi demo damai di depan Gapura Uncen, Abepura. Dalam aksinya massa menuntut keadilan bagi korban kasus Paniai 8 Desember 2014. Aksi ini dibubarkan karena tidak memiliki izin untuk melangsungkan aksi demo damai. (*tabloidjubi.com*)

9 & 10 Februari

Massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) pada 9 Februari 2015 melakukan demo ke DPR Papua. Massa mendesak kepada tim investigasi yang telah dibentuk oleh DPR Papua, TNI dan Polri terkait kasus Penembakan di Paniai 8 Desember 2014 untuk segera mengumumkan hasil temuannya. (*Cepos & suarapapua.com*)

12 -14 Februari

Selama tiga hari (12-14/2/2015) di Enarotali, LPSK melakukan beberapa kali pertemuan dengan para saksi dan korban. Tujuan pertemuan ini untuk memastikan kesediaan para saksi dan korban agar mendapatkan perlindungan dari LPSK jika Kasus Paniai berdarah dibawah hingga ke ranah hukum. Tim dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (*suarapapua.com*) Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Yotje Mende mengatakan, akan serius mengungkapkan kasus Paniai berdarah. Oleh karena itu Kapolda meminta kepada masyarakat dan pihak keluarga korban untuk mengizinkan menggali mayat para korban penembakan guna mengungkapkan siapa pelakunya. (*Bintang Papua*)

17-18 Februari

Tim Komnas HAM RI yang dipimpin oleh Meneger Nasution melakukan investigasi ke Enarotali, Paniai dan bertemu dengan berbagai saksi dan korban, termasuk menemui Bupati Paniai Hengky Kayame dan sejumlah pejabat militer. (*tabloidjubi.com*)

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Jayapura, Papua menggelar aksi di Kantor DPR Papua. Massa menuntut pertanggungjawaban negara atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM di tanah Papua, khususnya kasus Paniai Berdarah. (*tabloidjubi.com*)

20 Februari

Keluarga Besar Mahasiswa Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa dan BEM Uncen Jayapura melakukan aksi di Kantor DPR Papua (18/2). Mereka mendesak agar pihak-pihak terkait dalam hal ini Polri dan TNI agar segera mempercepat proses investigasi untuk mengungkapkan siapa pelaku penembakan terhadap 4 warga sipil di Paniai. (*Cepos, Bintang Papua & Suluh Papua*)

24 Februari

Kepolisian Daerah Papua membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Direktur Reskrim Polda Papua Kombes Pol Dwi Irianto untuk mengusut pelaku penembakan di Paniai 8 Desember 2014. (*Cepos*)

Forum Independen Mahasiswa (FIM) melakukan jumpa pers di Kantor ALDP terkait peristiwa Paniai Berdarah. Pihak FIM meminta Komnas HAM RI bekerja secara serius dan selanjutnya membentuk KPP-HAM agar pelaku bisa diadili melalui sidang pengadilan HAM berat. (*suarapapua.com*)

5 Maret

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan, sebagai advokat dan pembela HAM di Tanah Papua, ia mendesak Komnas HAM terus mengusut kasus Paniai berdasarkan amanat aturan yang berlaku hingga menemukan bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam pasal 7,8 dan 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. (*Bintang Papua*)

16 Maret

Di Kantor Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, di Kota Jayapura, Papua, sejumlah pimpinan Gereja yang tergabung dalam Forum Eukumene Gereja-Gereja Papua mendesak Presiden Jokowi untuk segera membentuk tim KPP HAM untuk kasus penembakan di Paniai. (*suarapapua.com*)

21 Maret

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Gerakan Melawan Lupa Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai (Gempa KPH-Berapi) melakukan aksi demo damai di Kampus STPMD Yogyakarta. Massa menuntut agar negara bertanggung jawab atas penembakan di Paniai. Gempa KPH meminta Komnas HAM bekerja secara serius agar pelaku pelanggaran HAM bisa dihukum. Massa

juga meminta Presiden Jokowi menepati janjinya menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. (*suarapapua.com*)

26 Maret

Wakil Ketua Internal Penyelidikan Kasus Paniai Komnas HAM RI Siti Noor Laila mengatakan, pihaknya masih terus mengumpulkan seluruh informasi dan data terkait kasus Paniai. Sekarang tahapan adalah mengkonfirmasi ke Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih sesuai dengan data yang dimiliki. Dan kami belum bisa menyampaikan permasalahan yang ada di Paniai. (*Cepos*)

29 Maret

Forum Independen Mahasiswa (FIM) menggelar seminar dan diskusi publik, di Aula Susteran Maranatha Waena, Jayapura. Dalam seminar tersebut terungkap permintaan agar Komnas HAM membentuk KPP-HAM kasus Paniai Berdarah. Hadir sebagai pembicara dan narasumber adalah Anggota DPR Papua Laurens Kadepa, Agus Kadepa (FIM), Pdt. Dora Balubun mewakili gereja GKI, Jhon Gobay dari Dewan Adat Paniai, Yones Douw, aktivis dari Gereja Kingmi dan Jorgen Numberi dari Komnas HAM Perwakilan Papua. (*tabloidjubi.com*)

31 Maret & 1 April

Dewan Adat Paniai bersama sejumlah masyarakat sipil melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Papua Yunus Wonda di Kantor DPR Papua. Pertemuan ini untuk meminta DPR Papua menyurati Komnas HAM RI dan Presiden Jokowi terkait penuntasan kasus Paniai Berdarah. Wonda berjanji untuk meneruskan permintaan tersebut. (*tabloidjubi.com*)

Pihak DPR Papua dan koalisi masyarakat sipil Papua sepakat mendorong pembentukan Komisi Penyidik Pelanggaran HAM untuk kasus penembakan di Paniai (8/12/2014). Kesepakatan ini

terjadi ketika koalisi masyarakat sipil Papua mengadakan audiensi ke DPR Papua pada Selasa (31/3). Menurut Ketua DPR Papua Yunus Wonda, pelanggaran HAM di Papua yang melibatkan pihak aparat keamanan biasanya pengungkapannya selalu berjalan lamban. (*Cepos dan Bintang Papua*)

4 April

Massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) melakukan aksi demo damai ke Kantor Komnas HAM perwakilan Papua sebagai tindak lanjut hasil seminar yang digelar di Aula Susteran Waena (29/3). Massa meminta Komnas HAM perwakilan Papua menyurati Komnas HAM RI agar membentuk Tim Ad Hoc sesuai UU No 26/2000. (*tabloidjubi.com*)

8 April

Forum Independen Mahasiswa (FIM) mengadakan aksi demo damai ke Kantor Komnas HAM perwakilan Papua di Dok V, Jayapura Selatan pada Selasa (7/4). Aksi ini untuk mendesak Komnas HAM untuk segera menuntaskan kasus penembakan di Paniai pada 8 Desember 2014. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM RI Natalis Pigai mengatakan kasus Paniai adalah kasus pelanggaran HAM berat sehingga dalam sidang paripurna Komnas HAM direkomendasikan pembentukan Tim Ad Hoc. (*Cepos & Bintang Papua*)

Aksi yang sama juga dilakukan oleh Gerakan Papua Itu Kita bersama sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta di Kantor Komnas HAM RI. Massa meminta dalam sidang paripurna para komisioner Komnas HAM RI membentuk Tim Ad Hoc berdasarkan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM. Pada malamnya komisioner Komnas HAM RI melakukan pleno dan sepakat membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan investigasi terhadap kasus Paniai Berdarah. Komnas HAM akan menggunakan UU 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang pengadilan hak asasi manusia berat. (*portalkbr.com*)

10 April

Dewan Perwakilan Rakyat Papua akan membentuk Pansus untuk mengusut kasus penembakan di Paniai. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Kamis (9/4). Di samping itu Komisioner Komnas HAM RI Natalis Pigai pada Kamis (9/4) mengatakan, paripurna Komnas HAM telah menerima laporan hasil tim penyelidikan dan menyetujui pembentukan Tim Ad Hoc kasus Paniai. (*Suluh Papua & Cepos*)

17 April

Ketua DPR Papua Yunus Wonda akhirnya mengeluarkan surat keputusan pembentukan Pansus investigasi kasus penembakan di Paniai dan Yahukimo. Ketua Pansus untuk kedua kasus ini adalah Laurenz Kadepa, Wakil Ketua Deki Nawipa. Tim Pansus ini terdiri dari 11 anggota. (*Bintang Papua*)

24 April

Pendeta Soctares Yoman menanggapi niat Komnas HAM untuk mengusut kasus pelanggaran HAM masa lalu. Bagi Socrates niat baik tersebut patut dipuji tetapi tidak mengalihkan kasus Paniai yang baru terjadi. (*Bintang Papua*)

7 Mei

Beberapa pihak di Papua menilai kasus penembakan 8 Desember 2014 di Paniai sengaja ditutupi. Sudah enam bulan tapi pihak berwajib belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Ketua Pansus DPR Papua Laurens Kadepa di Jayapura pada Rabu (6/5) mengatakan pengungkapan pelaku dalam kasus ini sebenarnya tidaklah sulit. Banyak saksi mata yang melihat kejadian tersebut. (*Kompas, Suluh Papua & Bintang Papua*)

15 Mei

Ketua Pansus HAM DPR Papua Laurenz Kadepa mengatakan kasus Paniai sepertinya dialihkan menjadi kasus kriminal biasa

bukan sebuah kasus pelanggaran HAM. Hal ini untuk menanggapi batasan waktu yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada pihak Polda Papua menuntaskan kasus tersebut. Menurut Laurens, batasan waktu tersebut sepertinya tidak cukup bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut, walaupun sudah jelas-jelas dan diduga kuat bahwa pelakunya dari TNI dan Polri. (*Bintang Papua*)

26 Mei

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di Jakarta, mengaku telah menerjunkan tim pencari fakta baru atas peristiwa berdarah di Paniai, Papua. Tim ini merupakan unsur gabungan dari Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Meski belum lama turun mengumpulkan data, tim telah menemukan fakta-fakta baru. (www.cnnindonesia.com)

3 Juni

Ketua Dewan Adat Paniai Jhon Gobay di Kota Jayapura pada Selasa (2/6), menyarankan kepada tim gabungan Mabes Polri dan Polda Papua agar dalam pengambilan dan pengumpulan keterangan terkait kasus penembakan di Paniai perlu melibatkan LPSK dan Komnas HAM RI agar hasil di lapangan lebih akurat dan detail. Sebab dengan begitu dapat dipastikan bahwa saksi yang melihat kejadian (kasus) tersebut itu berani memberikan keterangan tanpa takut. (*Bintang Papua*)

5 Juni

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende di Mapolda Papua pada Kamis (4/6), mengaku bahwa pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan terkait kasus penembakan 4 warga sipil di Paniai pada 8 Desember 2014. Hal ini karena tim independen yang dibentuk oleh Menkopolhukam masih melakukan investigasi di Kabupaten Paniai. Oleh karena itu pihaknya masih menunggu

hasil investigasi dari tim independen tersebut. (*Cepos*)

12 Juni

Pihak Pansus HAM DPR Papua di Jayapura mengharapkan kepada semua pihak untuk tetap mendukung upaya penuntasan kasus Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014 lalu. Diharapkan agar jangan ada lagi tim-tim tandingan dengan Komnas HAM. Karena kalau terjadi seperti itu, masalah kasus Paniai tidak dapat terselesaikan. Komnas HAM telah merekomendasikan pembentukan Tim Ad Hoc lalu, maka seharusnya TNI/Polri mendukung hal tersebut. (*Bintang Papua*)

22 Juni

Massa yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) di ruas jalan di Kota Jayapura, melakukan aksi galang dana/koin untuk membantu Tim Ad Hoc Komnas HAM RI yang tidak punya biaya/uang untuk melanjutkan proses advokasi kasus Paniai Berdarah. Aksi ini kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian dan sebanyak 14 mahasiswa ditahan di Polresta Jayapura. (*tabloidjubi.com*)

25 Juni

Forum Independen Mahasiswa (FIM) di Kantor KontraS, Padang Bulan, Jayapura, melakukan jumpa pers untuk meminta Bupati Paniai konsisten mendorong pengungkapan kasus Paniai Berdarah. Sekretaris FIm Melianus Duwituau mengatakan agar pihak Pemda Paniai juga membantu dana dan memfasilitasi Tim Ad Hoc yang hingga saat ini tidak ada dana. (*tabloidjubi.com*)

29 Juni

Forum Independen Mahasiswa melakukan aksi damai ke kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan menyerahkan uang senilai kurang lebih 608 ribu yang digalang sejak 22 Juni 2015. Uang tersebut diserahkan ke Komnas HAM perwakilan Papua yang

diterima oleh Plt. Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandei. (*tabloidjubi.com*)

2 Juli

Terkait dengan kasus penembakan (Paniai), Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende yakin bahwa tindakan otopsi terhadap jenazah Alfius Youw dapat mengungkap pemilik senjata atau pelaku penembakan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Irjen Pol. Yotje Mende ketika mengikuti hari Bhayangkara pada Rabu (1/7) di Kantor Gubernur Papua. (*Bintang Papua*)

8 Juli

Gerakan solidaritas Papua Itu Kita di Kantor Komnas HAM RI, menggelar aksi penyerahan koin sedekah pada Komnas HAM RI. Aksi penyerahan koin ini diterima oleh Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai. Pada kesempatan itu Natalius Pigai mengatakan bahwa Komnas HAM RI serius untuk menuntaskan kasus Paniai. Walaupun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM adalah terkendala pembiayaan untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. (*tabloidjubi.com*)

9 Agustus

Pendeta Niko Degei di Jayapura, mewakili keluarga korban penembakan 8 Desember 2014 di Paniai menolak membuat surat pernyataan kesediaan otopsi yang diminta oleh Komnas HAM. Surat dari Komnas HAM dikirim untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga korban. (*tabloidjubi.com*)

10 Agustus

Anggota DPR Papua Laurenz Kadepa pada Sabtu (8/8) mengatakan, sejak menjadi presiden, Joko Widodo tidak membuktikan satu pun pengungkapan kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya kasus Paniai Berdarah. (*Bintang Papua*)

16 Agustus

Sejumlah aktivis Papua, termasuk anggota DPR Papua memprotes keputusan pemerintah daerah dan aparat keamanan menggunakan lapangan Karel Gobay sebagai tempat upacara bendera. DPR Papua menilai pemerintah tidak menghargai adat karena pelaku penembakan keempat jenazah yang dikubur di lapangan belum juga diungkap. “Saya sangat setuju kalau keluarga korban tak mau ikut upacara 17 Agustus dengan alasan kasus Paniai masih belum terungkap, termasuk menolak menggunakan lapangan Karel Gobay, karena semua itu kita harus lihat dari kaca mata kemanusiaan,” tegas Laurenz Kadepa. (*suarapapua.com*)

16 September

Ketua Forum Independen Mahasiswa Teko Kogoya di KontraS Papua pada Senin (14/9), kembali mempertanyakan proses penanganan kasus Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu dan menewaskan 5 warga sipil dan hingga kini belum diketahui pelakunya. Hal ini ditunjukkan kepada Tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Komnas HAM RI karena hingga kini masyarakat Paniai sendiri tak mengetahui sampai di mana proses pengungkapannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya kecewa karena banyak yang mempertanyakan mengapa hingga kini kasus Paniai yang terjadi di depan mata belum juga dapat diketahui pelakunya. Sementara beberapa kasus begitu cepat memperoleh kejelasan mengenai pelakunya. (*Cepos*)

22 September

Gerakan Papua Itu Kita di Kantor LBH Jakarta, memfasilitasi acara makan papeda juga membicarakan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, seperti kerusakan lingkungan, investasi di Merauke, beberapa kasus kekerasan yang terjadi di tanah Papua, termasuk Paniai. Hal ini merupakan kampanye untuk penuntasan berbagai kasus HAM. (*tabloidjubi.com*)

1 Oktober

Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Papua di Kantor KontraS Papua, Jayapura, dalam konferensi pers, mendesak Polda Papua segera mengusut tuntas kasus penembakan di Timika yang menewaskan Kaleb Bagau (18) dan Efrando I.S. Sabarofek (17) yang masih kritis di RSUD Mimika. Selain itu mendesak menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk peristiwa Paniai Berdarah. (*suarapapua.com*)

8 & 9 Oktober

Massa yang tergabung dalam SKP HAM Papua menggelar aksi damai terkait penuntasan kasus Paniai Berdarah. Aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian ketika massa melakukan orasi damai di depan Gereja Katolik Gembala Baik, Abepura, Jayapura. Massa yang terlibat dalam aksi damai ini adalah organisasi mahasiswa dan beberapa NGO serta Gereja. (*Laporan SKPKC FP/www.fransiskanpapua.net, Cepos, tabloidjubi.com dan suarapapua.com*)

Pada keesokan harinya, 9 Oktober, SKP HAM Papua menggelar konferensi pers terkait pembubaran paksa oleh pihak kepolisian dari aksi damai SKP HAM Papua. Jumpa pers ini dilakukan di Kantor KontraS Papua, Jayapura. (*Laporan SKPKC FP, Cepos, tabloidjubi.com, suarapapua.com*)

18 November

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua menggelar doa arwah bagi korban penembakan di Paniai, 8 Desember 2014. Ibadah ini dilaksanakan di Aula STFT Fajar Timur Padang Bulan, Jayapura, Rabu (18/11). Ibadah ini dipimpin oleh Pater Timotius Sefire, OFM. (*Laporan SKPKC FP/www.fransiskanpapua.net*)

8 Desember

Perayaan mengenang peristiwa Paniai Berdarah 8 Desember 2014

dilaksanakan di Aula STFT Fajar Timur. Kegiatan diisi dengan ibadah bersama, nonton dan diskusi film tentang Paniai Berdarah dan konferensi pers. Di dalam konferensi pers, SKP HAM Papua mendesak kepada para pemangku kepentingan agar segera menuntaskan kasus Paniai Berdarah tersebut. (*Laporan SKPKC FP/ www.fransiskanpapua.net*)

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang berjanji mengungkap kasus Paniai dipertanyakan oleh DPR Papua. Anggota DPR Papua Laurenz Kadepa pada Senin (7/12) mengatakan, komitmen Joko Widodo untuk mengungkap pelanggaran HAM di Papua, khususnya kasus Paniai adalah omong kosong dan belum dibuktikan. Sudah satu tahun kasus tersebut belum terungkap. Di tempat yang lain, SKP HAM Papua mengadakan peringatan satu tahun kejadian Paniai Berdarah di Aula STFT Fajar Timur Padang Bulan. Dalam konferensi pers pihak SKP HAM Papua meminta agar para pelaku penembakan segera diadili. (*Bintang Papua & Cepos*)

10 & 11 Desember

Massa yang tergabung dalam SKP HAM menggelar aksi damai untuk merayakan hari HAM dan mendesak penyelesaian kasus Paniai Berdarah. Aksi damai ini dilakukan di Kantor DPR Papua. Pada kesempatan ini ada beberapa tuntutan yang disampaikan, sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia harus memenuhi janjinya kepada rakyat Papua yang disampaikan pada Perayaan Natal Nasional, 27 Desember 2014 di Lapangan Mandala, Jayapura-Papua terkait menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Paniai, 8 Desember 2014.
- b. Bapak Presiden harus memerintahkan Komnas HAM RI segera mendorong KPP HAM yang sudah dibentuk untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku penembakan di Paniai.
- c. Komnas HAM RI jangan menjadikan otopsi dan kekurangan

dana sebagai alasan untuk tidak memproses para pelaku penembakan di Paniai. (*Laporan SKPKC FP*)

Massa yang tergabung dalam SKP HAM Papua melakukan aksi demo damai di Kantor DPR Papua untuk menagih janji Presiden Joko Widodo terkait pengungkapan kasus Paniai berdarah. Menurut Koordinator SKP HAM Peneas Lokbere, aksi damai ini dilakukan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo terkait pengungkapan kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014. Dalam pidatonya Gubernur Lukas Enembe pada Kamis (10/12) di Aula Sasana Krida, Jayapura, mengatakan peringatan hari HAM merupakan momentum bagi semua pihak untuk menghargai prinsip-prinsip dasar manusia. Pada kesempatan itu juga Gubernur Lukas Enembe meminta kepada pihak TNI dan Polri menerapkan standar HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. (*Cepos & Bintang Papua*)

14 Desember

Tokoh agama dan penggiat HAM Papua Pastor Jhon Jonga Pr, pada Jumat (11/12) di Wamena menilai bahwa sudah satu tahun berlalu pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya kasus pelanggaran HAM di Paniai. (*Cepos*)

3. BENTROK WARGA

2 Januari

Dua suku di Nabire saling serang tepatnya di Jalan Sarera Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Peristiwa ini mengakibatkan dua orang terluka. Salmon Kogoya dan Lauris Adii mengalami luka panah di bagian paha. (*Cepos, Bintang Papua dan Suluh Papua*)

3 Februari

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay menyatakan konflik yang terjadi di Papua hanya ada dua macam, konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Sedangkan konflik horizontal antar warga sipil yakni antar suku maupun antar warga. (*Bintang Papua*)

Salah satu tokoh agama di Distrik Nabire Barat Pdt. Albert Kegou meminta kepada pihak kepolisian untuk mencari akar permasalahan bentrok antara suku Mee dan suku Dani yang terjadi pada 31 Januari di Jalan Sarera Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. (*Bintang Papua*)

27 Januari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin mengatakan pihak kepolisian telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dan memeriksa enam orang lainnya dalam pertikaian antar warga di Timika, Kabupaten Mimika. (*Suluh Papua*)

10 Februari

Komandan Lantamal XI Merauke Brigen TNI (Mar) Buyung Lalana membantah kalau anggota marinir dari pos pengamanan PT. Korindo di Maam Distrik Bade, Kabupaten Mappi menembak dua warga sipil. Buyung mengakui bahwa anggotanya mengeluarkan tembakan tetapi mengarah ke atas, bukan mengarah ke warga. (*Bintang Papua*)

14 Februari

Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar mengutuk keras aksi penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Rabu (11/2) malam di Jalan Serui-Saubeda yang menewaskan seorang warga Sony Rumbiak. Ia meminta kepada Kapolres Kepulauan Yapen untuk mengungkapkan pelaku penembakan tersebut. (*Suluh Papua & Cepos*)

3 Maret

Warga dari Ikatan Keluarga Toraja mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap dan menuntaskan beberapa kasus kriminal, seperti pemerkosaan di Keerom dan Waena, termasuk kasus pembunuhan, yang dialami oleh warga IKT yang hingga kini belum ada titik terangnya. (*Cepos*)

9 Maret

Dewan Adat Papua Kabupaten Yapen meminta aparat penegak hukum dan Kapolres Kepulauan Yapen untuk segera mengungkap kasus penembakan warga yang terjadi beberapa waktu lalu. (*Suluh Papua*)

Masyarakat adat Marind Imbuti menuntut agar TNI-AL khususnya personel marinir yang ditempatkan di Bandara Mopah agar ditarik oleh institusi yang bersangkutan. Tuntutan ini disampaikan secara tertulis yang dituangkan dalam spanduk dan poster. Aksi demo ini dilakukan pada saat kunjungan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan bersama ke Kabupaten Merauke pada 8 Maret 2015. (*Bintang Papua*)

13 Maret

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fansen Siahaan melarang pejabat di lingkungan Kodam Cenderawasih untuk membawa senjata api ketika berkunjung ke daerah. Hal ini dimaksudkan agar menghindari terjadinya insiden tertembaknya warga sipil seperti yang terjadi di Bandara Mopah, Merauke. (*Bintang Papua & Cepos*)

Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya memberikan bantuan dana Rp 5 miliar dan beras 5 ton untuk 150 kepala keluarga korban konflik di Distrik Prime dan Indawa. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalon. (*Cepos*)

16 Maret

Pihak Polres Kepulauan Yapen menduga ada puluhan senjata api berkaliber tinggi yang diselundupkan ke wilayah hukum Polres Kepulauan Yapen. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Aziz Andriyansyah mengatakan penelusuran dugaan penyelundupan senjata api dari PNG dan Filipina dan masih mencari tahu kebenarannya. (*Cepos*)

17 Maret

Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk KPP HAM untuk mengusut penembakan warga sipil di Paniai pada 8 Desember 2014, yang menewaskan lima orang warga sipil. (*Suluh Papua*)

19 Maret

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Herman meminta Kapolda Papua untuk melakukan langkah hukum yang tegas dan dapat memproses pihak-pihak yang terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum. Ia juga menanyakan kasus penembakan warga sipil di Paniai 8 Desember tahun 2014 dan diharapkan segera menyelesaikannya. (*Cepos*)

15 Desember

Terjadi bentrok warga di Distrik Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya, Minggu (13/12). Akibat bentrok ini sebanyak 6 warga mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi karena warga dari Kampung Woken tidak mengendalikan diri dalam proses perdamaian yang dilakukan. Proses perdamaian dilakukan warga Woken dengan memotong 12 ternak babi tanpa seizin keluarga dari Alm. Seolok Hilapok yang dimakamkan. (*Cepos*)

4. REKONSILIASI

5 Januari

Ketua DPR Papua Yunus Wonda berharap kepada seluruh

masyarakat Papua agar tidak ada lagi istilah pesisir dan gunung yang bisa memecah belah persatuan untuk membangun Papua menjadi aman, damai, dan sejahtera. Meski ia berasal dari pegunungan namun tanggung jawabnya harus melihat semua masyarakat yang ada di Papua. (*Bintang Papua*)

6 Januari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin mengakui adanya perbedaan pandangan dalam memahami kekerasan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM antara kepolisian dengan Komnas HAM. Maka pihaknya memandang perlu adanya diskusi antara kepolisian dan Komnas HAM dalam menyeragamkan pemahaman HAM. (*Cepos*)

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin mengatakan bahwa hampir 50% kasus kriminal yang terjadi di Papua diselesaikan secara adat atau kekeluargaan. Hal ini didapat dari data kasus pada tahun 2014 yang berjumlah 2.496 kasus sedangkan yang diselesaikan secara adat berjumlah 1.001 kasus. (*Cepos*)

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Pdt. Lipius Biniluk mendukung langkah tegas untuk menindak oknum aparat keamanan yang menjual senjata maupun amunisi kepada kelompok sipil bersenjata di Papua. Hal ini juga menjadi refleksi bagi pihak aparat keamanan. (*Cepos & Bintang Papua*)

7 Februari

Komandan Panglima Tertinggi TPN-OPM Okiman Puron Wenda menegaskan WPNCL, WPH, PNWP, NRWP dan pimpinan politik yang berbicara untuk membentuk negara bagian atau federal agar segera berhenti melakukan aktifitas dan pembicaraannya. Menurut Puron pihak OPM yang berhak penuh menentukan bentuk negara yang merdeka di negara Papua Barat. (*Suluh Papua*)

9 Februari

Masyarakat bersama Tim Investigasi Kasus Pembakaran Eskavator di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya meminta agar pembangunan jalan Popome-Balingga-Kuyuwage-Andugme-Puncak segera dibuka kembali. Hal ini disepakati dari hasil pertemuan antara Tim Investigasi yang dipimpin Deerd Tabuni bersama masyarakat dari 18 kepala kampung, kepala suku, Pemerintah Lany Jaya, TNI/Polri dan tokoh agama siap untuk menindak tegas terhadap gangguan pembangunan di daerah tersebut. (*Cepos*)

10 Februari

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mendukung sejumlah LSM yang memperjuangkan HAM di tanah Papua yang sampai saat ini kasusnya belum selesai. Baik pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua maupun aparat pemerintah dan aparat keamanan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhamad. (*Suluh Papua*)

20 Februari

Warga yang tergabung dalam tiga suku besar pegunungan Papua yakni Moni, Mee dan Amungme menggelar prosesi adat yang disebut 'cuci darah' di Kompleks Jayanti, Kampung Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana pada 18 Februari 2015. Prosesi 'cuci darah' sebagai bentuk penyucian diri dari segala noda dan kutukan darah, pasca perang suku antar dua kelompok warga yang pernah terjadi di daerah itu. (*Cepos*)

16 & 17 Maret

Keluarga Besar Mahasiswa Uncen Jayapura tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi untuk memperingati peristiwa 16 Maret 2006 atau Abepura berdarah. Terkait dengan kegiatan tersebut Wakil Ketua Natalis Goo menghimbau masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan

tersebut. (*Bintang Papua*)

Memperingati sembilan tahun kasus Uncen Berdarah, mahasiswa Uncen Jayapura melakukan aksi demo damai. Mereka meminta tidak boleh ada aktivitas dalam kampus guna menghargai peristiwa yang terjadi pada sembilan tahun lalu itu, dan meminta pihak kampus mendirikan tugu peringatan insiden tersebut. (*Cepos*)

7 Juli

Tragedi kemanusiaan Biak Berdarah pada 6 Juli 1998 masih dikenang oleh Papua. Dalam peringatan tragedi tersebut, SKP HAM mengeluarkan tiga rekomendasi antara lain: *Pertama*, mendesak adanya pengakuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap tragedi Biak Berdarah dan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan cara membentuk pengadilan ad hoc. *Kedua*, adanya jaminan keamanan dan segera membuka ruang gerak demokrasi bagi rakyat sipil Papua dan media internasional untuk masuk ke Papua. Dan, *ketiga*, mendesak Presiden Joko Widodo segera memberikan memo atau catatan resmi kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk merasionalisasi jumlah pasukan organik dan non organik yang berlebihan di tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SKP HAM Peneas Lokbere di Kantor KontraS Papua dalam siaran pers. (*Cepos*)

20 Juli

Menyikapi kejadian Tolikara, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Janus Pangaribuan mengundang sejumlah tokoh dan pimpinan agama menggelar rapat di Kanwil Agama Papua pada Sabtu (17/7). Dalam pertemuan ini ada enam kesepakatan yang dihasilkan seperti permohonan maaf kepada seluruh umat beragama, menyesal terjadinya kebakaran mushola, mendesak pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut, menghimbau kepada seluruh umat beragama di Papua tetap tenang dan mendesak agar aparat keamanan meredakan suasana dengan tindakan tegas tanpa kekerasan. Di tempat yang lain, Kapolri Jendral Pol. Badrodin

Haiti menegaskan bahwa situasi di Tolikara, khususnya di Karubaga sudah kondusif. Selain itu Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo menuturkan bahwa masyarakat dan umat kristiani Tolikara tidak melarang umat islam untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Korban luka tembak: Amaten (di lengan kiri), Aitelur Yanengga (paha kanan), Emison Pagawa (paha kanan), Aleri Wenda (paha kiri), Ailes Wenda (paha kanan), Edinus Jikwa (paha kanan), Gasibulu Yikwa (paha kanan), Patenus Wanimbo (paha kiri), Geradus Kogoya (paha kiri) dan Igamin Yikwa (paha kanan). (*Cepos*)

21 Juli

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe pada Selasa (20/7), mengharapkan semua pihak menahan diri terkait peristiwa di Karubaga, Tolikara (17/7). Selain itu Lukas meminta agar media tidak mengekspos berita secara berlebihan. Terkait dengan peristiwa itu empat korban penembakan yang dirawat di RSUD Wamena mulai membaik. Mereka adalah Emison Pagawa terkena luka tembak di tangan kiri, Aleri Wenda kena luka tembak di paha kiri, Alies Kogoya mengalami luka tembak di paha kiri dan Yatenus Wenda mengalami luka tembak di paha kanan. (*Cepos*)

23 Juli

Warga Kampung Nafri, Kota Jayapura melakukan aksi pemalangan jalan Abepura-Keerom. Aksi ini dilakukan karena masyarakat tidak setuju dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian melakukan kekerasan karena ada perlawanan dari seorang warga Nafri yang melakukan pemalangan jalan. Aksi pemalangan ini akhirnya reda karena adanya negosiasi antara pihak kepolisian, kepala suku dan masyarakat. Walaupun demikian masyarakat tetap meminta ganti rugi dan warga yang ditahan atas nama Lucky Awineru dilepaskan dari tahanan. (*Cepos*)

24 Juli

Ketua NU Papua Tony Wanggai meminta agar Ormas Islam

di luar Papua tidak mencampuri urusan di Papua, khususnya berkaitan dengan kejadian Karubaga, Tolikara (17/7). Lebih lanjut Tony mengatakan, ormas di Papua dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dikatakan karena ormas Islam di luar Papua tidak paham dengan masalah sejarah, psikologis, sosial dan budaya di Papua. Hal ini dikatakan oleh Tony setelah mengikuti pertemuan di Kantor FKUB Provinsi Papua pada Kamis (23/7). Pada pertemuan tersebut, FKUB akan membentuk tim investigasi ke Tolikara. (*Cepos*)

22 Desember

Menanggapi kelompok radikal yang mulai beraksi di Papua, Ketua NU Papua Tony Wanggai angkat bicara. Menurut Tony, kelompok ini sudah mulai beraksi di Koya Barat dan kalau mengganggu kerukunan umat beragama sebaiknya dikirim pulang ke kampungnya masing-masing. (*Bintang Papua*)

23 Desember

Pihak Polda Papua menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah dan para tokoh agama terkait berita hadirnya kelompok radikal di Papua. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Rudolf Albertus Roja di Gedung Rasta Samara Polda Papua pada Selasa (22/12). Ketua FKUB Papua Pdt. Lipius Biniluk mengatakan, hendaknya setiap agama saling menghargai dan menghormati. Hal yang sama dipertegas oleh Ketua MUI Papua Saiful Islam Al Payage. Al Payage menghimbau agar umat muslim di tanah Papua menjaga toleransi antar umat beragama. (*Cepos*)

5. DIALOG

7 Januari

Anggota Komisi I DPR Papua Ruben Magay mendukung pemerintah pusat menggelar dialog damai Jakarta-Papua seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung

ke Papua. (*Suluh Papua*)

9 Januari

Dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen dan Pengamat masalah sosial politik Papua Marinus Yaung mengatakan, dialog yang melibatkan OPM itu harus jelas OPM yang mana. Apakah OPM yang berjuang untuk mempertahankan idelogi Papua merdeka atau OPM peliharaan negara/Kelompok milisi berkedok OPM atau OPM cari makan yang sering menjual isu Papua merdeka. (*Bintang Papua*)

31 Januari

Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendesak Presiden RI untuk merealisasikan agenda dialog untuk menemukan solusi yang tepat bagi persoalan di Papua. Jika dialog yang dimaksud dapat membawa penyelesaian masalah dan persolan di Papua sebaiknya segera dilakukan dialog tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Niolen Kotouki. (*Suluh Papua*)

27 Februari

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan bahwa pihaknya siap mengawal dan memfasilitasi dialog Pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. (*Cepos*)

28 Februari

Anggota Komisi I DPR Papua Emus Gwijangge mengaku mendukung dialog pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Untuk pelaksanaan dialog Emus mengharapan model dialognya seperti rakyat Aceh dengan pemerintah di Helsinki, Finlandia. (*Cepos*)

6 Maret

Staf Khusus Sekretaris Kabinet Jaleswari Pramodhawardani

mengatakan Joko Widodo akan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pada Maret, Presiden akan melakukan kunjungan ke Papua untuk menegaskan bahwa dialog adalah kunci untuk menyelesaikan masalah Papua. (*Bintang Papua*)

11 Maret

Jaringan Damai Papua (JDP) menyampaikan apresiasi kepada semua pihak karena Dialog Jakarta-Papua sudah menjadi wacana publik. Banyak pihak sudah mulai membahas tentang dialog Jakarta-Papua. Koordinator JDP Pater Neles Tebay mengatakan pihaknya melihat dialog Jakarta-Papua sudah tidak lagi sesuatu yang tabu atau menakutkan. Orang sudah tidak takut lagi berbicara dialog Jakarta-Papua. Kini setiap orang menyadari bahwa dialog menjadi sarana kunci untuk menyelesaikan konflik di Papua. (*Cepos*)

20 Maret

Koordinator JDP Pater Neles Tebay mengatakan upaya dialog Papua-Jakarta disebut sebagai penawar berbagai persolan di Papua. Proses dialog ini dimulai dengan dialog internal untuk menyaring seluruh aspirasi dari kelompok masyarakat dalam konsep perdamaian. Dialog internal ini akan merumuskan apa saja yang akan dibahas dalam dialog Papua-Jakarta sebab selama ini diakui kebanyakan orang berbicara soal dialog namun tidak tahu persis substansi apa yang akan dibahas. (*Cepos, Bintang Papua & Suluh Papua*).

19 Mei

Ketua KPUD Keerom Bonafasius Bao akhirnya melantik 35 anggota DPRD Keerom yang terpilih pada Senin (18/5) di Aula Kantor Perbatasan dan Kerja Sama Keerom. Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslu Hubertus Kwambre dan Kapolsek Arso AKP Daniel P. (*Bintang Papua*)

1 Juni

Ketua MRP Timotius Murib di Jayapura mengajak seluruh komponen masyarakat Papua untuk mendukung dialog yang sedang digagas tokoh-tokoh masyarakat Papua dengan para penggagas dialog Jakarta-Papua yang dimediasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP). Selanjutnya dikatakan bahwa dapat dipastikan sebelum dialog Jakarta-Papua digelar, akan digelar dialog lokal Papua pada Agustus 2015 mendatang. Menurutnya versi dialog yang disampaikan ke presiden tentu berbeda, namun ada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat yang selama ini melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan dialog sebagaimana diinginkan presiden. Pihak MRP menyerahkan sepenuhnya tahapan dialog ke JDP untuk mengatur semua hal-hal teknis terkait dialog yang dimaksudkan. (*Bintang Papua*)

14 Juli

Dalam pertemuan para imam diosesan se-Tanah Papua pada 30 Juni – 5 Juli 2015 di Jayapura, para pastor dari lima keuskupan di Papua (Keuskupan Timika, Manokwari Sorong, Jayapura, Asmat dan Keuskupan Agung Merauke) merekomendasikan penyelesaian masalah Papua melalui dialog. (*Cepos & Bintang Papua*).

25 Agustus

Koordinator JDP Pater Neles Tebay Pr, pada Senin (24/8) di Hotel Grand Abe, mengatakan persoalan yang terjadi di Papua dapat dicari solusinya melalui komunikasi atau dialog antara pihak yang berkonflik. (*Bintang Papua*)

20 November

Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan JDP menggelar pertemuan eksploratif ke-7 di Bogor pada 17-19 November. Koordinator JDP Pastor Neles Tebay mengatakan,

tujuan pertemuan ini adalah mendiskusikan akar masalah politik, hukum, keamanan dan HAM di Papua sebagai masukan dalam rangka mewujudkan Papua Tanah Damai. (*Cepos*)

BAB 5

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

5 Januari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Patrige Renwarin mengungkapkan, motif pelaku penembakan terhadap dua anggota Brimob pada 1 Januari sampai sekarang masih diselidiki. (*Suluh Papua, Cepas dan Bintang Papua*)

8 Januari

Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Sutarman rencananya akan melantik Brigjen (Pol) Paulus Waterpauw menjadi Kapolda Papua

Barat di Mabes Polri, Jakarta, seperti dilansir Rakyat Merdeka Online/RMOL. (*Suluh Papua*)

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende merencanakan untuk membongkar gubuk-gubuk pendulang emas ilegal di Timika. (*Cepos*)

9 Januari

Rencana Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende untuk membongkar gubuk-gubuk pendulang emas mulai dari Timika, Nabire, Paniai, Deiyai dan Dogiyai ditanggapi Ketua Dewan Adat Paniai John Gobay. Menurut Jhon, apa yang dihasilkan dari tambang tradisional itu digunakan untuk menghidupi keluarga bukan untuk membantu pihak yang berseberangan dengan NKRI. (*Cepos*)

12 Januari

Ketua Badan Pengurus Institute Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahu mengatakan, sepanjang tahun 2014 oknum kepolisian adalah pelaku penyiksaan dalam proses penyelidikan. Dari 36 kasus terkait penyiksaan, 33 kasus di antaranya melibatkan anggota kepolisian baik di tingkat sektor, resor maupun datasekmen khusus. (*Bintang Papua*)

22 Januari

Kelompok TPN/OPM menembak dua warga karyawan swasta PT. Nirwana di Kampung Popome, Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya sekitar pukul 06.00 WIT. Dua korban bernama Gurik Murib (25) dan Markus (26). (*Bintang Papua*)

23 Januari

Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengklaim mereka mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang menjadi utusan untuk berdialog dengan Presiden RI. Hal ini disampaikan oleh Komando Pimpinan

Tertinggi TPN-OPM wilayah Lapago Puron Wenda dan Enden Wanimbo. (*Suluh Papua*)

31 Januari

Ketua Pemuda Pancasila Kota Jayapura Kondrad Tukayo mengatakan, militer ada untuk menjaga keamanan dan melindungi rakyat. Jangan mengeneralisir persoalan-persoalan untuk meminta militer ditarik dari Papua. Karena daerah-daerah lain di Papua membutuhkan keamanan dan kenyamanan dengan adanya militer. (*Suluh Papua*)

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses Siahaan, Merauke, pada Jumat (30/1) mengatakan, lima oknum anggota TNI yang melakukan penjualan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata pada Rabu (28/1) akan dipecat dengan tidak hormat sebelum ada putusan pengadilan. (*Cepos*)

3 Februari

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses Siahaan mengungkapkan pihaknya telah mengerahkan sebanyak 2.657 Bintara Bina Desa (Babinsa) menjadi penyuluh pertanian guna mensukseskan program ketahanan pangan nasional di wilayah Papua dan Papua Barat. (*Bintang Papua*)

27 Februari

Sekitar 3.050 personel gabungan TNI AD, AL, dan AU serta 1.050 personel Polri dikerahkan untuk pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Menurut pihak Kodam, pengamanan digelar mulai dari bandara Sentani hingga lokasi pelaksanaan kongres KNPI di GOR Cenderawasih, Jayapura. (*Suluh Papua*)

9 Maret

Masyarakat adat Marind Imbuti menuntut agar TNI-AU yang ditempatkan di Bandara Mopah, Merauke ditarik kembali oleh

institusi yang bersangkutan. Tuntutan ini disampaikan ketika masyarakat melakukan aksi demo damai dalam kunjungan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ke Kabupaten Merauke pada 8 Maret 2015. (*Bintang Papua*)

13 Maret

Lima oknum anggota Kodam XVII/Cenderawasih yang diduga terlibat dalam penjualan amunisi kepada KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) secara internal sudah diberhentikan. Hal ini disampaikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses G. Siahaan. (*Cepos*)

19 Maret

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta Kapolda Papua untuk melakukan langkah hukum yang tegas dan dapat memproses pihak-pihak yang terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum. Ia juga menanyakan kasus penembakan warga sipil di Paniai 8 Desember tahun 2014 dan meminta agar segera diselesaikan. (*Cepos*)

25 Maret

Satuan Tugas Khusus Puncak berhasil mengamankan seorang pria berinisial LM (24) yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap April Wakerkwa (43), seorang PNS Bappeda Kabupaten Puncak pada 20 Maret 2015. Di tangan pelaku pihak keamanan mengamankan sepucuk pistol dan 10 butir peluru. Hal ini dibenarkan oleh Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Teguh Puji Raharjo. (*Cepos*)

27 Maret

Hakim Pengadilan Militer III Jayapura memutuskan tiga anggota TNI yang terlibat dalam penjualan amunisi kepada KKB diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini disampaikan oleh Hakim Letkol Laut (KH) Ventje Bulu didampingi Hakim Anggota

Letkol Laut (KH) Asep dan Mayor CHK Ahmad Jailanie. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

28 Maret

Amesti International menyebutkan empat pelajar yang disiksa oleh oknum polisi di sekitar Pasar Cikombong, Kotaraja, Distrik Abepura Kota pada 18 Maret 2015, tiga diantaranya masih anak-anak. Oleh karena itu Amnsety Internasional menyerukan kepada pihak berwenang untuk menjamin keamanan Eldi Kogoya, Timotius Tabuni, Lesman Jigibalom dan Mies Tabo. Dan mendesak pihak berwenang untuk memastikan keempat pelajar tersebut memiliki akses kepada segala bantuan serta meminta untuk sesegera mungkin untuk melakukan investigasi yang independen dan efektif terhadap tindakan penyiksaan dan mempertanggung jawabkannya secara hukum. (*Suluh Papua*)

30 Maret

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya mengusulkan ke Mabes Polri untuk membentuk empat Polres di wilayah hukum Polda Papua Barat. (*Bintang Papua*)

Kepala Divisi Pemasyarakatan Hukum dan HAM Papua Yohan Yarangga mengatakan, Lamet Madai dan Yos Wandikbo, tahanan dari Lapas Klas II Abepura, melarikan diri dari Lapas Abepura. (*Suluh Papua*)

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya mengusulkan ke Mabes Polri untuk membentuk empat Polres di wilayah hukum Polda Papua Barat. (*Bintang Papua*)

1 April

Proses dialog terkait rencana pembangunan Mako Brimob

Wamena tidak berjalan lancar karena hampir terjadi keributan di Gedung DPRD Jayawijaya. Dialog ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Soleman Elosak. Dalam pertemuan tersebut utusan masyarakat yang hadir bersepakat menolak pembangunan Mako Brimob di Wamena. (*Cepos dan Suluh Papua*)

10 April

Lima anggota TNI yang diduga terlibat dalam penjualan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata direncanakan akan disidangkan pada hari ini. Kelima anggota TNI tersebut adalah Sertu NHS (24), Pratu S (27), Pratu RA (29), Serma (39) dan Sertu MM (46). Panglima Daerah Militer Franses Siahaan di Makodam Cenderawasih pada Kamis (9/4) mengatakan, akan mendorong proses hukum terhadap kelima anggota TNI tersebut. (*Cepos*)

28 April

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo pada Senin (27/4) di Wamena menegaskan bahwa pembangunan Mako Brimob tetap dilaksanakan. Menurut Wempi, ia belum menerima keberatan dari masyarakat di 40 distrik dan 228 kampung serta 4 kelurahan di Kabupaten Jayawijaya. (*Cepos*)

6 Mei

Pihak Satgas Yonif 323/Raider berhasil menggagalkan penyelundupan ganja sebesar 4,7 Kg di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Dua warga yang diamankan adalah warga PNG. (*Cepos*)

7 Mei

Pihak Polda Papua akan terus mengejar kelompok KKB di beberapa daerah rawan seperti Nabire dan Paniai. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige pada Rabu (6/5) di Mapolda Papua. (*Cepos & Suluh Papua*)

Dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua, pihak keamanan terus melakukan persiapan. Persiapan itu seperti menempatkan 12 tim sniper di tujuh lokasi. (*Cepos, Suluh Papua & Bintang Papua*)

8 Mei

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu pada Rabu (6/5), mengungkapkan penanganan situasi keamanan di Papua secara militer harus diubah dengan cara lainnya. Menurut Pasaribu pihak TNI harus diminimalkan cukup menjaga wilayah perbatasan sedangkan masalah ketertiban dan keamanan masyarakat diserahkan pada pihak kepolisian sehingga tidak menimbulkan konflik di Papua. (*Bintang Papua*)

9 Mei

Pihak Polda Papua berhasil menangkap dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian senjata api jenis pistol revolver dan 12 butir peluru milik direktur pengamanan obyek vital Polda Papua. Dua orang tersebut berinisial BA (18) dan OK (22). (*Cepos*)

15 Mei

Pihak Polres Mimika pada Minggu (10/5) mengamankan dua senjata api rakitan dan puluhan amunisi di Jalan Cenderawasih Mimika. Pemasok senjata tersebut berasal dari Maluku melalui jalur laut. Dua senjata itu berjenis SS1 dan jenis revolver, sedangkan 32 butir amunisi berkaliber 3,2 milimeter dan 5,56 milimeter. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin, dua tersangka yang ditahan sekarang adalah berinisial LJ (31) dan YR (47). Keduanya diduga sebagai pemasok senjata dari Maluku ke Papua. (*Kompas, Cepos*)

1 Juli

Sebanyak 261 anggota Polda Papua Barat perwira dan bintara mendapat kenaikan pangkat satu tingkat. Upacara kenaikan

pangkat ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Paulus Waterpauw pada Selasa (30/6) di Mapolda Papua. (*Cepos*)

1 Agustus

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende diganti oleh Kapolda Papua baru Brigjen Pol. Paulus Waterpuw. Pelantikan ini dilakukan oleh Kapolri Jendral Badrodin Haiti pada Jumat (31/7) di Aula Rupatama Mabes Polri Jakarta. (*Bintang Papua & Cepos*)

5 Agustus

Dua pelaku pencurian senjata api jenis revolver dan 4 butir peluru milik anggota polisi Aiptu Imam Masturi dilumpuhkan oleh tim Reskrim Polres Nabire pada Senin (3/8) di Jln. Tigi, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire. Kedua pelaku tersebut berinisial MS (46) dan RM (37). (*Bintang Papua*)

13 Agustus

Kodim 1709/Yawa Letkol Inf. Tamimi Hendra Kesuma bersama Pemkab Kepulauan Yapen mengunjungi markas OPM di Kampung Sasawa, Yapen pada Selasa (11/8). Dalam kunjungan tersebut mereka memberikan bantuan kepada masyarakat setempat. Menurut Letkol Inf. Tamimi Kesuma, momen HUT RI sebaiknya dijadikan untuk menyatukan kehidupan bangsa dan bernegara. (*Cepos*)

15 Agustus

Dua pucuk senjata jenis SSI milik Paskhas TNI AU Pam Rawan di Enarotali, Kabupaten Paniai dikabarkan hilang karena dicuri oleh OTK (Orang Tidak Dikenal) dari Pos Paskhas TNI AU Enarotali pada Jumat (14/8). Menurut informasi yang diperoleh pencurian ini dilakukan ketika anggota sedang tidur pada 04.30 WIT. (*Bintang Papua & Cepos*)

Seorang anggota TNI Yonif 751/Rider Sentani Serda Doni

Apriyani dilaporkan meninggal dunia pada Kamis (13/8) karena mendapat hukuman yang berlebihan dari tiga seniorinya. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Teguh Raharjo membenarkan kejadian tersebut dan para pelaku sudah menjalani pemeriksaan di Pomdam XVII/Cenderawasih. (*Cepos*)

19 Agustus

Ketiga pelaku yang menyebabkan Serda Doni Apriyani meninggal dunia karena memberikan hukuman yang berlebihan (AP, AS dan S) dinonaktifkan dari tugasnya. Ketiganya masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Pomdam XVII/Cenderawasih. (*Cepos*)

20 Agustus

Sebanyak 101 anggota Brimob Aceh dikirim ke Papua untuk melakukan pengamanan di daerah PT Freeport. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Pol. M. Husein Hamidi, di Banda Aceh pada Rabu (19/8) mengatakan, personel Brimob yang dikirim tersebut dibawa kendali operasi Polda Papua. (*Bintang Papua*)

22 Agustus

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses Siahhaan ketika meninjau lahan baru yang dibuka oleh TNI AD seluas 10.000 hektare di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada Jumat (21/8) menegaskan kehadiran TNI di masyarakat adalah untuk membantu masyarakat membuka lahan sawah bukan untuk memiliki atau menguasai lahan ulayat masyarakat. (*Bintang Papua & Cepos*)

27 Agustus

Menanggapi penemuan 2.952 amunisi di Bandara Soekarno Hatta yang hendak dikirim ke Papua, anggota DPR Papua Laurens Kadepa pada Rabu (26/8) mengatakan, adanya usaha dari kelompok atau oknum tertentu mengarahkan perjuangan OPM ke isu teroris. Lebih lanjut Laurens mengatakan, sudah diketahui

publik bahwa selama ini ada oknum TNI/Polri yang menjual amunisi di Papua dan hal ini menjadi sebuah skenario untuk memulihkan nama baik institusi. (*Bintang Papua*)

28 Agustus

Serah terima jabatan dari Pangdam XVII/Cenderawasih lama Mayjen TNI Franses Siahaan kepada Pangdam XVII/Cenderewasih baru Mayjen TNI Hinsa Siburian di Mabes AD TNI pada Jumat (28/8). Acara ini akan dipimpin langsung oleh Kepala Staf AD Jendral TNI Mulyono. (*Cepos & Bintang Papua*)

29 Agustus

Anggota TNI dari Kodim 1710/Mimika dan Yonif 754/ENK menembak enam warga pada Jumat (28/8) di Koperapoka, Mimika. Dua warga Yulianus Okoware dan Imanuel Mairimau meninggal dunia. Terkait dengan peristiwa ini Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderewasih Letkol Inf Teguh Pudji mewakili Kodam Papua meminta maaf kepada korban dan keluarga atas kejadian tersebut. (*Cepos & Bintang Papua*)

Ketika digelar acara pengucapan syukur malam kesenian adat suku Kamoro dengan menampilkan acara “tifa duduk”, yaitu menabu tifa dalam posisi duduk/kadang berdiri sambil menyanyikan lagu adat dan menari, yang biasanya berlangsung semalam suntuk, pada Jumat (28/8) di Koperapoka, terjadi insiden penembakan oleh anggota TNI. Dua orang meninggal dunia dan empat orang luka-luka. Motif penembakan adalah balas dendam. Pelaku penembakan Serka Makher Rehata, Praka Gergorius S Beta, Sertu Ashar dan Prada Imanuel Imbiri. Korban yang meninggal Imanuel Herman Mairimau dan Yulianus Okoware. Sedangkan korban luka adalah Thomas Apoka, Martinus Imaputa, Moses Emepu dan Martinus Afukafi. (*Laporan SKP Keuskupan Timika*)

31 Agustus

Penglima Kodam XVII/Cenderewasih Mayjen TNI Hinsa Siburian berjanji akan memproses hukum anggota TNI yang melakukan penembakan di Koperapoka, Mimika. (*Bintang Papua*)

9 September

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw pada Selasa (8/9) di Jayapura mewajibkan kepada seluruh Kapolres di jajarannya agar turun ke lapangan guna menyelesaikan setiap masalah yang timbul di wilayah hukumnya. Dirinya menekankan bahwa setiap kali ada permasalahan maka penegak hukum wajib turun ke lapangan dan tidak mendelegasikan Wakapolres maupun perwira di bawahnya. (*Bintang Papua*)

22 September

Panglima Komandan XVII/Cenderawasih Hinsa Siburian pada Senin (21/9) di Mapolda Papua mengatakan bahwa terkait dengan perayaan Idul Adha di Tolikara, tidak ada penambahan pasukan. Pengamanan dilakukan oleh anggota yang ada di sana saja. Selanjutnya dikatakan kepada prajuritnya yang bertugas di seluruh jajaran Kodam XVII/Cenderawasih untuk tetap secara profesional bertugas di sana. (*Bintang Papua*)

2 Oktober

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige pada Kamis (1/10) di ruang kerjanya menegaskan bahwa pihaknya telah menahan empat oknum polisi terkait penganiayaan terhadap warga sipil dan penyalahgunaan senjata api hingga menewaskan seorang warga sipil yakni Kaleb Bagau di Kampung Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Keempat oknum polisi ini telah ditahan di Polres Mimika dan tetap akan diproses secara hukum. (*Bintang Papua*)

5 Oktober

Anggota DPR Papua Nason Uti di Jayapura menegaskan, bahwa pihaknya selalu mengingatkan aparat keamanan di Papua agar tetap mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua. (*Bintang Papua*)

6 Oktober

Gubernur Papua Lukas Enembe di Lapangan Silas Papare Makodam XVII/Cendrawasih pada Senin (5/10) mengharapkan agar TNI tetap terus menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua dan tidak menimbulkan eksekusi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. (*Bintang Papua*)

12 Oktober

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, di Mulia Kabupaten Puncak Jaya pada Minggu (11/10), menyampaikan bahwa untuk penanganan kelompok yang masih berseberangan paham dengan NKRI maka pihaknya berharap pemerintah daerah yang lebih meningkatkan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan kelompok-kelompok tersebut. (*Cepos*)

Komandan Satuan Brimob Polda Papua Kombes Pol. Mathias Fakhiri, di Lapangan Brimob Papua pada Sabtu (10/10) menyiapkan 250 personel untuk mengamankan jalannya Pemilu Kepala Daerah serentak di 11 Kabupaten Provinsi Papua. Penempatan anggota Brimob sesuai dengan permintaan para Kapolres di 11 kabupaten. (*Bintang Papua*)

5 November

Tim gabungan Polres Manokwari dan Polda Papua Barat membekuk seorang remaja penumpang kapal motor Kasuari Pasifik yang membawa 40 butir peluru senjata api laras panjang kaliber 5,56 milimeter pada Rabu (4/11). Kepala Resor Manokwari

melalui Kasat Reskrim Polres Manokwari AKP Hengky Kristanto Abadi membenarkan penangkapan tersebut dan sekarang pelaku masih diperiksa. (*Cepos*)

Terkait dengan maraknya kasus oknum TNI yang melanggar kedisiplinan berat sebaiknya dipecat dari kesatuannya dan kalau memang melanggar pidana dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini dikatakan oleh Kasad TNI Jendral TNI Mulyono dalam kunjungan kerjanya di Wamena pada Selasa (4/11). Pada kesempatan itu juga Kasad Jendral Mulyono mengingatkan kepada jajarannya agar tidak lagi melakukan penembakan terhadap rakyat Papua. Di tempat terpisah Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo pada Rabu (4/11) di Jakarta mengatakan, kejadian-kejadian TNI yang berkaitan dengan masyarakat, sidang militernya terbuka untuk publik. (*Cepos & Bintang Papua*)

7 November

Empat orang TNI yang melakukan penembakan terhadap warga sipil di Timika akan disidangkan mulai Senin (9/11) di Timika. Ketua Pengadilan Negeri Timika Dany Tulangow pada Jumat mengatakan sudah menerima surat dari pihak TNI untuk izin penggunaan ruang sidang dalam menggelar sidang tersebut. (*Bintang Papua*)

9 November

Tim gabungan Komando Satgas Pamantas RI-PNG berhasil mengamankan satu pucuk api Seg sauer automatic buatan Jerman dan puluhan butir amunisi ketika melakukan sweeping di Keerom pada Sabtu (7/11). Pemilik barang ini belum diketahui. (*Bintang Papua & Cepos*)

10 November

Komando Korem 174/ATM Merauke Brigjen TNI Supartodi pada Senin (9/11) di Timika mengatakan tidak ada intervensi dari pihak

manapun dalam proses persidangan terhadap empat anggota TNI yang melakukan penembakan di Koperapoka, Mimika. (*Bintang Papua*)

11 November

Pelaku penembakan warga di Koperapoka, Timika Serka Makher Rehata, Sertu Ashar, Praka Gregorius Bete dan Prada Imanuel Imbiri, dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari dinas TNI AD oleh Oditur Militer Letkol Laut (KH) Jeri EA Papendang. Keputusan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Timika. (*Bintang Papua*)

Pengadilan Militer akhirnya dapat terlaksana di Timika pada 9-20 November 2015. Sidang Pengadilan Militer, menggunakan Pengadilan Negeri Mimika sebagai tempat Persidangan Militer. Sidang dipimpin Letkol Laut (KH) Ventje Bulu sebagai Ketua Hakim dan didampingi oleh dua anggota hakim, masing-masing Letkol Laut (KH) Asep R H dan Mayor Chk Ahmad Jailanie. Ada empat orang prajurit yang terlibat dan dinyatakan sebagai tersangka-terdakwa, masing-masing: Serka Makher Rehata, Prada Gregorius S Beta, Sertu Ashar dan Pratu Imanuel Imbiri. Untuk mendapatkan keterangan, didatangkan 23 saksi untuk memberikan kesaksian. Para saksi terdiri dari para korban luka tembak, masyarakat sipil di sekitar lokasi, anggota kepolisian Polsek Miru, Pihak TNI (POM dan Intel) dan para medis baik dari RSUD Mimika maupun dari RSMM Timika. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang ada, maka para hakim memutuskan perkara. Bahwa, semua terdakwa DIPECAT dari Kesatuan dan dipenjarakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa Serka Makher Rehata, vonis pidana pokok 12 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 15.000,-
- b. Terdakwa Praka Gergorius S Beta, vonis pidana pokok 3 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari

TNI AD, denda Rp 10.000,-

- c. Terdakwa Sertu Ashar, vonis pidana pokok 9 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 15.000,-
- d. Terdakwa Prada Imanuel Imbiri, vonis pidana pokok 3 tahun penjara, pidana tambahan pemecatan dari TNI AD, denda Rp 10.000,-

(Laporan Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Timika)

12 November

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab, di Lapangan Makorem 172/PWY Waena pada Rabu (11/11) mengatakan TNI akan semakin kuat kalau ada keberpihakan rakyat dan sebaliknya TNI melemah jika tidak ada keberpihakan dari rakyat. *(Cepos)*

26 November

Menjelang tanggal 1 Desember yang biasa diperingati salah satu hari bersejarah di Papua, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw pada Rabu (25/11) di Mapolda Papua, mempersilahkan kelompok mana saja yang melakukan ibadah tetapi dilarang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan Upacara. *(Bintang Papua)*

7 Desember

Satu pucuk senjata api milik anggota Polres Lany Jaya Briпка YW dirampas oleh masyarakat sipil di Jalan BPD Lama, Trikora Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Jumat (4/12). Perampasan terjadi ketika Briпка YW mengkonsumsi miras bersama temannya YK di Jalan Trikora. Hal ini dibenarkan oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Rudolf Albert Rodja. *(Cepos & Bintang Papua)*

Kepolisian Daerah Papua mendapatkan bantuan satu buah pesawat dari Mabes Polri untuk membantu dalam pemantauan pengamanan Pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua.

Bantuan pesawat ini diharapkan bisa digunakan untuk mengirimkan pasukan jika ada wilayah yang membutuhkan pengamanan ekstra. Hal ini dikatakan oleh Wakapolda Papua Brigjen Rudolf Alberth Roja. (*Cepos & Bintang Papua*)

16 Desember

Kepala BIN Letjen Purn Sutyoso meminta kelompok-kelompok bersenjata agar segera kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk bersama dengan pemerintah membangun. Menurut Sutyoso pemerintah sungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu buktinya adalah pemerintah memberikan dana perimbangan untuk Papua cukup besar. Hal ini dikatakan oleh Sutyoso ketika melakukan kunjungan kerja pada Selasa (15/12) di Kabupaten Jayapura. (*Bintang Papua & Cepos*)

2. PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO BRIMOB WAMENA

19 Januari

Terkait pembangunan Mako Brimob, Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua Theo Hesegem mengatakan, penempatan Brimob di Jayawijaya hanya akan membawa dampak negatif bagi terjadinya pelanggaran HAM di Wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Menurutnya aparat keamanan yang ada sudah cukup. (*Cepos & Suluh Papua*)

28 Januari

Sejumlah Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Alam Semesta berasal dari Pegunungan Tengah menggelar demo di Kantor DPR Papua. Dalam aksinya mereka menolak pembangunan Mako Brimob di Wamena. (*Cepos & Bintang Papua*)

29 Januari

Kepala Suku Markus Lanny dan Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua wilayah Pegunungan Tengah menolak pembangunan Mako Brimob di Wamena. Menurut Markus wilayah Kabupaten Jayawijaya aman terkendali sehingga tidak perlu membangun Mako Brimob. (*Suluh Papua*)

Adanya rencana pembangunan Mako Brimob terus menuai protes. Anggota DPR Papua Yakoba Lokbere mengharapkan kepada para pengambil kebijakan di Kabupaten Jayawijaya agar melihat dari sisi kebijakan politik saat ini yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut Yakoba, tidak pernah mendengar kebijakan presiden untuk membangun Mako Brimob di wilayah Pegunungan Tengah. (*Cepos*)

30 Januari

Rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena mendapat penolakan dari warga. Namun, menurut Kapolres Jayawijaya AKBP Adolf Beay, pembangunan Mako Brimob itu dilakukan karena masyarakat maupun Pemda Jayawijaya menilai sudah waktunya dibangun di Wamena. Bahkan Kepala Suku Hubikiak menyetujui tempat di Hotel Honai Resort untuk ditempatkan satu kompi Brimob. (*Cepos & Bintang Papua*)

3 Februari

Beberapa kepala suku di Wamena (wilayah Hubikiak, Hubikosi, Kosilapok, Walilo-Hilapok) para aktivis, mahasiswa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) cabang Jayawijaya melakukan jumpa pers di Wamena. Dalam konferensi pers pada 1 Februari, seperti disampaikan oleh Markus Lanny, mereka menolak pembangunan Mako Brimob. (*Suluh Papua*)

6 Februari

Anggota DPR Papua Dapil VI Nioluen Kotouki mengatakan, masyarakat Papua Wilayah Jayawijaya menolak pembangunan Mako Brimob di Wamena. Penolakan ini dipertegas dengan pernyataan DPR Papua yang tidak memberikan rekomendasi pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya. (*Bintang Papua*)

7 Februari

Sekitar pukul 09.00 WIT massa yang tegabung dalam kelompok masyarakat, mahasiswa, gereja, pemuda, perempuan dan perwakilan warga pendatang melakukan demo di kantor DPRD. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan pembangunan Mako Brimob di Wamena. Koordinator FSRJ Soleman Itlay mengatakan, demo ini sebagai bentuk penolakan rencana pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya. (*Suluh Papua*)

9 Februari

Ketua Tim Investigasi Pembangunan Mako Brimob dari Komisi I DPR Papua H Syamsunar Rasyid pada 6 Februari berkunjung ke Jayawijaya dan melakukan audiensi dengan sejumlah masyarakat. Dalam audiensi tersebut ditemukan bahwa banyak masyarakat yang menerima dan ada yang menolak pembangunan Mako Brimob. (*Cepos*)

24 Februari

Pemerintah Daerah Jayawijaya tetap mengambil sikap tetap membangun Mako Brimob bahkan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo menegaskan, tidak akan ada orang yang dapat menghambat pembangunan Mako Brimob di Wamena. Menurut Wempi, apa yang dibicarakan itu untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan dirinya. (*Cepos & Suluh Papua*)

Ketua DPR Papua Yunus wonda kembali menegaskan penolakan terhadap wacana pembentukan Mako Brimob di Wamena, Jayawijaya. Ia menuding pembangunan Mako Brimob itu merupakan bagian dari strategis elit politik untuk memuluskan rencana pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Papua. (*Suluh Papua & Bintang Papua*)

26 Februari

Forum Masyarakat Jayawijaya (FMJ) kembali mendesak kepada DPRD Jayawijaya untuk segera membuka ruang dialog terkait pro-kontra pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya. (*Cepos*)

3 Maret

Pihak DPRD Jayawijaya belum bisa menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk mengadakan dialog terkait pro-kontra antara masyarakat dan Pemkab Jayawijaya mengenai pembangunan Mako Brimob. Hal ini disampaikan oleh Ketua sementara DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamallo. (*Cepos*)

4 Maret

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) cabang Kota Jayapura menolak pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya. Penolakan ini disampaikan Frans Takimai anggota PMKRI Kota Jayapura. Menurut Frans, pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya tidak memenuhi syarat sehingga keluarga besar PMKRI Kota Jayapura menolak dengan tegas pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya. (*Suluh Papua*)

10 Maret

Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Alam Semesta Papua melakukan aksi demo di DPR Papua. Mereka menuntut agar DPR Papua segera memfasilitasi pertemuan dengan Pemkab Jayawijaya, Pemerintah Provinsi Papua

dan Polda Papua terkait pembangunan Mako Brimob di Wamena. (*Suluh Papua*)

14 Maret

Dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh Komisi A DPRD Jayawijaya di tiga titik Woma, Welesi dan Assolokobal masih menuai beda pendapat. Ada kelompok yang menolak keras rencana pembangunan Mako Brimob dan ada sebagian warga yang menerima rencana pembangunan tersebut. Di Woma klen-klen yang memiliki hak ulayat menolak rencana pembangunan tersebut. (*Cepos*)

18 Maret

Forum Masyarakat Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua menolak pembangunan Mako Brimob dan meminta kepada DPRD di Jayawijaya agar lebih jeli dalam melihat masalah yang berkembang di masyarakat terutama di Jayawijaya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Forum Masyarakat Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua Muli Wetipo. (*Suluh Papua*)

13 Mei

Pihak Komisi A DPRD Jayawijaya belum mengambil keputusan terkait pembangunan Mako Brimob di Wamena. Ketua DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Latuihamailo pada Selasa (12/5) di ruang kerjanya mengatakan, tahapan yang harus dilakukan adalah meminta penjelasan langsung dari Kapolres Jayawijaya terkait tugas fungsi kepolisian dan Brimob. Pihak DPRD Jayawijaya akan membuka ruang dialog interaktif di RRI Wamena. (*Suluh Papua*)

19 Mei

Massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua menggelar aksi damai di halaman DPRD Jayawijaya pada Senin (18/5). Pada kesempatan tersebut massa mempertanyakan upaya tindak lanjut yang dilakukan DPR dalam memutuskan rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena.

Pihak DPRD Jayawijaya belum melanjutkan rencananya karena masih menunggu kajian tertulis dari Polres Jayawijaya untuk kehadiran Brimob. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua II DPRD Jayawijaya Soleman Elosak. (*Cepos*)

3. KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA

6 Januari

Direktorat Kriminal Umum Polda Papua yang bertanggungjawab terhadap penyelidikan kasus penembakan dan pembacokan terhadap dua anggota Brimob Sumsel dan seorang petugas sekuriti PT. Freeport Indonesia (1/1), telah melakukan olah TKP dan hasilnya bahwa senjata api yang digunakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menembak korban adalah jenis senjata laras pendek. Dugaan sementara pelaku penembakan adalah kelompok Ayub Waker. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin. (*Suluh Papua, Cepos dan Bintang Papua*)

7 Januari

Menurut Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende, paling tidak ada delapan pentolan KKB yang menjadi target operasi Polda Papua tahun 2015. Pihak kepolisian meyerukan agar kelompok-kelompok itu menyerahkan diri dengan senjata lengkap. (*Cepos*)

Sepanjang tahun 2014, kepolisian Daerah Papua telah kehilangan 20 pucuk senjata api yang dirampas oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Jumlah ini bertambah dengan dua pucuk senjata api yang dirampas oleh KKB dari tangan anggota polisi saat penembakan dan pembacokan dua anggota Brimob di Utikini, Kabupaten Timika. (*Cepos*)

8 Januari

Pasca penembakan dua anggota Brimob dan seorang karyawan PT

Freeport Indonesia, kepolisian menggelar operasi besar-besaran dengan menurunkan 1576 personil gabungan untuk mengejar pimpinan KKB Wilayah Timika Ayub Waker. Pada Selasa, 7 Januari kepolisian mengamankan 116 orang diduga anggota KBB. (*Suluh Papua dan Cepos*)

Tim Gabungan pasukan Brimob Polda Papua bersama Polres Timika dibantu TNI berhasil menangkap 13 orang anggota kelompok Ayub Waker, sebagai kelompok yang bertanggungjawab terhadap penembakan dua anggota Brimob dan satu sekuriti PT Freeport. Hal ini dibenarkan oleh Kapolda Irjen Pol. Papua Yotje Mende. (*Bintang Papua*)

9 Januari

Kelompok yang menamakan diri sebagai Pengurus West Papua Interest Association Andreas Wakerkwa menyatakan, pihaknya sangat kesal dengan tindakan aparat keamanan yang menangkap masyarakat pribumi tak berdosa di daerah Tenda Kuning, Kali Kabur, Mile 68, Tembapapura, yang merupakan lokasi areal penambangan PT. Freeport Indonesia. (*Bintang Papua*)

Kepolisian Daerah Papua menerima surat ancaman dari KKB pimpinan Ayub Waker. Surat ancaman itu dikirim ke Polsek Tembapapura menggunakan anak panah yang dilepaskan dari atas gunung oleh anggota KKB pada 7 Januari. Isi surat itu menegaskan bahwa perang akan terus dilakukan di Timika. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin. (*Cepos*)

10 Januari

Penangkapan terhadap 114 warga di Kampung Utikini, Distrik Tembapapura, Kabupaten Timika dinilai sebagai langkah yang keliru, karena tidak akan menyelesaikan masalah tetapi akan membuat persoalan baru. Hal ini ditegaskan oleh anggota DPR

Papua Nason Utti. Menurut Nason, pengejaran atau stigmatisasi separatis ini sebenarnya pengkondisian yang sengaja dimainkan sejak lama hanya untuk meredam warga sipil pemilik hak ulayat ketika mereka menuntut hak-hak mereka terhadap perusahaan raksasa PT Freeport. (*Cepos, Bintang Papua & Suluh Papua*)

12 Januari

Diduga melempari Pos Polisi Gorong-gorong, Kelurahan Koperapoka, Timika, seorang warga bernama Meky Nawipa (16) ditembak dengan peluru karet oleh aparat kepolisian yang sedang berjaga-jaga. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin. (*Cepos & Suluh Papua*)

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura AKBP Alfred Papare menilai bahwa aksi KKB di Kota Jayapura pada tahun 2015 akan semakin berkurang. Hal itu berdasarkan evaluasinya pada tahun 2014, tidak ada aktivitas KKB di Kota Jayapura. (*Cepos & Suluh Papua*)

13 Januari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende kembali mengultimatum kepada kelompok separatis yang membunuh dan merampas senjata dua anggota Brimob dan sekuriti PT Freeport Indonesia. Karena itu, Polda Papua terus melakukan pengejaran dan pemutusan logistik kepada kelompok tersebut. (*Cepos*)

Terkait dengan pemeriksaan orang yang ditahan karena diduga melakukan penembakan di Mimika, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin mengatakan bahwa pihaknya masih memeriksa 64 orang. Perlu diketahui bahwa sebenarnya ada 116 warga yang diamankan oleh Polda Papua karena memiliki kartu West Papua Interest, namun hanya 64 orang yang diduga kuat sebagai anggota kelompok kemerdekaan, selebihnya telah dipulangkan. (*Cepos*)

Tim Mabes Polri didatangkan ke Timika untuk melakukan pemeriksaan terhadap 64 orang yang diduga organisasi merdeka dan 13 orang yang diduga anggota Ayub Waker. Selain itu Reskrim Umum dan Intel Polda Papua diturunkan untuk melakukan analisa dan evaluasi terkait kasus penembakan terhadap dua anggota Brimob dan seorang sekuriti di Kampung Utikini, Kabupaten Timika. (*Bintang Papua*)

16 Januari

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Ausilius You bersama Komandan Korem (Danrem) 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Suparto mengunjungi 65 warga di ruang tahanan Polres Mimika. Ke-65 warga tersebut diamankan ketika terjadi penyisiran pasca penembakan dua anggota Brimob dan seorang sekuriti PT Freeport Indonesia. (*Cepos & Suluh Papua*)

Pihak kepolisian menetapkan 65 warga Timika, Kabupaten Mimika, dikenakan wajib lapor ke Polres Mimika terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan melanggar hukum. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende. (*Bintang Papua*)

20 Januari

Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri tidak mengkhawatirkan ancaman perang yang dinyatakan oleh KKB. (*Bintang Papua*)

26 Januari

Tim Khusus Polda Papua menangkap Wuyunga anggota kelompok kriminal bersenjata yang merupakan anak buah Puron Wenda yang beroperasi di Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Wuyunga ditahan di Mapolda Papua di Jayapura. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

27 Januari

Tiga anggota KKB pimpinan Purom Wenda ditangkap oleh Tim Khusus dan Direskrimum Polda Papua pada 24 Januari pukul 19.00 WIT di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Tiga orang tersebut berinisial UT (30), NW (19) dan UY (20) yang ikut serta dalam tiga kasus penembakan di Papua. Mereka ditangkap saat hendak membeli sembako. Hal ini dikatakan oleh Kapolda Irjen Pol. Yotje Mende. (*Cepos & Suluh Papua*)

28 Januari

Dari tiga anggota KKB pimpinan Puron Wenda yang ditangkap oleh Timsus Polda Papua di Wamena (24/1), dua orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, karena telah mengakui keterlibatannya di tiga peristiwa penembakan di Papua. (*Cepos & Suluh Papua*)

29 Januari

Pihak Polda Papua menangkap empat orang yang diduga menyimpan 500 butir amunisi. Tiga orang pelaku atas nama RW, AJ dan FK adalah warga sipil. Sementara satu orang lainnya adalah diduga anggota TNI. Mereka ditangkap di Papua Trade Center (PTC), Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Ratusan amunisi tersebut diduga dijual kepada tiga orang yang terlibat dengan KKB pimpinan Puron Wenda. (*Suluh Papua & Cepos*)

30 Januari

Kelompok kriminal bersenjata di Kampung Popome, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya (29/1), sekitar pukul 06.00 WIT menembak dua warga sipil Gurik Murib (25) dan Markus (26) serta membakar eskavator milik PT Nirwana. Sampai sekarang belum diketahui kelompok mana yang melakukan aksi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin. (*Suluh Papua, Bintang Papua & Cepos*)

Beberapa peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Papua terhadap KKB di Timika, Wamena, dan terakhir di PTC Entrop mendapat protes dari dua anggota DPR Papua yaitu Deer Tabuni dan Nioluen Kotouki. Menurut Deer Tabuni, khususnya penangkapan yang terjadi di Wamena (24/1) boleh dibilang ada konspirasi tertentu karena ketiga orang tersebut sedang santai. (*Cepos*)

Keterkaitan dengan berita bahwa kepemilikan 500 amunisi yang diduga adalah anggota KNPB, menurut Sekretaris I KNPB Pusat Mecky Yeimo, tindakan yang dilakukan oleh ketiga oknum yang tertangkap di PTC adalah oknum yang mengatasnamakan pribadi atau individu karena KNPB tak bertanggungjawab perbuatan mereka. (*Bintang Papua*)

31 Januari

Pasca penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap dua warga sipil di Kampung Popome, Kabupaten Lanny Jaya, hingga saat ini situasi sudah aman dan kondusif dan aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Kabupaten Lany Jaya Cristian Sohilait. Dalam evakuasi korban ditemukan sepucuk surat yang berisi tuntutan KKB untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan di Papua. Isi dari surat itu meliputi akses jalan tidak boleh tembus ke Balingga karena anggota TNI akan keluar masuk bebas dan permintaan untuk membebaskan tiga orang yang ditahan. (*Cepos*)

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses G. Siahaan menegaskan bahwa 5 anggotanya yang tertangkap terindikasi melakukan penjualan amunisi kepada KKB akan segera dipecah. (*Cepos*)

2 Februari

Komandan Tentara Pembebas Nasional Organisasi Papua

Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Lapago Purom Wenda menegaskan bahwa aksi pembakaran terhadap dua alat berat di Desa Popome, Balingga, Lanny Jaya pada 29 Januari merupakan peringatan agar Pemda tidak membuka akses jalan ke daerah tersebut. Pernyataan ini ditanggapi oleh Kapolda bersama Pangdam. Menurut mereka, tindakan tersebut adalah tindakan kriminal dan tindakan itu tidak benar. Karena, pihak keamanan tidak menuntut untuk membuka akses jalan ke tempat-tempat OPM. (*Cepos*)

Anggota DPR Papua Ruben Magai mengatakan, tertangkapnya tiga anggota yang diduga jaringan KKB di PTC Entrop, Kota Jayapura (28/1), yang diduga melibatkan anggota TNI akhirnya membuka semua konspirasi terhadap situasi yang terjadi selama ini di Papua. Ruben menjelaskan ada permainan kekuatan besar di negara ini hanya untuk memanfaatkan kondisi di Papua dengan menggunakan kekerasan seperti penembakan, penyerangan, dan pembunuhan hingga perampasan senjata. Selanjutnya membawa nama OPM sebagai pelakunya. (*Cepos & Suluh Papua*)

3 Februari

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses Siahaan menduga amunisi yang dimiliki oleh oknum TNI dan dijual ke KKB berasal dari negara Filipina dan daerah Aceh. Kondisi itu bukan hal yang baru tetapi diduga sudah lama dilakukan oleh oknum tersebut. (*Bintang Papua & Cepos*)

4 Februari

Kepolisian Daerah Papua siap menggerakkan Brimob untuk mendukung pengamanan pembangunan jalan hingga ke Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya. Pengamanan dilakukan karena adanya gangguan dari OPM pimpinan Purom Wenda. Hal ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige. (*Cepos*)

25 Maret

Sebanyak 23 anggota KKB pimpinan Goliat Tabuni dilaporkan menyerahkan diri dan menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka membawa istri dan anak-anaknya karena ingin hidup layak seperti masyarakat lainnya. Hal ini disampaikan oleh perwakilan 23 anggota Goliat Tabuni ketika menyambut kedatangan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigen TNI Tatang Sulaiman saat berkunjung ke Tingginambut. (*Cepos*)

26 Maret

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses G. Siahaan membenarkan bahwa pistol FN 45 jat 7024850 yang diamankan dari tangan LM, anggota KKB pimpinan Lekaka Telenggen, merupakan pistol milik Danramil Sinak yang dirampas sekelompok OTK yang berjumlah enam orang pada 10 Desember 2011. (*Cepos*)

2 April

Pihak Polsek Bandara Sentani menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang akan diterbangkan ke Wamena. Pemilik senjata dan amunisi melarikan diri dan pihak kepolisian masih melakukan pengejaran. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Kawasan Bandara Sentani AKP Jubelina Wally. (*Bintang Papua*)

14 April

Pihak Polda Papua menyerahkan dua anggota inisial KM dan KW ke Kejaksaan Negeri Wamena pada Senin (13/4). Hal ini dimaksudkan untuk menjalani proses peradilan terkait kepemilikan senjata api rampasan. Dua orang tersebut adalah anggota dari KKB pimpinan Enden Wanimbo. (*Suluh Papua*)

24 April

Ada empat warga PNG yang diduga melakukan penyelundupan ganja ke Jayapura disidangkan di Pengadilan Negeri Klas IA

Jayapura, Kamis (23/4). Keempat orang tersebut adalah Joel, Robert, Vincent dan Welem. (*Cepos*)

27 & 28 April

Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Yusak Tabuni yang beroperasi di Jayawijaya melakukan aksi perampasan senjata milik anggota Sat Pol PP Jefry Soisa pada Minggu (26/4) di Kampung Tarubaga, Distrik Piramid, Jayawijaya. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige. Lebih lanjut Kombes Pol. Patrige mengatakan, pelaku perampasan ini kurang dari 30 orang. Pihak kepolisian sudah melakukan usaha pencarian pelaku. Selain itu pihak kepolisian akan memeriksa Jefry Soisa atas kejadian tersebut. Di pihak lain, anggota DPR Papua Deerd Tabuni menyesal atas pernyataan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende yang mengatakan bahwa akan memberikan hadiah kepada anggota yang berhasil menangkap kelompok atau pelaku perampasan tersebut. Menurut Deerd, pernyataan semacam ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan. (*Suluh Papua, Bintang Papua, Cepos & Kompas*)

4. PENGAMANAN PEJABAT NEGARA DAN KUNJUNGAN PRESIDEN DI PAPUA

27 Februari

Sekitar 3.050 personel gabungan TNI AD, AL dan AU serta 1.050 personel Polri mengamankan kedatangan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Menurut Kodam pengamanan digelar mulai dari bandara Sentani hingga lokasi pelaksanaan kongres KNPI di GOR Cenderawasih Jayapura. (*Suluh Papua*)

7 Mei 2015

Dalam rangka menyambut kedatangan Preside Joko Widodo ke Papua, pihak keamanan terus melakukan persiapan, antara lain

menempatkan 12 tim sniper di tujuh lokasi. (*Cepos, Suluh Papua & Bintang Papua*)

Ketua Pansus HAM DPR Papua Laurens Kadepa pada Rabu (6/5) di ruang kerjanya, mengatakan kunjungan presiden ke Papua diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua, khususnya kasus Paniai 8 Desember 2014 dan Yahukimo Maret 2015. (*Cepos*)

8 Mei

Dalam kunjungan presiden RI, direncanakan Panglima TNI akan mendampingi presiden. Panglima TNI akan mengikuti beberapa agenda kunjungan presiden ke beberapa tempat di Papua. Di tempat lain, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Edison Awoitouw meminta agar masyarakat Kabupaten Jayapura dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kunjungan presiden tersebut. (*Cepos*)

Bupati Merauke Romanus Mbaraka di Kantor Bappeda Merauke pada Kamis (7/5) menegaskan, persiapan penyambutan kunjungan presiden sudah beres hingga melakukan panen raya di Wapeko, Merauke. Fokus kunjungan presiden ke Merauke adalah di Wapeko, Distrik Kurik dimana telah disiapkan 500 hektare dari PT Parama Pangan Papua untuk panen padi. Pemilik lahan tersebut adalah pengusaha nasional bernama Arifin Panigoro. Pada kesempatan lain, anggota Komisi I DPR Papua Ruben Magai pesimis bahwa kedatangan Joko Widodo membawa perubahan yang signifikan bagi Papua. Menurut Ruben, sebaiknya janji dari presiden untuk mewujudkan dialog damai segera direalisasikan. (*Cepos, Bintang Papua & Suluh Papua*)

Panitia kerja DPR Papua untuk pembangunan pasar mama-mama Papua mengingatkan agar Jokowi tidak lupa akan janjinya dalam kunjungan kerja pada bulan Desember 2014. Menurut Ketua Panja

DPR Papua Natan Pahabol, Papua membutuhkan tindakan nyata bukan janji saja. (*Bintang Papua*)

Pihak Polres Manokwari akan menyiapkan 2700 personil polisi untuk melakukan pengamanan terhadap kunjungan presiden di Kota Manokwari pada 10 Mei. Hal ini dikatakan oleh Kapolres Manokwari AKBP Jhoni Edison Isir melalui Kabag Ops Kopol Auri. Panitia pengamanan ditangani langsung oleh Kodim 1703 Manokwari. (*Bintang Papua*)

9 Mei

Ketua LMA Papua Lenis Kogoya pada Jumat (8/5) menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua. Menurut Lenis, semua tokoh gereja, masyarakat dan adat sebaiknya tidak membuat isu-isu keliru terkait kunjungan presiden tersebut. Presiden ke Papua dan Papua Barat pada 8-11 Mei 2015 bertujuan untuk berkomunikasi atau berdialog langsung dengan masyarakat Papua. (*Cepos*)

10-11 Mei

Dalam kunjungan ke Papua, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada lima narapidana politik. Pemberian grasi ini dilakukan dengan sepenuh hati dan tulus dari Pemerintah Indonesia untuk memadamkan konflik yang selama ini terjadi di Tanah Papua. Pemberian grasi ini dilakukan pada Sabtu, 9 Mei di Lapas Kelas II Abepura, Jayapura. Kelima narapidana adalah Jafrai Murib (LP Abepura), Linus Hiluka (dari Lapas Nabire), Kimanus Wenda (LP Nabire), Apotnagolit Enus (LP Biak) dan Numbungga (LP Biak). Beberapa menteri yang hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Menurut para tapol yang diwakili oleh Linus Hiluka, grasi yang diberikan tersebut bukan atas permohonan para tapol melainkan

inisiatif dari Presiden Joko Widodo. (*Kompas, Cepos, Bintang Papua dan Suluh Papua*)

11 Mei

Pada kunjungan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar para pelaku penembakan di Paniai, 8 Desember 2014 segera mungkin diungkap. Menurut Bupati Paniai Hengky Kayame, presiden akan mengawal proses tersebut walaupun dari pihak TNI menyatakan bahwa tak mudah untuk mengungkapkan kasus tersebut. Selain itu presiden mengatakan akan membantu pembangunan infrastruktur di Papua dengan memberikan sumbangan dana sebesar Rp 6 triliun. Pembagian dana tersebut adalah untuk jalan dan jembatan sebesar Rp 4,7 triliun, pengairan dan irigasi Rp 600 miliar, sanitasi dan air minum sebesar Rp 400 miliar, dan perumahan Rp 300 miliar. (*Cepos*)

Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Papua (Gempar) melakukan aksi protes di depan gapura Uncen menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Di tempat yang lain Ketua Lembaga Investigasi dan Informasi Provinsi Papua Hendrik Abnil Gwijangge berharap kunjungan presiden tersebut tidak sekedar seremonial belaka namun Jokowi dapat melihat persoalan sesungguhnya yang terjadi di Papua. Selain itu ketika berada di Dusun Wapeko, Kampung Invimahat, Distrik Kurik, Minggu (10/5), mengatakan wartawan asing diperbolehkan masuk ke Papua sama seperti provinsi-provinsi yang lainnya. Pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo mengatakan Kabupaten Merauke kemungkinan besar akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Sekitar 4,6 juta hektare yang sudah terlihat dan teridentifikasi 2,5 hektare tetapi yang dikerjakan sekarang 1,2 hektare mulai pada tahun 2015. Diharapkan tiga tahun ke depannya sudah selesai dikerjakan untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung padinya Indonesia. (*Cepos & Bintang Papua*)

12 Mei

Pernyataan dari Presiden Joko Widodo untuk membuka akses jurnalis asing ke Papua ditanggapi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Menurut Tedjo, Papua memang tidak tertutup lagi, wartawan asing mendapatkan akses ke Papua namun dengan mengikuti beberapa syarat. Syaratnya adalah isi pemberitaan tidak berisi fitnah, hal-hal yang tidak nyata, menjelekan negara RI dan tak berimbang. (*Bintang Papua*)

28 Desember

Dalam pemantauan pengamanan untuk kunjungan Presiden Joko Widodo, Pangdam XVII/Cenderewasih Hinsa Siburian mengatakan akan mengerahkan 1.355 personil baik TNI/Polri dan Satpol PP untuk di Wamena dan Raja Ampat. Hal ini dikatakan Pangdam ketika meninjau bandara Wamena yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. (*Cepos*)

29 Desember

Dalam pengamanan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Merauke, pihak aparat keamanan mengerahkan sebanyak 1.528 personil TNI dan Polri. Menurut Danrem 174/Anim TI Waninggap Brigjen TNI Supartodi, personil yang disiapkan ini sudah cukup dan mampu mengamankan kunjungan presiden tersebut. Selain itu masyarakat juga akan membantu dalam pengamanan tersebut. Dalam kunjungan ini Presiden Joko Widodo akan menanam kapsul impian Indonesia 70 tahun mendatang tepatnya tahun 2085. (*Cepos*)

30 Desember

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriani telah tiba di Merauke pada Selasa (29/12) malam. Kedatangan presiden dan rombongannya disambut oleh Gubernur Lukas Enembe, Pangdam

XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Bupati Merauke Romanus Mbraka, Bupati Mappi Stefanus Kaisma, Danrem 174/ATW Brigjen TNI Supartodi, Danlantamal XI Merauke Brigjen TNI Saud Tambatua dan Uskup Agung Merauke Nicolas Saputra, MSC. Pada kunjungan ini Presiden Joko Widodo menanam kapsul waktu yang berisi harapan dan mimpi Indonesia untuk 70 tahun mendatang sampai tahun 2085. Dalam kunjungan ini, beberapa kalangan mempertanyakan dan menagih janji Presiden Joko Widodo yang pernah disampaikannya. Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Orgenes Wanimbo mengharapkan dalam kunjungan ini presiden tidak lupa dengan janjinya untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya penembakan di Paniai. (*Cepos*)

31 Desember

Menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo, anggota DPD Papua Barat Mervin Komber meminta agar presiden memberikan kado Natal 2015 dan tahun 2016 dengan menyetujui pemekaran daerah-daerah yang telah diajukan dan mempercepat dialog Papua-Jakarta yang selama ini diperjuangkan. Pada kesempatan ini, Presiden membacakan tujuh mimpi dan harapan yakni [1] Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, [2] Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, budaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, [3] Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia, [4] Masyarakat dan aparaturnya yang bebas dari perilaku korupsi, [5] Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, [6] Indonesia mejadi negara yang mandiri dan menjadi negara yang berpengaruh di Asia Pasifik, [7] Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. (*Bintang Papua & Cepos*)

BAB 6

SUARA KEBEBASAN DAN KEADILAN MASIH DIKEKANG

1. KEBEBASAN BEREKSPRESI

22 Januari

Tokoh OPM Lambert Pekikir menginginkan dialog damai untuk menyelesaikan masalah Papua, oleh karena itu ia menggagas dan mendorong perdamaian dengan tema Keerom Damai. (*Suluh Papua*)

29 Januari

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende mengungkapkan tiga anggota KNPB yang ditangkap gabungan

TNI Polri di PTC Entrop-Kota Jayapura pada 28 Januari 2015 masih terus dilakukan pengembangan oleh tim Polda Papua. (*Bintang Papua*)

Terkait dengan tiga orang yang memiliki 500 amunisi yang ditangkap Polda Papua yang mengakui sebagai anggota KNPB dibantah oleh Sekretaris I KNPB Mecky Yeimo. Menurut Yeimo, ketiga tersangka tersebut bukan anggota KNPB dan KNPB tidak bertanggungjawab. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

16 Februari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige mengatakan Polda Papua mengamankan seorang mahasiswa yang juga juru bicara KNPB inisial YK (27) di Pelabuhan Samabusa Teluk Kimi, Nabire pada 15 Februari 2015. Ia terbukti membawa dokumen diplomasi kemerdekaan Papua Barat nasional maupun internasional. (*Cepos*)

Sebanyak 14 aktivis KNPB dari wilayah Sorong dan Kabupaten Fak Fak berhasil diamankan dalam rasia aparat gabungan TNI/Polri. (*Bintang Papua*)

17 Februari

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige mengatakan bahwa Polres Nabire melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah rumah yang menjadi tempat berlangsungnya pertemuan KNPB di jalan SMK Pertanian, Girimulyo, Nabire pada 16 Februari 2015. (*Cepos*)

20 Februari

Terdakwa kasus dugaan makar dan permufakatan jahat Areki Wanimo memohon dukungan terhadap keluarga maupun simpatisan agar proses hukum yang dijalaninya segera selesai. (*Cepos*)

Pihak Polres Nabire masih melakukan pemeriksaan terhadap enam anggota KNPB yang diamankan saat kepolisian melakukan penggerebekan pada 16 Februari 2015. (*Suluh Papua*)

21 Februari

Setelah melakukan pemeriksaan ternyata tidak terbukti melakukan tindakan disintegrasi atau perbuatan makar maka sebanyak 11 anggota KNPB dibebaskan. (*Suluh Papua & Cepos*)

2 Maret

Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi disambut demonstrasi dari rakyat Melanesia pendukung Kemerdekaan Papua di Honiara, Kepulauan Salomon. Protes ini dikoordinir oleh Solomon Islands For West Papua (SIFWP). (*Suluh Papua*)

6 Maret

Dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen dan Pengamat masalah Sosial Politik Papua Marinus Young mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas menjelang sidang tahunan MSG pada 14 Maret 2015. Dalam perayaan ulang tahun ke-27 isu keanggotaan Papua yang diwakili United Liberation Movement For West Papua akan diputuskan. (*Bintang Papua*)

11 Maret

Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pihak Polres Jayapura mengadakan pertemuan dengan kelompok Raja Cycloop. Pertemuan ini dilakukan terkait rencana kelompok Raja Cycloop yang menyerahkan diri beserta senjata di Gereja Betlehem Dormena, Kampung Yongsu Spari, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Adrianus Apaseray yang dijuluki sebagai Raja Cycloop bersedia menyerahkan diri. (*Bintang Papua & Cepos*)

18 Maret

Mantan Diplomat RI untuk Brasil Fredi Kambu mengatakan, di Amerika Latin sekitar 1500 NGO yang mendukung gerakan Papua Merdeka. Namun, pihak NGO tidak tahu siapa pimpinan gerakan Papua Merdeka tersebut. Jerman dan Belanda adalah negara yang pro aktif mendukung gerakan Papua Merdeka. (*Bintang Papua*)

20 Maret

Anggota Polres Yahukimo yang didukung anggota Brimob Datasemen A Polda Papua dilaporkan terlibat bentrok dengan anggota KNPB di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam bentrok tersebut, Kasat Intelkam Polres Yahukimo Ipda Budi Santoso dilaporkan dikeroyok oleh massa simpatisan KNPB dan pistol revolver jenis Taurus dengan nomor seri XK 256027 milik Ipda Budi Santoso diduga dirampas oleh massa. (*Cepos, Bintang Papua & Suluh Papua*)

23 Maret

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige mengatakan, pasca keributan antara aparat kepolisian dengan massa KNPB situasi Kabupaten Yahukimo sudah kondusif. Bahkan Bandara Nop Goliat Dekai yang sempat diserang sudah dapat difungsikan kembali. (*Cepos & Bintang Papua*)

24 Maret

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Yotje Mende mengusulkan agar KNPB dibubarkan. Selain mengusulkan agar KNPB dibubarkan, Kapolda juga meminta agar seluruh instansi di Papua untuk tidak memberdayakan KNPB karena telah dianggap sebagai gerakan bawah tanah untuk mendukung OPM. (*Cepos*)

Pihak Polres Yahukimo berhasil mendapatkan kembali senjata milik Kasat Intel Polres Yahukimo yang dirampas oleh anggota KNPB pasca keributan tersebut. Kepolisian juga mengamankan

dan menetapkan enam orang anggota KNPB sebagai tersangka. (*Cepos & Bintang Papua*)

25 Maret

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 24 Maret 2015. Bersama Untuk Kebenaran (BUK) dan KontraS Papua meminta Presiden Jokowi untuk lebih tegas dan berani untuk mendorong penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Sedangkan untuk gubernur dan DPR Papua diminta untuk segera mendorong evaluasi resmi atas pendekatan keamanan yang saat ini dijalankan di Papua. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua BUK Papua Peneas Lokbere. (*Cepos*)

Badan Pengurus Pusat KNPB menolak keras usulan agar KNPB dibubarkan. Ada tuduhan dari pihak kepolisian bahwa KNPB adalah organisasi yang seringkali melakukan tindakan anarkis dan termasuk organisasi tidak resmi. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende. Menanggapi hal tersebut, Jubir KNPB Bazoka Logo mengatakan KNPB merupakan partisipasi rakyat sesuai dengan UUD 1945 dan Hukum Internasional yakni bebas mengeluarkan pendapatnya. (*Bintang Papua*)

Dosen HI Fakultas Fisip Uncen Marinus Yaung mengatakan, masalah Papua di MSG menjadi isu politik bersama yang diperjuangkan untuk dicari solusi terbaik oleh semua negara anggota MSG. Dijelaskan sampai saat ini belum ada keputusan tentang proposal Papua yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG, karena Vanuatu sebagai tempat kantor sekretariat MSG dilanda bencana alam. (*Bintang Papua*)

26 Maret

Pangdam XVII/Cederawasih Mayjen TNI Franses G. Siahaan mengatakan bahwa Goliat Tabuni tidak ikut turun bersama 23 anggotanya yang menyerahkan diri untuk kembali ke pangkuan

NKRI di Tinggimambut, Kabupaten Puncak Jaya. (*Cepos*)

28 Maret

Panglima OPM Goliat Tabuni menegaskan bahwa tidak ada satu pun anggota maupun pengikutnya yang menyerahkan dan kembali ke NKRI seperti yang disampaikan oleh Kodam XVII/Cenderawasih. Menurut Goliat, perjuangan untuk kemerdekaan Papua tidak akan berhenti. (*Cepos*)

Kepolisian Resor Yahukimo menahan lima anggota KNPB terkait kasus kekerasan yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat dan juga perampasan senjata milik Kasat Intel Polres Yahukimo yang sudah ditemukan. (*Cepos*)

30 Maret

Massa yang tergabung dalam Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo menggelar aksi demo di DPR Papua. Mereka mendesak DPR Papua membentuk tim investigasi guna menindaklanjuti kasus penembakan yang dilakukan oknum aparat kepolisian yang menewaskan dua orang dan empat luka-luka dari KNPB. Selain itu meminta Polda Papua untuk menarik Kapolres Yahukimo serta anggota Brimob yang ada di sana. (*Cepos, Suluh Papua & Bintang Papua*)

10 April

Pada Kamis (9/4) di Mapolda Papua, Kapolda Papua Yontje Mende mengatakan, setiap Polres dan Polsek tidak perlu mengakomodir semua kegiatan KNPB. Hendaknya tidak diberikan izin dari Polres atau Polsek terkait kegiatan yang mengatasnamakan KNPB. Alasannya, kegiatan KNPB bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. (*Cepos*)

15 April

Kepolisian Daerah Papua menangkap salah satu pimpinan

Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Elias Ayakeding di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (4/4). Selain Elias, pihak kepolisian juga menahan anggota Komite Independen Papua (KIP) yakni Laurence Mehuwe, Jhon Suebu, Don Flasy, Ones Banundi dan Enny Tan Fere. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Patrige Renwarin, Elias adalah salah satu pimpinan di NRFPB yang hendak mendirikan negara sendiri dalam NKRI sehingga pihak kepolisian mengambil langkah tegas untuk menghentikan aksinya. Ketika kelima anggota KIP diperiksa menolak untuk memberikan keterangan di Polres Jayapura. (*Kompas, Cepas dan Suluh Papua*)

17 April

Pihak Polres Merauke membubarkan rapat KNPB Merauke untuk membentuk panitia dalam rangka merayakan HUT KNPB di Sekretariat KNPB di Kelurahan Kelapa Lima Merauke. (*Cepas*)

20 April

Anggota DPRD Yahukimo Tinus Senik mendesak aparat keamanan Polres Yahukimo untuk membebaskan beberapa warga sipil yang ditahan dalam aksi pengumpulan dana mendukung diplomasi ULMWP pada 20-21 Maret. (*Cepas*)

2 Mei

Ruang kebebasan berpendapat sepertinya masih menjadi persoalan di Papua. Sejumlah anggota KNPB masih terus dikejar dan ditangkap. Sebanyak 14 orang anggota KNPB Merauke diamankan ke Mapolres Merauke pada Jumat (1/5), sedangkan di Kota Jayapura Polresta mengamankan 30 orang anggota KNPB yang hendak melaksanakan aksinya. Sementara itu pada saat yang sama di Papua Barat, pihak kepolisian mengamankan sebanyak 296 mahasiswa yang menggelar akse demo di Manokwari. (*Cepas, Suluh Papua & Bintang Papua*)

4 Mei

Aksi penangkapan terhadap anggota KNPB mendapat tanggapan dari pihak Gereja. Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Sinode Kingmi Papua, Jayapura, Sabtu (2/5), Koordinator Forum Oikumene Gereja-gereja Papua Pdt. Beny Giay mengecam tindakan kriminalisasi terhadap anggota KNPB tersebut. Selain itu nilai-nilai demokrasi tidak terwujud di Papua. Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende, Kamis (30/4), mengatakan, KNPB adalah pemicu konflik di Papua dan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. (*Bintang Papua & Suluh Papua*)

5 Mei

Peristiwa penangkapan terhadap orang-orang Papua juga mendapat tanggapan dari Ketua Pokja adat MRP Yakobus Dumupa. Menurut Yakobus, peristiwa telah terjadi secara terus-menerus sejak Papua masuk ke NKRI. Perbuatan ini tidak bisa menyelesaikan konflik di Papua. Penangkapan itu terjadi karena ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan rakyat Papua tentang status politik. (*Bintang Papua*)

6 Mei

Lembaga pemerhati HAM dunia Amnesty Internasional meminta kepada Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis asing ke Papua guna membuat laporan tentang pelanggaran HAM secara obyektif dan transparan. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Amnesty Josef Roy Benedict pada Selasa (5/5). (*Bintang Papua*)

8 Mei

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw, di Manokwari, Selasa (5/5), menegaskan bahwa kelompok radikal di Papua yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan RI akan ditindak tegas dan diproses hukum. (*Bintang Papua*)

11 Mei

Seorang wartawan Harian Cenderawasih Pos Viktor Palembang dipukuli oleh Bupati Biak Numfor Thomas Ondi di Kompleks Perumahan SKB Rigge, Biak, pada Sabtu (9/5). Bupati Thomas merasa kesal dengan salah satu berita yang ditulis korban yang dimuat pada 8 Mei 2015. Peristiwa ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian belum melakukan pemeriksaan terhadap Thomas karena masih dalam kesibukannya. (*Kompas*)

18 Mei

Pertemuan yang diadakan oleh KNPB di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa Lima Merauke pada Sabtu, 16 Mei, dibubarkan oleh pihak kepolisian karena tidak mendapatkan izin atau menyampaikan pemberitahuan. Ada dua orang diamankan dan dibawa ke Mapolres Merauke untuk dimintai keterangan. (*Cepos*)

20 Mei

Sebanyak 70 orang dari KNPB yang melakukan aksi demo di Unipa Manokwari dan beberapa tempat lainnya di Manokwari ditahan di Mako Brimob Jalan Esau Wosi Gunung pada Rabu (20/5). Mereka ditahan karena aksi mereka tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. (*Bintang Papua & Cepos*)

6 Juni

Juru Bicara KNPB Bazoka Logo di halaman Kampus Uncen Abepura pada Jumat, 5 Juni 2015 menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Papua untuk mendoakan Papua Barat masuk ke dalam keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG). Selanjutnya dikatakan bahwa pihaknya bersama rakyat Papua mendukung penuh Papua Barat masuk dalam keanggotaan MSG. Acara doa bersama ini dilakukan sebagai ganti aksi demo ke DPR Papua yang batal dilaksanakan. (*Cepos*)

4 Juni

Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya AKBP Semmy R. Thabaa, di Mapolres Jayawijaya, Rabu (3/6), dalam rangka mengantisipasi rencana demo oleh KNPB pada 5 Juni, melihat dan mengecek persiapan pengamanan. Pihaknya juga bersama beberapa pejabat lingkungan Polres Jayawijaya juga sudah melakukan rapat dengan para Kanit dan satuan yang ada di Polres Jayawijaya untuk melakukan antisipasi demo tersebut dan menggelar pasukan sebanyak 270 personil. (*Cepos*)

5 Juni

Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota AKBP Jeremias Rontini, di Jayapura, Kamis (4/6), terkait rencana kelompok KNPB untuk menggelar aksi demo ke DPR Papua, mengatakan bahwa pihaknya memberikan peringatan akan membubarkan apabila KNPB tetap memaksa diri untuk menggelar aksi demo. Selanjutnya dikatakan bahwa pihaknya juga telah menerima himbauan dari Polda Papua untuk menolak semua aksi yang dilakukan KNPB termasuk rencana demo yang akan dilaksanakan ke DPR Papua. (*Cepos & Bintang Papua*)

7 Juli

Kepala suku, kepala desa, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan organisasi lainnya di Kabupaten Yahukimo pada Sabtu, 4 Juli mendatangi Polres Yahukimo untuk memberikan dukungan kepada pihak kepolisian memberantas tindak kriminal yang dilakukan oleh KNPB. (*Cepos*)

18 Agustus

Mahasiswa Intan Jaya melakukan aksi demo damai di Kabupaten Intan Jaya, Selasa (18/8). Dalam aksi ini massa menuntut agar Pemda Intan Jaya memperhatikan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya yang selama ini tidak berjalan. Menurut Koordinator Aksi Melianus Douw, aksi ini dipilih bertepatan dengan para

kepala SKPD Intan Jaya yang melakukan upacara apel bendera dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Selama ini kebanyakan SKPD tidak berada di tempat tugas sehingga momen itu dipakai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Aksi ini dibubarkan oleh Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni yang dibantu oleh aparat keamanan dan Brimob yang bertugas di Intan Jaya. Massa aksi juga sempat dipukul oleh Bupati Natalis Tabuni. (*Laporan Mahasiswa Intan Jaya*)

27 Agustus

Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Papua Barat pada Rabu (26/8) menggelar aksi unjuk rasa. Massa mendesak SK Mendagri yang menetapkan Matheos Selo sebagai ketua DPR Papua Barat 2014-2019 segera dicabut dan diganti dengan kader Partai Demokrat yang merupakan orang asli Papua. (*Cepos & Bintang Papua*)

28 Agustus

Gubernur Papua Lukas Enembe pada Kamis, 27 Agustus di Kantor Gubernur Papua mengatakan, pihaknya memberikan kebebasan bagi jurnalis asing yang hendak melakukan tugas-tugas jurnalistik di seluruh wilayah Provinsi Papua. Hal ini disampaikan melalui Sekda Papua Hery Dosinaen ketika menerima kunjungan jurnalis asing dari New Zealand Adrian Senitofu dan Karen Alhanap. (*Bintang Papua*)

8 September

Anggota Komisi I DPR Papua Laurens Kadepa pada Senin, 7 September di Jayapura meminta kepada pihak kepolisian agar tidak menganggap aksi demo damai yang dilakukan masyarakat Papua dari sisi negatif. Sebab akan menimbulkan rasa saling curiga dan gesekan. (*Bintang Papua*)

Koordinator Aksi Demo Damai Kelompok Mahasiswa Marind Anim di Kantor DPRD Kabupaten Merauke pada Senin, 7 September

mengatakan bahwa pihaknya menggelar aksi kali ini bertujuan agar pemerintah memberikan perhatian dan dukungan serius bagi perkembangan dan pelayanan pendidikan guna pengembangan sumber daya manusia Papua. Selanjutnya dikatakan bahwa bantuan dana pemerintah pusat sangat besar. Akan tetapi dunia pendidikan masyarakat Papua sangat memprihatinkan. Aksi ini dilakukan karena bagian Kesra Pemda Merauke belum mencairkan dana bantuan studi selama sembilan bulan kepada mahasiswa. (*Bintang Papua*)

11 September

Anggota DPR Papua Yan Ayomi pada Kamis, 10 September di ruang kerjanya meminta kepada semua pihak agar tidak menyebar isu provokatif mengenai Papua Merdeka sehubungan dengan rencana kunjungan PIF di Papua New Guinea. Lebih lanjut dikatakan bahwa PIF ini dibentuk untuk pembangunan negara-negara di Pasific dan forum ini lebih banyak berbicara masalah pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Jadi apabila ada kelompok yang menghubungkan PIF dengan Papua Merdeka itu tidak benar. (*Cepos dan Bintang Papua*)

14 September

Sekretaris Jendral Badan Musyawarah Kepala-Kepala Suku Raja 7 Wilayah Adat Papua Sarlens LS. Ayatanoi di Abepura pada Minggu (13/9), mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya gubernur dan DPR Papua untuk membentuk tim Pansel 14 Kursi Adat di DPR Papua. Akan tetapi semua harus memperhatikan dasar hukum sebagai landasan pelaksanaannya yakni amanat UU Otsus pasal 6 dan Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009 sudah jelas mengenai kursi DPR Papua yang diangkat harus memperhatikan keterwakilan masyarakat adat Papua. (*Bintang Papua*)

17 September

Sekretaris Komisi V DPR Papua Nason Utty di Jayapura pada Rabu,

16 September mengatakan bahwa pihaknya berharap kepada aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang bertugas di Papua agar tidak terlalu memunculkan persoalan-persoalan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya bagi warga Indonesia yang disandera dan kasus penembakan selama ini, khususnya Kabupaten Keerom beberapa bulan lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa kasus penembakan di wilayah Keerom dan penyanderaan di Perbatasan RI-PNG masih bersifat opini yang dapat menimbulkan konflik baru. Harus ada koordinasi antar aparat terkait investigasi dan penangkapan. (*Bintang Papua*)

18 September

Masyarakat pemilik hak ulayat lokasi perkebunan sawit PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) wilayah Distrik Masni dan Sidey pada Kamis, 17 September di Aula Kantor Kampung Sidey Jaya SP-9 Distrik Sidey, meminta pihak perusahaan untuk tidak lagi memakai jasa personil Brimob maupun tentara untuk melakukan pengamanan. Sebagai gantinya perusahaan diminta memanfaatkan anggota kepolisian yang bertugas di wilayah Masni dan Sidey saja. Hal ini dikarenakan kehadiran personil Brimob maupun TNI yang selalu membawa senjata laras panjang kerap bertindak arogan sehingga meresahkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, warga dengan tegas menolak keberadaan Brimob dan TNI di kawasan perusahaan. (*Bintang Papua*)

29 September

Ratusan karyawan Dinas Kebersihan, Pemakaman, dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Biak Numfor di Kantor DPRD Biak Numfor pada Selasa, 28 September melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan gaji. Koordinator demo Sjaltiel Simbiak dalam orasinya menyampaikan agar Pemkab Biak Numfor segera membayar upah bagi karyawan/i DKPP sebesar Rp 1.710.000 dari sebelumnya Rp 1.400.000, sejak bulan Februari 2013, sesuai SK Bupati Biak Numfor No. 5 tahun 2015. (*Cepos*)

2 Oktober

Koordinator umum SKP HAM Peneas Lokbere di Sekretariat KontraS Papua Padang Bulan pada Kamis, 1 Oktober menyampaikan protes atas banyaknya kasus penembakan yang terjadi di Papua, yang mana tercatat ada enam kasus yang terjadi dari akhir 2014–akhir September 2015. (*Cepos*)

3 Oktober

Ketua koordinator aksi unjuk rasa dari kelompok mama-mama pedagang asli Papua Mama Laura di Kantor DPRD Kota Jayapura pada Jumat, 2 Oktober mengatakan bahwa pihaknya meminta keadilan dan meminta adanya los khusus untuk mama-mama penjual ikan. Pihaknya juga meminta bangunan yang permanen, yang sederhana tapi layak untuk berjualan, serta terlepas atau terpisah dari saudara-saudari kami yang non-Papua. Aksi ini dilakukan terkait adanya insiden pembakaran lapak atau meja tempat berjualan oleh oknum tak bertanggung jawab di Pasar Yotefa. (*Bintang Papua*)

8 Oktober

Massa yang tergabung dalam SKP HAM Papua melakukan aksi damai di Lingkaran Abepura, tepatnya di depan Gereja Katolik Gembala Baik. Massa menuntut agar para pelaku penembakan di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu segera diadili secara hukum agar korban mendapatkan keadilan. Aksi damai ini akhirnya dibubarkan oleh pihak keamanan gabungan dari Polresta Jayapura dan Polsek Abepura. Sebanyak 18 orang ditahan di Polsek Abepura dan akhirnya dibebaskan setelah massa dan pihak keamanan melakukan negosiasi. (*Laporan SKP HAM Papua*)

10 Oktober

Koordinator SKP HAM Papua Peneas Lokbere di Sekretariat KontraS Papua pada Jumat, 9 Oktober menyampaikan bahwa aksi demo yang dilakukan pada 8 Oktober tidak memiliki kaitan erat dengan politik tetapi soal aksi melawan lupa agar kasus Paniai jangan dilupakan.

Pihaknya memprotes perlakuan aparat yang menangkap begitu saja karena aksi yang dilakukan tidak anarkis, atau memalang jalan dan tidak mengganggu ketertiban. (*Cepos*)

13 Oktober

Koordinator Lapangan Koalisi Mahasiswa Papua (KMP) Fredi Walinggen di Gedung DPR Papua pada Selasa, 12 Oktober menggelar aksi demo menolak Perdasus Nomor 6 Tahun 2014. Ia meminta Pansel 14 kursi DPR Papua untuk menghentikan tahapan yang tengah berlangsung sebab tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Lebih lanjut dikatakan bahwa pihaknya meminta agar ditinjau kembali. Apabila hal ini tidak diindahkan maka pihaknya meminta supaya MRP dibubarkan. (*Cepos & Bintang Papua*)

20 Oktober

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Kristen Papua melakukan aksi di Kantor DPR Papua pada Senin, 19 Oktober. Aksi ini terkait insiden pembakaran gereja di Aceh Singkil. Massa menuntut agar pemerintah pusat bersikap adil dan mampu melindungi kelompok minoritas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. (*Cepos & Bintang Papua*)

3 & 4 November

Massa yang tergabung dalam Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pembangunan Jayawijaya melakukan aksi demo di Kantor DPRD Jayawijaya untuk mempertanyakan mahalannya harga BBM di Wamena. Hal yang sama juga dilakukan di Kantor DPR Papua pada Selasa, 3 November. Massa mendesak Pemprov Papua dan Pemkab Jayawijaya serta PT Pertamina membuka ruang dialog terkait mahalannya harga BBM di Wamena. (*Cepos*)

11 November

Dalam rangka mengenang kepergian Theys Hiyo Eluay, massa

KNPB melakukan ziarah ke makam Theys di Sentani, Kabupaten Jayapura. Selain itu mengenang sopir dari Theys yakni Aristoteles. Walaupun demikian ziarah ini akhirnya dilarang oleh aparat kepolisian dari Polres Jayapura. (*Cepos*)

Dalam pertemuan dengan tiga wartawan asing pada Selasa, 10 November di ruang kerjanya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua FX Mote mengatakan Provinsi Papua terbuka bagi wartawan asing. Hal ini berdasarkan kebijakan Presiden Joko Widodo. (*Cepos*)

12 November

Aksi pembubaran aparat kepolisian terhadap massa KNPB yang melakukan ziarah ke makam Theys ditanggapi oleh anggota DPR Papua Laurens Kadepa. Menurut Laurens, Theys adalah seorang manusia sehingga wajar kalau ada keluarga dan sahabatnya mengenangnya dengan berziarah ke makamnya dan berdoa untuknya. Laurens menyayangkan pemalangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkait dengan kasus pembunuhan Theys Eluay, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab di Makorem 172/PWY pada Rabu, 11 November mengatakan, kasus kematian Theys telah selesai. Para pelaku telah diberikan hukumannya. Sedangkan hilangnya sopir Theys Aristoteles Masoka, Plt. Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, Komnas HAM sedang berusaha mendalami kasus Aristoteles. Pihak Komnas Ham telah menyurati ke Mahkamah Tinggi Militer III Surabaya untuk mendapatkan salinan keputusan terhadap penculikan dan pembunuhan Theys. (*Bintang Papua & Cepos*)

16 November

Massa yang terdiri dari pemuda-pemudi sebanyak 302 pelamar seleksi Satpol PP Papua melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Satpol PP pada Sabtu, 14 November. Massa melakukan protes atas ketidakpuasan mereka dari hasil tes. Mereka menduga dalam

penerimaan tersebut ada permainan sehingga massa meminta agar penerimaan Satpol PP dilakukan ulang. (*Cepos*)

17 November

Massa pendukung kelima eks Tapol yang dibebaskan oleh Presiden Joko Widodo melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Jayawijaya pada Senin, 16 November. Massa dibubarkan oleh pihak kepolisian karena tidak diterbitkan surat pemberitahuan aksi (*Cepos*)

27 November

Anggota DPR Papua Laurens Kadepa di Kantor DPR Papua pada Kamis, 26 November meminta agar aparat keamanan dan OPM tidak menjadikan 1 Desember sebagai momentum untuk membuat kericuhan di masyarakat. (*Bintang Papua*)

3 Desember

Sebanyak 31 warga Nabire diamankan oleh aparat keamanan ketika hendak menggelar ibadah peringatan 1 Desember di bekas Kantor DPRD Nabire, depan Taman Gizi, Kelurahan Oyehe. (*Bintang Papua*)

18 Desember

Ratusan buruh kelapa sawit dari Kabupaten Keerom dan Jayapura melakukan aksi demo di Kantor DPR Papua. Buruh ini tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Papua. Masa meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau kembali Peraturan Presiden no 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Menurut massa, rumusan pengupahan yang termuat di dalam peraturan tersebut tidak meningkatkan kesejahteraan buruh. Selain itu DPR Papua akan menyurati Kapolda dan Pangdam Papua karena dalam aksi demo tersebut ada dugaan bahwa aparat TNI/Polri menjaga ketat para buruh di PT Tandan Sawita Papua dan PT Sinar Mas Taja Lere. Menurut Ketua DPR Papua Yunus Wonda, penjagaan yang

dilakukan oleh aparat sangat tak wajar dan pihak DPR Papua meminta agar cara seperti itu ditinggalkan. (*Cepos & Bintang Papua*)

BAB 7

CATATAN DAN REFLEKSI

Pada tahun 2015, sejumlah peristiwa penting mewarnai dinamika di Tanah Papua dan menjadi perhatian dan catatan dalam penyusunan dokumentasi Memoria Passionis tahun ini. Konflik dan rangkaian kasus-kasus kekerasan baru terjadi selama tahun 2015. Isu yang menjadi perhatian kalangan luas tentang perdebatan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Kemudian kami juga mencatat tentang pro-kontra pembangunan Markas Komando Brimob di Wamena, penjualan senjata dan amunisi oleh aparat keamanan, maraknya aksi penyerangan kelompok sipil bersenjata.

Tak kalah pentingnya adalah persoalan kesehatan,

tertutupnya ruang demokrasi, pendidikan, korupsi, perdebatan Otonomi Khusus, Pilkada serentak, perjuangan mama-mama Papua untuk mendapatkan pasar permanen, perwujudan dialog damai dan kunjungan Presiden Joko Widodo. Dan yang peristiwa perjuangan Papua untuk bergabung ke perhimpunan negara-negara Melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG) mendapat banyak perhatian di kalangan masyarakat Papua.

Beragam isu tersebut menjadi tema-tema menarik yang akan dibahas dalam refleksi ini. Selain itu, tentu Papua harus berduka dengan jatuhnya pesawat Trigana Air ATR-42 dengan nomor penerbangan IL-267 yang menelan korban jiwa 54 orang.

I. KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA

Hampir setiap tahun Papua kental dengan suasana konflik dan kekerasan. Baik itu konflik antara warga, saling tembak antara pihak keamanan: Polisi dan TNI, dan penembakan yang dilakukan aparat keamanan kepada warga sipil. Sebut saja beberapa peristiwa di antaranya seperti, bentrok/konflik antar warga di Kabupaten Nabire pada 2 Januari, di Kabupaten Lanny Jaya pada Maret 2015, di Kabupaten Tolikara pada 16 Juli, di Kabupaten Jayawijaya pada 15 Desember.

Kemudian penembakan yang dilakukan aparat keamanan seperti di Kampung Popome, Kabupaten Lany Jaya, pada 29 Januari, pada 8 Februari di Distrik Edera Bade, Kabupaten Merauke, di Kabupaten Yahukimo pada 19 Maret, di Kampung Ugapuga, Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni, pada 17 Juli di Karubaga, Kabupaten Tolikara. Lalu di Koperapoka, Mimika pada 28 Agustus, di Kampung Wanampompi, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 1 Desember. Peristiwa saling tembak terjadi di Distrik Gume,

Kabupaten Puncak pada 31 Maret, juga di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak pada 1 Mei, kemudian pada 1 Desember di Kampung Namuni, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kampung Wanapompi, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bertolak dari peristiwa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Papua masih menjadi sebuah daerah rawan konflik. Situasi ini di satu sisi tidak dapat kita hindari, namun di sisi lain, banyak kalangan terus berusaha mendesak dan berusaha agar pihak-pihak yang terlibat dan sengaja menciptakan konflik untuk berhenti dan menciptakan perdamaian di Tanah Papua. Usaha melalui jalur hukum positif yang berlaku, seperti pada kasus di Koperapoka, Kabupaten Mimika.

Berbagai pihak berupaya merespon konflik dan kekerasan yang terjadi. Aparat keamanan berupaya mengejar para pelaku penembakan. Para legislatif, eksekutif, akademisi dan intelektual, kelompok masyarakat, dan berbagai organisasi tingkat lokal Papua, nasional dan internasional terus mendesak pihak-pihak yang berwajib atau yang terlibat untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menangani sebuah masalah. Kekerasan atau konflik hanya melahirkan balas dendam dan begitu mudah memakan korban nyawa manusia. Walaupun demikian, masih terus menjadi pertanyaan mengapa para pelaku masih terus dibiarkan?

Kita dapat belajar dari proses penyelesaian kasus penembakan di Lapangan Karel Gobay, Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014¹. Sepanjang tahun 2015, pelbagai pihak terus bersuara² agar para pelaku penembakan diproses secara hukum. Teriakan ini sempat ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Papua pada 27 Desember

1 Bdk. Laporan SKP Keuskupan Timika dan SKP HAM Papua.

2 Proses advokasi kasus Paniai dapat dilihat dalam kronik proses penyelesaian kasus Paniai, 8 Desember 2014.

2014³. Niat baik ini masih sebatas di bibir karena sampai kini belum ada proses hukum. Pelbagai pihak dari Komnas HAM, kepolisian, gereja, mahasiswa, para NGO dan aktivis HAM dan DPR Papua telah melakukan investigasi. Semua laporan, baik tertulis maupun bentuk visual video telah diserahkan kepada pihak berwajib (kepolisian). Selain itu publik juga sudah mengetahui siapa para pelaku penembakan. Semuanya itu tidak memberikan dampak yang berarti bagi para penegak hukum.

Hukum untuk sementara dikesampingkan demi keamanan dan menjaga nama baik institusi dan negara. Padahal, Komnas HAM RI telah mengatakan dengan jelas bahwa kasus penembakan di Lapangan Karel Gobay, Paniai merupakan pelanggaran HAM Berat⁴. Persoalan lainnya masih terus menunggu itikad baik dari negara untuk mengadili pelakunya. Atau sengaja dibiarkan sehingga semuanya menjadi lupa dan dianggap suatu kebiasaan?

Negara juga harus bersedia dan rendah hati membiarkan dunia internasional untuk membantu proses hukum terhadap pelaku karena negara sendiri tidak serius menyelesaikannya. Kita menunggu pada tahun 2016, karena ada pertemuan antara SKP HAM Papua dan Komnas HAM RI di Kantor Jubi Papua, bahwa Komnas HAM RI berjanji untuk mengadvokasi kasus penembakan di Lapangan Karel Gobay, Paniai.

Siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus dibenarkan dari penembakan yang terjadi di Papua?

3 Dalam kunjungannya pada 27 Desember 2014, di Lapangan Mandala Jayapura, Presiden Joko Widodo meminta agar pihak yang berwajib segera menyelesaikan kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, yang menewaskan 5 orang pemuda dan pelajar. Walaupun demikian hingga saat ini belum ada proses hukum yang jelas kepada para pelaku.

4 Berdasarkan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 9 berbunyi, "salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan, dst.

Di samping ketidakmauan negara untuk memproses hukum para pelaku penembakan di Lapangan Karel Gobay, Paniai, ada satu proses hukum yang dapat dikatakan sebuah keberhasilan yakni proses hukum terhadap para pelaku penembakan di Koperapoka, Kabupaten Mimika, 28 Agustus 2015. Para pelaku dihukum, dipenjarakan dan dipecat dari kesatuannya. Negara harus selalu diganggu dan didesak, barulah negara bertindak terhadap aktornya. Negara cepat meresponnya ketika ada perebutan senjata, amunisi, penyerangan pos-pos keamanan, dan penembakan terhadap anggotanya. Namun, saat seringkali warga sipil yang menjadi korban, negara sengaja mengulur-ulur waktu dengan berbagai dalil pembenaran diri.

Persoalan yang cukup menyita perhatian di tahun 2015 adalah kejadian di Karubaga, Kabupaten Tolikara pada 17 Juli. Peristiwa yang cukup jauh di daerah pedalaman Papua namun begitu cepat diakses oleh media dan bahkan dengan sangat cepat mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Banyak perspektif, banyak tafsiran dan lain sebagainya seputar persoalan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kejadian Tolikara merupakan persoalan intolerensi atau benuansa SARA, yang lain mengatakan persoalan tersebut adalah persoalan yang diciptakan atau bukan persoalan SARA.

Barangkali ada dua hal yang dapat kita simak bersama dalam peristiwa tersebut adalah peranan media dan nilai keadilan. Publik dengan sangat cepat mengetahui bahwa ada persoalan di Tolikara yang cukup jauh dari jangkauan atau akses media informasi. Media yang terlibat dalam kejadian tersebut sepertinya membakar emosi publik untuk hanya melihat satu sisi kejadian, yaitu kios dan mushola dibakar. Padahal di dalam kejadian tersebut ada 12 warga yang ditembak dan satu diantaranya meninggal dunia. Hal ini luput dari rekaman media pada saat itu. Tak heran bahwa

ada pihak yang mengancam media dalam pemberitaannya. Hal kedua, kejadian Karubaga ini sungguh luar biasa karena banyak pejabat publik baik dari Papua maupun dari Pusat (Jakarta) berbondong-bondong ke Tolikara. Ini berawal dari fokus perhatian pada mushola dan kios yang terbakar dan pendatang. Dan, korban jiwa dan masyarakat asli setempat yang juga mengalami musibah justru diabaikan, dan mungkin sengaja ditinggalkan dulu.

Saat memberikan materi seminar di Kampus STFT Fajar Timur Padang Bulan, Presiden GIDI Pdt. Dorman Wandikbo, yang juga saksi mata dalam peristiwa tersebut mengatakan, *“Selama ini kami hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Umat muslim yang ada di sana, di Tolikara dengan kami sudah seperti keluarga. Namun ada pihak yang sengaja menciptakan konflik di sana. Ada iblis yang bermain di sana.”* Dua pemuda yang tidak tahu menahu dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai pelaku pembakaran kios dan mushola, sedangkan para pelaku penembakan dibiarkan dan tidak diproses hukum. Peristiwa Karubaga, Tolikara kiranya menjadi cermin bagi kita untuk melihat secara jelas duduk persoalannya.

2. PEMBANGUNAN MARKAS KOMANDO BRIMOB

Keraguan masyarakat Papua terhadap kinerja penegakan hukum semakin diperburuk dengan keinginan negara untuk membangun Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Rencana ini mendapat reaksi dari masyarakat dan pihak legislatif. Sepanjang Januari hingga April 2015 kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, Gereja dan legislatif silih berganti bersuara agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena ditiadakan. Bagi mereka yang mendukung rencana tersebut berdalil bahwa pembangunan Mako Brimob adalah untuk kepentingan publik atau masyarakat. Bagi mereka yang menolak, menilai

bahwa pembangunan itu hanya dan terus melahirkan konflik dan pelanggaran HAM baru di Pegunungan Tengah Papua. Pembangunan Mako Brimob akan terus menumbuhkan luka lama.

Aksi penolakan dari kelompok masyarakat tidak serta merta meredam keinginan Pemda Jayawijaya untuk memberikan kesempatan kepada Brimob membangun markasnya di Wamena. Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo secara tegas mengatakan bahwa dialah yang berhak menentukan, bukan DPRD, maka rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena tetap dan akan dilaksanakan. Terkesan bahwa suara rakyat tidak berarti dan didengar oleh pemimpinnya. Kepala Daerah Jayawijaya lebih mengutamakan suara dari pihak keamanan. Pertanyaan penting bagi kita, apakah keberadaan pihak keamanan selama ini tidak menjalankan kewajibannya? Setiap tahun semakin bertambah jumlah aparat keamanan dibandingkan dengan masyarakat sipil di Papua. Terkesan kuat bahwa di Papua, segala kebijakan masih dan tergantung pada aparat keamanan.

Terlepas dari persepsi di atas, kadangkala perilaku masyarakat yang hidup di Papua melegitimasi keberadaan pos-pos dan penambahan personil aparat keamanan di Papua. Meningkatnya kriminalitas yang berdampak pada kematian masyarakat sipil lainnya atau melanggar hak orang lain semakin melegalkan keberadaan pos-pos keamanan di Papua. Masyarakat tidak saling menghargai sehingga rasa aman yang sebenarnya juga menjadi hak dasar dilanggar. Beberapa kejadian di Papua seperti pembunuhan ibu hamil di Arso, Kabupaten Keerom yang berdampak pada pembentukan kelompok nusantara, pembunuhan di perumahan Organda, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura (8/6) dan pencurian serta miras yang masih merajalela.

3. KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA

Salah satu kelompok yang juga menjadi perhatian media, aparat keamanan, pemerintah dan publik adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sederetan aksi kekerasan dan penembakan di beberapa daerah di Papua dikaitkan dengan kelompok ini. Terlepas dari apakah benar atau tidak keberadaan kelompok ini. Kenyataannya penembakan yang terjadi pada akhir 2014 dan awal 2015, aparat keamanan mengkaitkan dengan kelompok ini. Berdasarkan pemberitaan media, sepanjang tahun 2014, pihak Polda Papua telah kehilangan 20 pucuk senjata api. Kapolda Papua Irjen Pol. Yotje Mende menyatakan bahwa ada delapan pleton KKB yang menjadi target operasi Polda Papua pada tahun 2015.

Beberapa kekerasan yang dilakukan KKB yang dipublikasikan di media adalah kejadian di Puncak Jaya dan Timika, yaitu penembakan dan pembacokan terhadap dua anggota Brimob Sumsel dan satu petugas sekuriti PT Freeport Indonesia pada 1 Januari 2015 dan penembakan terhadap pekerja jalan dan pembakaran eskavator di Kabupaten Lanny Jaya pada 29 Januari 2015. Kepala Bidang Humas Polda Papua Patridge Renwarin mengatakan bahwa ada dugaan pelakunya adalah KKB pimpinan Puron Wenda. Sedangkan penembakan dua anggota Brimob dan satu orang sekuriti PT Freeport Indonesia di Utikini, Mimika adalah KKB pimpinan Ayub Waker.

Pasca penembakan di Mimika kepolisian menggelar operasi dengan menurunkan 1576 personil gabungan untuk mengejar pimpinan KKB wilayah Timika. Pada Selasa, 7 Januari 2015 kepolisian mengamankan 116 dan menetapkan 64 orang yang diduga kuat sebagai anggota kelompok kemerdekaan. Ternyata tindakan ini ditanggapi oleh anggota Komisi I DPR Papua Ruben Magay. Menurut Ruben, langkah kepolisian

tersebut yang menggerakkan ribuan anggotanya sangatlah tidak benar. Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus West Papua Interest Association Andreas Wakerkwa bahwa pihaknya sangat kesal dengan tindakan aparat keamanan yang menangkap masyarakat pribumi tak berdosa di daerah Tenda Kuning, Kali Kabur, Mile 68, Tembagapura, areal PT Freeport Indonesia di Mimika.

Ada dugaan stigmatisasi yang sebelumnya dikenal dengan OPM sekarang berubah menjadi KKB. Mungkin juga opini yang telah dibangun itu sebagai sebuah siasat untuk meredam suara warga sipil dalam menuntut hak-haknya seperti hak atas tanah, hak berekspresi dan lain sebagainya. Atau kejadian ini terus dimainkan agar rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena berjalan? Atau strategi lama untuk membungkam suara rakyat yang menuntut keadilan dan kebenaran serta kedamaian di Tanah Papua? Walaupun demikian keamanan dan kedamaian itu tetap ada dan setiap orang berkewajiban menciptakan rasa nyaman bagi dirinya, lingkungan, dan orang lain.

4. SUARA KEADILAN MASIH DIBUNGKAM

Berbicara tentang demokrasi berarti kita diajak untuk berdiskusi dan memahami secara baik dan benar akan peranan aktif rakyat di dalam sebuah pemerintahan. Secara harafiah demokrasi biasanya dimengerti sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Menjadi jelas bagi kita bahwa sebuah Negara yang menganut paham demokrasi berarti Negara tersebut menjamin kebebasan dan keluasan rakyatnya di dalam sebuah pemerintahan. Entah itu partisipasi secara langsung maupun melalui wakilnya. Salah satu indikator yang menyatakan negara itu demokratis adalah negara menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun hal ini masih juga sulit diterapkan di Negara

Indonesia yang menganut paham demokrasi tersebut. Hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum⁵ karena ketidakadilan dan ketidakbenaran masih menjadi sebuah persoalan yang rumit di seluruh negara Indonesia, khususnya di Papua.

Di Papua, pengekangan kebebasan berekspresi masih sangat dirasakan. Kelompok masyarakat sipil yang mencoba bersuara tentang kebenaran dan keadilan serta kedamaian di tanahnya masih dikejar dan diburu oleh negara melalui alatnya (aparatus keamanan). Beberapa kasus yang menunjukkan hal ini seperti pengumpulan dana solidaritas di Yahukimo oleh KNPB bagi korban badai Vanuatu dibubarkan oleh alat negara. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh media lokal bahwa dua orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Di tempat lain, di Nabire terjadi penangkapan terhadap empat belas aktivis KNPB yang hendak melakukan pertemuan.

Kemudian penekanan oleh alat negara ketika kelompok masyarakat asli Papua melakukan seminar terkait bergabungnya Papua ke dalam MSG (Melanesia Spearhead Group) di Asrama Mimika Waena, pembubaran aksi mahasiswa terkait akses jurnalis asing ke Papua. Penangkapan ratusan aktivis KNPB dalam momen sama, menjelang dan peringatan 1 Mei. Aparatus keamanan mengangkap hingga sekitar 260 aktivis di pelbagai lokasi seperti di Manokwari, Fakfak, Sorong, Merauke, Jayapura, dan Nabire. Aparatus keamanan juga melakukan pembubaran aksi damai SKP HAM Papua, pembubaran massa yang hendak beribadah mengenang kematian Theis Elluay di Sentani, pembubaran dan penangkapan massa yang melakukan ibadah di

5 Berdasarkan instrumen internasional tentang HAM yang diratifikasi oleh negara Indonesia di dalam UU No. 39 Tahun 1999, dikatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Nabire, serta pembubaran dan penangkapan massa Aliansi Mahasiswa Papua yang melakukan aksi damai di Jakarta pada 1 Desember. Pihak keamanan selalu memakai alasan tidak adanya izin sebagai dasar untuk membubarkan paksa aksi demonstrasi.⁶

Peristiwa-peristiwa yang terjadi ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa ruang kebebasan berorganisasi dan berekspresi bagi masyarakat asli Papua masih terus dikekang dan dibatasi oleh negara. Negara berdalil bahwa kelompok aksi demonstrasi tidak terdaftar atau kehadiran kelompok ini dan itu melawan kesatuan negara serta mengganggu kedamaian bersama. Stigmatisasi yang dilakukan negara terhadap masyarakat asli Papua menunjukkan bahwa cap separatistis terus melekat dalam diri masyarakat asli Papua.

Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo sudah memberikan keterangan ke publik bahwa Papua dapat diakses oleh dunia internasional. Pernyataan ini masih hanya sebatas ucapan seorang Joko Widodo bukan suara yang didukung oleh seluruh elemen negara. Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada 27 Agustus bahwa Pemda Papua memberikan kebebasan kepada jurnalis asing untuk melakukan tugas-tugas jurnalisnya di Papua. Walaupun demikian masih sangat sulit dunia internasional masuk ke Papua, misal dari pihak PBB untuk memantau pelanggaran HAM di Papua, selain itu hak menyampaikan pendapat di muka umum masih ditekan oleh negara. Hukum atau peraturan yang diciptakan

6 Berdasarkan UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2 mengatakan, "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Padahal tidak perlu mendapatkan izin, masyarakat (entah itu perorangan maupun kelompok) hanya menyampaikan pemberitahuan via surat pemberitahuan. Pihak kepolisian hanya menerbitkan surat tanda terima kepada kelompok yang hendak melakukan aksinya bukan memberikan izin. Mungkin juga menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil agar sebelum menyampaikan suaranya di muka umum harus memperhatikan peraturan tersebut.

dan diakui untuk sementara disimpan, tidak digunakan. Negara dengan mudahnya memakai hukum untuk para elitnya. Suara untuk mendesak negara agar mengusut pelaku pelanggaran HAM, menuntut keadilan dan kebenaran di Papua masih dianggap sebagai upaya dan tindakan makar dan separatistis.

5. KEBIJAKAN PEMERINTAH: PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Persoalan mendasar lainnya di Papua adalah pendidikan dan kesehatan. Berbicara tentang pendidikan dan kesehatan berarti kita akan berbicara terkait sistem pelayanannya, penyedia layanan, dan peran aktif penerima layanan⁷. Di beberapa daerah di Papua masih terlihat proses pendidikan dan kesehatan tidak berjalan dengan lancar dan benar. Ketidakterlaksanaan ini hampir selalu terjadi di daerah pedalaman Papua, seperti di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, daerah Kwimi dan Ubrub di Kabupaten Keerom, daerah Bade di Merauke, Distrik Mbua di Kabupaten Nduga, dan lain sebagainya. Para petugas, guru dan petugas medis, absen di tempat tugas, kurangnya pengawasan dari Pemda setempat, dalam hal ini dinas kesehatan dan pendidikan. Lalu, rendahnya kesadaran masyarakat setempat masih menjadi persoalan yang hampir selalu muncul di beberapa daerah di Papua.

Tak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah pihak, baik itu secara pribadi maupun lembaga memperbaiki sistem pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan

⁷ Berdasarkan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 mengatakan bahwa penyelenggara layanan berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 19 mengatakan bahwa masyarakat ikut menjaga terpeliharanya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

dan kesehatan. Masyarakat tidak usah lagi merasa takut untuk menegur atau mengkritik para penyedia layanan yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat sudah sangat jelas dan secara baik diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pihak pemerintah daerah juga jangan hanya sibuk dengan penerimaan pegawai baru tetapi tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengawas atau pengontrol.

Persoalan pelik lainnya adalah penyebaran kasus HIV AIDS di Papua yang terus meningkat. Kita dapat melihat data yang dirilis dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua bahwa sebanyak 20 ribu lebih yang menderita penyakit ini. Jelas bagi kita bahwa penyakit HIV AIDS sangat berkaitan dengan pola dan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Penyebaran ini sudah mulai merambat ke daerah-daerah pelosok Papua yang masyarakatnya juga masih sangat minim pengetahuan akan jenis penyakit ini.

Kemudian, kehadiran para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sengaja didatangkan dari luar Papua dan ditempatkan di daerah-daerah 'makmur' di Papua seperti di daerah Pertambangan emas Sungai Degeuwo, Kabupaten Intan Jaya juga menjadi faktor penyebaran HIV AIDS. Dengan pengetahuan yang minim akhirnya masyarakat mulai menikmati gaya hidup seperti para pejabat. Secara tidak sadar masyarakat dijadikan 'agen' atau 'tim sukses' untuk menyebarkan virus tersebut kepada sesamanya.

Pelbagai usaha mulai dilakukan oleh Pemda, instansi terkait, yayasan atau organisasi yang peduli HIV AIDS. Semua punya satu komitmen agar virus ini tidak menyebar dan berhenti pada mereka yang sudah terjangkit. Ada yang memandang pesebaran penyakit ini berkaitan langsung dengan peredaran miras dan narkoba yang kian marak di Papua. Usia-usia produktif atau kaum muda yang menjadi

salah satu kelompok yang rentan mendapatkan penyakit ini. Kiranya situasi ini menjadi perhatian semua orang, bukan hanya dari Pemda, instansi terkait dan organisasi atau yayasan ada sekarang.

Di akhir-akhir tahun 2015, Papua dihebohkan lagi dengan kematian 30-40 anak-anak balita di Kabupaten Nduga⁸ dan peristiwa alam embun beku yang juga menelan korban jiwa. Terkait dengan kejadian luar biasa di Kabupaten Nduga, Pemda (kabupaten dan provinsi), Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan pihak yang peduli terhadap kesehatan dan korban melakukan upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengiriman dokter, pasokan bahan makanan dan mengecek kepastian virus yang menyebar merupakan tindakan untuk mengetahui secara jelas penyakit dan membantu masyarakat.

Tim investigasi dari Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga menemukan banyak obat-obatan kedaluarsa yang masih beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat di ketiga distrik tersebut. Selain itu, petugas kesehatan tidak ada di tempat tugas. Masyarakat pun hanya mengandalkan seorang 'dukun kesehatan' yang siap dan tulus membantu mereka. Potret kesehatan di Kabupaten Nduga dapat menjadi salah satu contoh bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal dan penuh bagi masyarakat di daerah pedalaman Papua.

Cerita kesehatan tidak jauh berbeda dengan cerita pendidikan di Papua. Masih banyak generasi usia sekolah yang ditelantarkan. Situasi ini dapat ditemukan di Kampung Tambat, Kabupaten Merauke dan di Kiwirok, Kabupaten

8 Berdasarkan hasil investigasi Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua, Kabupaten Nduga (SKJWM) ditemukan beberapa data di tiga distrik, yakni distrik Mbua, Dal dan Mbulmu Yalma. Kejadian Luar Biasa ini bermula dengan kematian katak dan ular di alam bebas pada September-Oktober 2015, kematian hewan peliharaan dan budi daya masyarakat, seperti babi, ayam, kelinci dan ikan selama Oktober-November 2015, dan kematian misterius warga lokal terjadi pada Oktober hingga 3 Januari 2016, yang berjumlah 54 orang. Selain itu ditemukan tidak adanya petugas kesehatan dan obat yang kedaluarsa beredar di masyarakat. Sedangkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua korban berjumlah 38 orang, terdiri 35 anak-anak balita dan 3 orang dewasa.

Pegunungan Bintang. Selain itu kekurangan tenaga guru/pengajar hampir dirasakan di semua kabupaten di Tanah Papua, misalnya Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Jayawijaya dan lain-lainnya. Persoalan lainnya adalah pemalangan sekolah oleh pemilik ulayat dan mogok mengajar dari guru yang berdampak pada terhambatnya proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Menanggapi situasi kesehatan dan pendidikan di atas, Pemda, instansi terkait dan masyarakat⁹ terus berusaha agar kedua pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik. Antara lain dengan mengontrak guru dan tenaga medis, mengirim putra-putri asli Papua untuk dipersiapkan sebagai tenaga guru dan medis, mengalokasikan dana dan menyusun beberapa peraturan untuk membantu memperlancarkan pelayanan publik tersebut serta pihak anggota TNI yang bersedia membantu mengajar di daerah pedalaman¹⁰.

Barangkali yang harus diperketat lagi adalah pengawasan dari Pemda dan instansi terkait terhadap para petugasnya. Selain itu peran aktif masyarakat dalam menciptakan situasi yang nyaman bagi para petugas guru dan medis, khususnya di daerah pedalaman, akan membantu para petugas merasa betah dan setia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa rencana kebijakan lainnya seperti pembangunan unit rumah, kucuran dana triliunan rupiah, rencana pembangunan rel kereta. Dan, tahun 2016 dijadikan tahun investasi dan ekspedisi NKRI ke Papua. Apakah ada perubahan di tahun 2016? Kita masih menunggu dan berharap agar segala kebijakan pemerintah tersebut direalisasikan.

9 Berdasarkan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 15 mengatakan bahwa penyelenggara layanan berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 19 mengatakan bahwa masyarakat ikut menjaga terpeliharanya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan publik dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

10 Di beberapa sekolah seperti di Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke ada anggota TNI yang menjadi tenaga pendidik atau guru. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana peranan Pemda setempat karena pelayanan publik tersebut adalah tanggung jawab Pemda bukan anggota TNI. Atau apakah ada maksud lainnya dari para anggota TNI?

6. PERSOALAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

Sudah lima belas tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua diberlakukan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Ada kesuksesan dan kegagalannya. Di Papua, kebanyakan orang menilai bahwa Otsus yang dimaksudkan adalah mengalirnya dana bukan sebuah wewenang atau tanggung jawab kepada Pemda Papua. Hasilnya sudah diketahui bahwa program ini hanya mensejahterakan sekelompok orang. Kuasa atau wewenang untuk mengatur diri dan pemerintahannya tidak berjalan. Semuanya diatur di Jakarta.

Sekarang Otsus didorong dengan label Otsus Plus, pembangunan Otsus ke Otsus Plus menjadi perjuangan 'primadona' Pemda Papua. Dari awal mula pembaharuan Otsus ini tidak mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Papua karena tidak disosialisasikan dengan sewajarnya. Ternyata hal ini tidak dihiraukan oleh Pemda Papua. Dana sudah disiapkan dan masyarakat secara diam-diam menerima kegagalan ini.

Berbicara tentang peraturan Otsus sebenarnya ada beberapa hal mendasar yang masih tenggelam. Perlindungan terhadap masyarakat adat Papua, pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Perdamaian, wewenang sepenuhnya kepada Pemda setempat dan penegakan HAM¹¹ tidak berjalan dengan baik. Pokoknya banyak hal yang menjadi unsur inti Otsus versi 2001 masih dilupakan. Selain itu evaluasi terhadap implementasi Otsus versi 2001 tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Kegagalan Otsus 2001 sepertinya menjadi 'sarana' untuk mensukseskan Otsus Plus. Di dalam proses Otsus Plus kelihatan Pemda Papua, DPRD/DPR Papua dan MRP berjalan tanpa masyarakat. Perbincangan dan implementasi

11 Bdk. UU No.21 tahun 2001

Otsus Plus sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Otsus versi 2001. Yang dibicarakan adalah dana; bagaimana pencairan dana dan berapa besarnya dana tersebut diterima oleh masyarakat. Perihal mendasar seperti hak masyarakat adat, peran dan fungsi Majelis Rakyat Papua (MRP) serta wewenang 'keotonoman' untuk mengatur diri sendiri tidak terlalu dipersoalkan. Hal-hal mendasar tersebut masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Besaran dana Otsus yang dicairkan sepertinya menutupi itikad baik dari Pemda Papua untuk membangun masyarakatnya. Seharusnya, sudah saatnya bagi para pengambil kebijakan mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat secara benar, dan melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif.

Di sisi lain Elit Papua menafsirkan UU Otonomi khusus Papua No 21 tahun 2001 dengan kaca mata yang sangat melanesia dan peramu. Orang Papua menafsirkan otonomi mengatur dirinya sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, 'saat ini dan di sini', bukan mempersiapkan diri menjadi tuan juga pasca 25 tahun otonomi khusus Papua. Penafsiran 'kini dan saat ini' terlihat sangat rapi dan sistematis. Elite Papua ramai-ramai memperjuangkan pemekaran provinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung. Perjuangan itu mengemuka dua tahun terakhir, ada 37 calon daerah otonomi baru¹².

Daerah-daerah yang masuk menjadi calon daerah otonomi baru itu sebagian belum memenuhi syarat mengenai penduduk dan kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah. Sementara, pembiayaan keberlangsungan daerah itu akan dibantu dari pusat dan menggunakan dana Otsus. Elit memaksakan pemekaran atas nama kesejahteraan

¹² Lihat <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/19/078608041/pemerintah-sby-akan-sahkan-20-daerah-otonomi-baru>. Ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7), Presiden Joko Widodo meminta kepada DPR RI dan DPD RI untuk tidak tergesa-gesa terkait rencana pembentukan 87 DOB. Lebih lanjut dikatakan pembentukan DOB harus sangat berkaitan dengan ruang fiskal dan tidak boleh melenceng dari tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembentukan DOB harus dihindari dari niat-niat bagi jabatan dan kekuasaan.

rakyat, membuka isolasi daerah, mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat yang selama ini tidak terjangkau. Argumen pemekarannya sangat menyakinkan publik dan pemerintah Jakarta. Apakah mereka betul membangun kesejahteraan rakyat daerah yang menjadi objek pemekaran?

Penafsiran macam ini menjadi sorotan publik. Ketika disoroti, elit Papua dengan agak sombong, membungkus kelemahannya atas nama Otsus. Otonomi khusus menjadi jaminan. *“Anak daerah harus mendapat kesempatan. Orang Papua juga bisa memimpin dirinya sendiri. Orang Papua juga bisa sama dengan saudara-saudari daerah lain di Indonesia”*, begitulah para elit Papua membenarkan dirinya.

Kesejahteraan melalui pemekaran masih menjadi mimpi rakyat. Rakyat Papua masih menanti sentuhan kasih melalui pembangunan yang berpihak. Di tengah situasi itu kita terus menyaksikan elit Papua masih memikirkan kepuasan sendiri, tidak memikirkan masyarakat Papua, nasib anak cucu, dan eksistensi Papua pasca Otsus. Masa depan Papua tidak dikaitkan dengan masa kini, dilihat terlepas dari masa kini. Generasi yang akan datang dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri.

Logisnya, masa kini adalah masa depan Papua. Semua yang baik saat ini, menjadi yang baik bagi masa depan Papua dan sebaliknya, yang buruk saat ini, menjadi masa depan Papua yang buruk. Masa depan Papua tidak akan berubah, ada hari ini, habis hari ini. Masa depan Papua menjadi gelap, tidak jelas, masih samar-samar akibat korupsi¹³, kolusi dan nepotisme dalam realisasi Otsus saat ini.

13 Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Papua hingga saat ini sudah menangani 128 kasus korupsi di Papua dan Papua Barat. Sebagian sudah diproses hukum dan sebagian masih dalam penyelidikan. Khusus untuk Provinsi Papua Kejati menangani 46 kasus yang masih dalam penyelidikan, sedangkan kasus yang sudah masuk dalam tahapan penyidikan 39 kasus (26 kasus dari tahun sebelumnya dan 13 kasus yang sedang berjalan. Wakil Ketua KPK RI Adnan Pandu Praja, di Auditorium Uncen Jayapura, (17/11), mengatakan, lembaga yang paling terkorup dalam pemerintahan adalah DPR dan DPRD. Setelah itu kepala lembaga atau dari kementerian, disusul duta besar dan komisioner.

7. ELIT POLITIK DAN MIGRAN: PENYEBAB KEMISKINAN DI PAPUA

Badan Pusat Statistik Nasional merilis data lima wilayah termiskin di Indonesia. Papua menempati urutan pertama (28,40%), Papua Barat urutan kedua (25,73%), Nusa Tenggara Timur urutan ketiga (22,58%), Maluku urutan keempat (19,36%) dan Gorontalo urutan kelima (18,16%). Angka kemiskinan Papua dan Papua Barat tidak kontras dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III pada 2015. Pertumbuhan ekonomi Papua mencapai 7,13, Papua Barat 6,43, NTT 5,11, Maluku 5,27, Gorontalo 5,80. Harian *Kompas* cetak edisi Rabu, 7 Januari 2015 yang merilis data ini mengarisbawahi pertumbuhan ekonomi Papua tidak termasuk dari sektor tambang dan galian. Kita menduga saja, kalau begitu, pertumbuhan ekonomi Papua pasti jauh lebih baik dari data yang ada karena tambang tembaga terbesar kedua dunia PT Freeport Indonesia ada di Timika, provinsi Papua dan LNG Tangguh ada di Kaimana, Teluk Bintuni, provinsi Papua Barat. Hal ini dapat dibandingkan dengan data tahun 2011¹⁴.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad mengatakan angka kemiskinan Papua secara nasional sangat tinggi akibat peningkatan inflasi, nilai rupiah yang tidak stabil, harga barang naik dan daya beli menurun. Menurut Musa'ad, kalau mengukur pembangunan dengan kebijakan Otsus, ekonomi Papua justru berkembang baik dalam 15 tahun terakhir. Pemerintah mampu menekan angka kemiskinan di Papua pada 1999 sebesar 54% ke angka 27,5%. Perubahan angka kemiskinan ini, sifatnya sementara. Pemerintah akan perkuat ekonomi sesuai dengan lima wilayah adat yang ada

14 Lihat <http://bisnis.tempo.co/read/news/2012/08/13>. Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana merilis data angka kemiskinan tahun 2011. Dan, angka kemiskinan di wilayah Papua tergolong tinggi sebesar 31,11% dari tingkat kemiskinan nasional saat itu sebesar 11,96%.

di wilayah Provinsi Papua (Lapago, Mepago, Mamta, Saireri dan Anim Ha).

Masalah penting dalam diskusi ini, apakah kita akan masih mengatakan argumen yang sama ketika angka ini tidak berubah 5 tahun mendatang? Siapakah kelompok yang disebut pengangguran terbuka dan kaum miskin dan yang bergerak dalam pertumbuhan ekonomi ini, orang asli Papua atau non Papua? Kita tidak memiliki data yang valid soal itu. Pemerintah Provinsi Papua pun belum mempunyai data penduduk asli Papua dan non Papua secara jelas untuk mengukur pertumbuhan. Kita hanya melihat data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka pemilihan umum 2014 lalu. Provinsi Papua berpenduduk sebesar 4.224.232 jiwa dan Papua Barat sebanyak 1.091.171 jiwa. Data itu masih kita perdebatkan ketika kita kaitkan dengan hitung-hitungan suara pemilih legislatif, eksekutif dan jumlah penduduk yang dipakai untuk pemekaran wilayah dan anggaran. Misalnya di daerah Jayawijaya, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah Lapago Engelbertus Surabaya mengatakan data penduduk Papua ini banyak yang fiktif.

Ketidakjelasan itu sangat meragukan data kemiskinan ini, tetapi data ini menjadi penting dalam melihat pembangunan di Papua saat ini. Kita bisa melihat angka kemiskinan itu tumbuh subur di wilayah Timur Indonesia. Sangat memalukan lagi, Provinsi Papua dan Papua Barat menduduki peringkat satu dan dua disela-sela berbagai kebijakan Jakarta, Otonomis Khusus hingga kebijakan Jokowi untuk membangun Papua.

Karena itu, sangat beralasan orang Papua mengatakan pertumbuhan ekonominya baik itu tidak berdampak pada penekanan angka kemiskinan di Papua. Kemiskinan terus bertumbuh pada saat pemerintah berupaya menaikkan angka pertumbuhan ekonomi. Dan, itu terlihat jelas ketika pemerintah berhasil melahirkan sejumlah orang yang

mengendalikan roda ekonomi di Papua.

Rakyat Papua bisa mengatakan ada segelintir orang yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan dana Otsus yang mengalir ke Papua. Cypri Jean Dale dan John Djonga dalam buku *Paradoks Papua* (2011) dengan studi kasus pola-pola ketidakadilan sosial di Kabupaten Keerom menyebut kelompok ini dengan istilah *Migran Capture* dan *Elit Capture*. Orang yang masuk ke Papua melalui program transmigrasi maupun kehendak sendiri yang mempunyai kekuatan modal dan pegetahuan. Elit Papua (pejabat politik maupun karir) yang mempunyai akses mengendalikan roda pemerintah yang menguasai dan menikmati semua pembangunan di Papua. Masyarakat asli terus termarginalisasi, jauh dari sentuhan pembangunan.

Kita melihat lagi, kekurangan tenaga kerja saat pertumbuhan ekonomi itu sulit diatasi. Para pencari kerja dari luar Papua akan dan terus mengalir. Kita tidak perlu jauh, angka pengangguran terbuka di wilayah Maluku yang sangat tinggi dalam data itu bisa mengalir ke Papua. Kalau itu yang terjadi, kemiskinan yang ada tidak akan pernah berubah, apa lagi yang dikatakan miskin itu orang asli Papua. Orang Papua akan tersingkir ke pinggiran ketika tidak mampu bersaing. Proses itu sedang berjalan dan gejalanya pun mulai terlihat.

Kita sering menemukan sejumlah anak muda memintaminta di jalan dengan alasan membersihkan jalan. Tindakan ini merupakan bagian dari kritik terhadap pemerintah yang tidak menjaga kebersihan kota, pembangunan infrastruktur jalan yang tidak berkualitas dan lain sebagainya. Mungkin cara ini dipilih sebagai bagian protes terhadap tertutupnya akses bagi mereka. Gejala ini bisa mengarah kepada konflik sosial bila tidak disadari dan tidak ditangani. Kalau orang Papua belum keluar dari garis batas pra-sejahtera perlu membatasi invasi, baik itu investor maupun pencari kerja.

Kita perlu melihat pembatasan ini demi menciptakan

posisi setara antara orang Papua dan pendatang dalam mendapatkan peluang. Bila kita tidak melakukan pembatasan (transmigran) ke Papua itu sama halnya dengan mempertahankan marginalisasi dan diskriminasi yang tidak jelas kapan berakhirnya, bila hal ini dikaitkan dengan masyarakatan ekonomi Asia. Orang Papua bisa dipastikan tersingkir dari negerinya sendiri hanya karena pemerintah tidak mampu melindungi, memenuhi, dan menghargai hak-haknya.

8. PILKADA SERENTAK: PESTA DEMOKRASI YANG TAK DEMOKRATIS

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia juga terjadi di Papua, pada 9 Desember 2015. Di Papua ada sebanyak 11 Kabupaten mengadakan pesta yang sering disebut pesta demokrasi atau pesta rakyat. Walaupun demikian masih ada sejumlah tindakan penyimpangan di dalam pesta tersebut. Rakyat dipaksa membuang pilihan bebasnya dan mengikuti kehendak mereka yang berkuasa dan berkepentingan. Mereka yang memiliki kekuatan finansial dan massa mengiring individu-individu untuk menentukan pilihan yang bukan dari hati nuraninya.

Kita dapat melihat aparat penegak hukum dan pengawas Pemilu membiarkan para kandidat melakukan aksi mobilisasi massa untuk memenangkan pertarungan. Mobilisasi massa dari luar wilayah pemilihan masuk ke daerah pemilihan, dari satu TPS ke TPS yang lain di dalam wilayah pemilihan. Mobilisasi ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Orang-orang yang mendatangi wilayah pemilihan ini membawa undangan yang sudah terdaftar dengan nama orang lain. Petugas yang ada turut memainkan sistem "*Mereka yang ada itu rupanya sudah tahu,*" ungkap salah satu pemilih yang

terlibat dalam mobilisasi massa yang difasilitasi salah satu kandidat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, 9 Desember 2015. Kandidat dan penguasa ekonomi mengeluarkan uang yang tidak sedikit dari sakunya dengan satu harapan untuk menang. Anggaran mulai dari transportasi, makan minum dan uang jasa mencoblos dari TPS ke TPS.

“Saya bawa orang dari Jayapura, Pa Kandidat memberikan uang 45 juta untuk membayar 5 mobil yang kami pakai,” ungkap seorang pria yang memobilisasi massa dari Kota Jayapura masuk ke Keerom atas permintaan salah satu kandidat.

“Kemarin dalam menentukan wakil memang menjadi masalah karena wakil yang menjadi pilihan orang bermasalah. Kalau wakilnya pengusaha, perhitungan mengembalikan modal menjadi taruhan. Masyarakat menjadi korban, pembangunan tidak jalan tetapi suka tidak suka harus mengambil resiko. Kita menyapaki 50 persen-50 persen,” ungkap salah satu anggota tim sukses bupati terpilih Keerom pada 9 Desember 2015.

Mereka yang kalah kehilangan sumber harapan mengembalikan anggaran mobilisasi. Mereka dalam posisi memikirkan sumber lain, entah itu ada atau tidak ada. Harapan itu, yang sebenarnya, kandidat yang kalah, terutama 11 kabupaten di Provinsi Papua beramai-ramai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai dalil pelanggaran demokrasi. Dalil menang curang, politik uang dan tidak adil dalam perhitungan suara. Di balik dalil itu, secara tidak sadar, semua yang mengugat tidak siap bertarung, tidak siap kalah dan menang, tidak berjiwa besar sebagai pemimpin untuk mendukung dan membangun daerah secara bersama.

Kalau ingin membangun, tidak mencari kekuasaan, mengapa tidak mendukung yang sudah menang untuk membangun? Kalau tidak demikian, mengapa mengeluarkan materi dalam pertarungan untuk merebut kekuasaan? Kita

melihat begitu lemahnya motivasi mereka merebut kekuasaan. Begitu mudahnya cara mereka merebut kekuasaan, namun menggugat itu hak dan pendidikan politik kepada publik. Kita harus mengatakan ada yang tidak beres dalam diri orang-orang yang mengoperasikan sistem demokrasi Indonesia. Hal ini menjadi kewajiban kita untuk memberitahu rakyat akan buruknya demokrasi di negara Demokrasi.

Kita juga bisa melihat dan belajar, betapa hancurnya sistem demokrasi di sebuah Republik Demokrasi. Demokrasi hanya menjadi buah bibir dan wacana yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Perjuangan penegakkan demokrasi yang dewasa masih jauh dari harapan dan masih menjadi agenda bersama yang harus diperjuangkan.

9. MSG: JALAN SOLUSI KONFLIK?

Negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) memberikan status pegamat (observer) kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan status anggota asosiasi (associate member) kepada Indonesia mewakili orang-orang Melanesia Indonesia (Melindo) dalam pertemuan puncak pemimpin-pemimpin MSG di Honiara, Salomon Island pada 26 Juni 2015. Apa yang sedang terjadi dengan pemberian status ini? Apakah ini menjadi solusi sebagaimana kebanyakan pendapat? Ada beberapa catatan sebagai jawaban atas soal ini.

Pertama, masalah Papua mulai masuk ke kawasan Melanesia. Negara-negara Melanesia melihat masalah Papua menjadi bagian dari rumah tangga orang-orang ras Melanesia. Negara-negara MSG merasa perlu melihat dan mengambil langkah atas konflik di Papua. Perhatian ini kemudian menjadi jalan upaya MSG membawa masalah Papua ke kawasan wilayah Pasifik dan ke dunia internasional.

Kedua, negara-negara MSG mengakui keberadaan

orang-orang Melanesia yang pro kemerdekaan maupun pro Integrasi di Tanah Papua. MSG mengakui keberadaan orang-orang pro kemerdekaan yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. MSG mengakui juga keberadaan orang-orang pro integrasi yang bergabung dengan orang-orang Melanesia Indonesia, menurut pemerintah Indonesia mereka itu ada di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Apakah orang-orang Melanesia Indonesia ini benar-benar ras Melanesia? Orang-orang ini tentunya menjadi ambigu, Melanesia atau ras yang mengidentifikasi mereka selama ini. Entah polinesia atau Melanesia menjadi tidak jelas. Kalau itu benar, ada satu pengakuan dari pemerintah Indonesia setelah sekian lama tidak mengakuinya. Lucunya, pengakuan itu datang ketika ada rangsangan dari pihak luar.

Ketiga, negara-negara Melanesia mengakui perjuangan kedua kelompok di meja MSG. MSG mengakui perjuangan orang Papua pro merdeka yang menentang penyimpangan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan perjuangan menentukan nasib sendiri melalui solusi damai, dekolonisasi, dan referendum. Tetapi juga, MSG mengakui perjuangan orang pro Integrasi bersama pemerintah Indonesia mempertahankan Papua dengan cara yang ditolak pro Papua merdeka. MSG mengakui pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan dan penyimpangan sejarah atas nama kedaulatan Indonesia.

Kita perlu membaca ini sebagai upaya MSG membawa kedua bela pihak yang berkonflik duduk di satu meja. MSG hendak mendudukan pemerintah Indonesia berhadapan dengan gerakan Papua merdeka, beradu pandang, beradu argumen dan mencari solusi bersama di meja MSG. MSG tidak mau kedua bela pihak menyelesaikan konflik Papua melalui konflik bersenjata. MSG ingin menempuh solusi damai saja melalui meja MSG.

Kita bisa mengatakan upaya ini bagian dari strategi tetapi juga terlihat ada pertarungan kepentingan negara-negara MSG. Vanuatu, Salomon Island dan organisasi perlawanan Kanak megedepankan kepentingan kemanusiaan dan persaudaraan Melanesia. PNG dan Fiji mengedepankan kepentingan diplomasi ekonomi politik luar negeri.

Isu Papua boleh dikata menjadi bahan kontak diplomasi dengan Indonesia saat ini. Negara PNG mendukung Indonesia lebih kepada upaya menjaga keamanan wilayah perbatasan. PNG tidak mau peluang kerja sama dengan negara tetangganya yang menjadi pintuk masuk ke wilayah Asia Tenggara. Negara PNG pun tidak mau menciptakan musuh dengan negara tetangganya, walaupun menolak pelanggaran HAM di Papua. Sedangkan negara Fiji lebih kepada kepentingan menggalang dukungan menjadi negara kuat di Pasifik dan terlebih Melanesia. Indonesia menjadi salah satu target dari Fiji di wilayah Asia Tenggara, selain Asia Timur, dan China.

Kita bisa melihat bahwa kepentingan ini akan berdampak pada status ULMWP dan Melindo di MSG nanti. Kedua kelompok terus beranjak naik menjadi anggota penuh atau salah satu disepak keluar atau menarik dari MSG. ULMWP mempunyai peluang terus beranjak ke anggota asosiasi dan menjadi anggota penuh atau bergerak di tempat ataupun dikeluarkan. MSG mempunyai kewenangan mengeluarkan ULMWP ketika diplomasi Indonesia melalui PNG dan Fiji mampu mempengaruhi Vanuatu dan Salomon Island. Pemerintah Indonesia bisa bernasib yang sama. Melindo bisa beranjak naik atas dukungan PNG dan Fiji atas nama kerja sama tetapi Melindo tidak mempunyai argumen kuat menjadi bagian dari MSG ketika pemimpin-pemimpin MSG konsisten pada tujuan keberadaan MSG, dimana orang-orang Melanesia berhimpun lebih pada alasan politik. Belum ada tokoh yang membawa dan memperjuangkan nasib Melindo

di MSG, selain pro integrasi Papua.

Kita perlu melihat hal itu sebagai ancaman konflik disela-sela upaya MSG mengakui kedua kelompok ini. Kedua belah pihak akan memperlihatkan eksistensi mulai dari diplomasi luar negeri hingga upaya saling menekan. Kampanye Papua merdeka makin lancar disela-sela upaya pemerintah Indonesia membatasinya. Upaya pembatasan itu bisa datang dalam berbagai bentuk, dari bentuk kekerasan hingga yang lebih lembut.

10. KONTRAK KARYA FREEPORT DAN PASAR MAMA PAPUA

Enam bulan akhir pada tahun 2015, isu dan berita terkait PT Freeport semakin ramai dibicarakan, entah itu melalui media cetak lokal di Papua, nasional maupun media televisi dan internet. Isu Freeport semakin seksi dengan topik “Papa Minta Saham”. Sebelumnya, di awal tahun 2015, isu Freeport mengenai proyek pembangunan smelter. Perdebatan lokasi pembangunan pabrik smelter cukup memanas, tolak-menolak dibangun di daerah pulau Jawa atau di Papua. Pada Minggu, 27 Desember 2015 Gubernur Lukas Enembe menegaskan bahwa lokasi pembangunan smelter direncanakan di Bintuni, Provinsi Papua Barat. Lokasi pembangunannya telah ditentukan dari pemerintah pusat. Berdebat lagi, tetapi akhirnya diputuskan oleh Jakarta bukan oleh Papua.

Perdebatan pembangunan smelter ini beralih lagi dengan topik “Papa Minta Saham.” Perdebatan ini tentang perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Perdebatan ini akhirnya menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto. Sejak tengah tahun hingga akhir 2015 topik “Papa Minta Saham” hampir selalu diberitakan di media. Banyak pandangan dari pejabat publik dan masyarakat mengenai

kontrak karya Freeport. Ada yang dengan tegas menolak, ada yang berujar perpanjangan kontrak karya Freeport harus melibatkan Pemda Papua dan masyarakat Papua, khususnya pemilik hak ulayat. Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua Lukas Enembe mendesak agar pemerintah pusat untuk segera memperpanjang kontrak PT Freeport. Menurut Lukas, perpanjangan kontrak dengan alasan bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul di kemudian hari dari perpanjangan kontrak tersebut, 45% pengusaha asli Papua hidupnya tergantung pada hasil tambang Freeport, 91% Pemda Mimika tergantung pada Freeport dan perpanjangan tersebut harus melibatkan Pemda Papua.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung berpendapat bahwa Pemda Papua harus dilibatkan di dalam segala proses perpanjangan tersebut. Sementara itu anggota DPR Papua Ruben Magai lebih memilih dan setuju kalau kontrak Freeport tidak diperpanjang karena terjadi banyak konflik dan pelanggaran HAM di sana. Bahkan pada 17 Desember 2015, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua dan Rakyat Papua (AMPERA) melakukan aksi demo untuk menolak perpanjangan karya PT FI. Satu alasan yang jelas bahwa kehadiran PT FI telah memicu pelanggaran HAM di Papua, khususnya di areal perusahaan tersebut.

Pejabat Papua dan Pusat boleh berdebat. Pejabat Papua boleh memberikan pendapatnya di media namun semuanya akan ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah pusat. Kekayaan sumber daya alam selalu menjadi perhatian, negara dan pejabatnya saling berburu tetapi segala pelanggaran, konflik yang sudah banyak menelan korban jiwa manusia tidak diperdebatkan. Hal itu dianggap biasa. Apakah korban yang selama ini, baik sipil maupun aparat keamanan, adalah tumbal? Bagaimana dengan nasib warga yang menjadi

pemilik hak ulayat tersebut?

Terkait perpanjangan kontrak tersebut, Presiden Joko Widodo menawarkan lima syarat untuk PT Freeport. Syarat *pertama*, perpanjangan kontrak baru bisa dilaksanakan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014. *Kedua*, PT Freeport harus meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri. *Ketiga*, terkait dengan divestasi saham Freeport untuk dalam negeri. Hal ini belum diputuskan oleh presiden karena masih ditimbang apakah PT Freeport harus melepas sahamnya lewat pasar modal atau mekanisme yang lainnya. *Keempat*, meningkatkan pembayaran royalti khususnya untuk tiga komoditas tambangnya yakni tembaga, emas dan perak. Royalti naik menjadi 4% dari 3,5% untuk tembaga, emas 1% menjadi 3,7% dan perak 1% menjadi 3,25%. *Kelima*, PT Freeport wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).

Perdebatan dan diskusi seputar perpanjangan Kontrak PT Freeport Indonesia mungkin terus menjadi panas. Tak dipungkiri bahwa ada dampak positif yang diberikan oleh PT Freeport bagi masyarakat Papua, Pemda Papua dan negara Indonesia. Apakah dampak positif tersebut sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang selama ini dialami oleh masyarakat Papua? Apakah perpanjangan kontrak PT Freeport ini sungguh-sungguh menjadi kemauan dan keinginan masyarakat Papua? Atau hanya menjadi keinginan dan kepentingan sekelompok orang?

Ketika para pejabat ramai-ramai berdebat tentang perpanjangan kontrak PT Freeport, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) menagih janji kepada pemerintah. Janji untuk membangun sebuah pasar permanen bagi mama-mama asli Papua. Janji yang sampai saat ini masih menggantung dan belum terealisasi. Demi menagih janji yang tak kunjung terwujud, SOLPAP mengutus enam mama Papua

dan koalisi untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lainnya. Usaha ini dilakukan untuk meminta dan menagih janji Presiden RI ketika melakukan kunjungan ke Papua tahun 2014. Di tingkat Papua, suara ini terus digaungkan. Pada Maret 2015, SOLPAP dan koalisi melakukan aksi di Kantor Gubernur Papua untuk menagih janji pembangunan pasar permanen. Tim Pokja Rumah Transisi telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan sudah terbentuk Panja dari DPR Papua untuk mendorong pembangunan pasar permanen. Namun, hingga kini rencana pembangunan pasar itu masih belum jelas dan kabur. Mereka hanya menabur janji kepada mama-mama Papua.

Keinginan seorang mama Papua untuk mendapatkan pasar permanen yang sederhana masih bertabrakan dengan keinginan dan mungkin kepentingan para pejabat di Papua. Para anggota DPR Papua, Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura saling melemparkan tanggung jawab serta saling menyalahkan. Semuanya hanya berjanji dan belum merealisasikan janjinya. Seorang mama yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anaknya sangat sulit mendapatkan sebuah pasar permanen dari anak-anaknya. Seorang mama harus terus berteriak dan menangis untuk mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya. Kasih sayang seorang mama, yang mengandung dan melahirkan anak-anak, sepertinya dibalas dengan air tuba.

II. PRESIDEN JOKO WIDODO, DIALOG, DAN 'KAPSUL WAKTU'

Ruang dialog yang ditawarkan sebagai sarana untuk mencari akar persoalan di Papua bernasib 'tergantung'. Dalam masa kampanyenya Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan persoalan di Papua melalui dialog. Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua pada Desember

2014, janji ini masih terungkap. Presiden Joko Widodo tetap mengedepankan dialog di Papua. Janji terus dikejar oleh Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur dan DPR Papua.

Anggota Komisi A DPR Papua Bidang Hukum dan HAM Ruben Magay dan Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa rencana itu ide tentang pelaksanaan dialog Papua-Jakarta sudah diperjuangkan selama ini. Yang dinantikan adalah kemauan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan rencana tersebut. Hal yang sama juga dipertegas oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya. Menurut Mayjen Fuad, Mabes TNI mengikuti semua kebijakan politik yang direncanakan oleh pemerintah, termasuk rencana dialog antara pemerintah pusat dan berbagai kelompok masyarakat di Papua. Apakah dialog dapat terwujud? Masih menjadi perdebatan.

Rencana untuk melaksanakan dialog bukan menjadi miliknya Jaringan Damai Papua (JDP) melainkan sudah menjadi rencana sebagian masyarakat di Papua entah itu masyarakat sipil maupun Pemda Papua. Pada Februari, Gubernur Lukas Enembe mengatakan bahwa MRP akan memfasilitasi konsep dialog dengan pemerintahan pusat. Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy mengatakan Joko Widodo dianjurkan membentuk tim kerja ad hoc untuk mempersiapkan format dialog Papua-Jakarta. Pada Maret, JDP sebagai penggagas dialog mulai merancang sebuah proses untuk mewujudkan dialog yang disebut dengan 'Serap Aspirasi Rakyat (SAR)', dengan tema '*Mari Kitong Bicara Dulu*'. JDP mengajak masyarakat Papua untuk berdialog terlebih dahulu secara internal sebelum berdialog dengan pemerintah pusat. Walaupun demikian, tawaran dialog ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan internal dan eksternal Papua.

Dalam kunjungannya pada 7-8 Mei 2015, sebuah pernyataan yang mengejutkan publik Papua dan pihak yang

mendorong dialog, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di Papua tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dialog khusus. Pernyataan ini ditegaskan lagi oleh Pangdam Cenderawasih Papua bahwa “stop eksploitasi dialog Jakarta Papua, karena sekarang sudah ada dialog melalui kunjungan presiden.” Dialog akhirnya tetap menjadi sebuah rencana dan ide saja.

Terlepas dari perdebatan seputar dialog, ada beberapa hal yang dapat disimak dalam kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut. Pertama, keamanan yang sangat luar biasa kepada seorang kepala negara. begitu banyak tentara yang disiapkan sekitar 3600 personil, 2400 personil kepolisian, lima buah helikopter, dua buah kapal perang, dua buah pesawat hercules dan 12 tim sniper. Sepertinya negara mendemonstrasikan kekuatannya kepada masyarakat Papua. Tampaknya dana yang dikucurkan negara untuk membiayai keamanan itu sangat besar.

Hal kedua yang patut diapresiasi adalah kemauan baik Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada kelima Tapol pembobolan gudang senjata di Wamena. Beberapa kalangan menilai pemberian grasi tersebut adalah bagian pencitraan negara di tengah masyarakat Papua. Walaupun berbagai kasus pelanggaran HAM belum diselesaikan, mungkin dengan membebaskan kelima Tapol tersebut, masyarakat Papua menganggap ‘negara sungguh baik’. Hal ketiga, kunjungannya ke Merauke semakin menguatkan kemauan negara untuk menjadikan Papua sebagai lahan investasi pada tahun 2016. Kunjungan Presiden Joko Widodo itu lebih banyak menguntungkan negara dan para pejabat ketimbang masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang selama ini diperjuangkan sengaja dilupakan oleh seorang kepala negara.

Di akhir tahun, Desember 2015, sekali lagi Presiden berkunjung ke Papua. Niat baik dalam kunjungan tersebut

dan mungkin perhatiannya untuk Papua perlu diapresiasi dan dihargai. Seperti dalam kunjungannya pertama, sudah pasti dan jelas ada beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukannya dalam kunjungan tersebut. Kunjungan ke Merauke agak simbolis dengan menanam 'kapsul waktu' yang berisikan harapan-harapan pokok Presiden untuk jangka waktu yang panjang, yang terwujud pada tahun 2085.

Di dalam 'kapsul waktu' itu ada tujuh buah harapan yang mencerminkan gambaran ideal dari seorang pemimpin negara. Lima di antaranya adalah harapan menyangkut pengembangan sosial-ekonomi: pengembangan sumber daya manusia, pusat pendidikan teknologi, infrastruktur yang merata, barometer pertumbuhan ekonomis dunia, negara yang mandiri dan berpengaruh. Lalu, dua diantaranya adalah harapan menyangkut unsur sosio-budaya: menjunjung tinggi pluralisme, budaya religius dan nilai-nilai etika; warga dan aparat negara bebas korupsi.

Sudah tentu aspek-aspek yang disinggung tersebut sangat penting dan menjadi inti dan landasan kebijakan Presiden. Pertanyaannya adalah apakah harapan tersebut merupakan harapan dari orang Asli Papua?

Bagi masyarakat asli Papua mendengar ketujuh harapan tersebut mungkin penuh pesimis karena harapan tersebut diungkapkan ketika di Papua masih sangat kental dengan konflik dan kekerasan. Bahkan menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo, terjadi kekerasan yang sangat tidak berperikemanusiaan di Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Dengan latar belakang ini, mungkin masyarakat di Papua sebenarnya mengharapkan: Pertama, adanya dialog sejati yang diangkat sebagai satu-satunya jalan bermartabat dalam penyelesaian masalah. Sudah tentu dialog yang dimaksudkan ini jauh lebih luas daripada dialog pembangunan yang dimaksudkan oleh Presiden. Kedua, harapan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang baru terjadi pada tahun 2014.

Ketiga, harapan supaya kita semua dapat hidup dalam damai dan bebas dari kekerasan. Barangkali, harapan-harapan seperti ini harus mendapatkan tempat yang utama ketika Presiden mengisi harapannya di dalam ‘kapsul waktu’.

Kunjungan kedua Presiden Joko Widodo tidak ada bedanya dengan kunjungan sebelumnya. Diharapkan di dalam kunjungan ini komitmen Presiden Joko Widodo diuji untuk secara berani menekan para pejabatnya mengungkapkan para pelaku penembakan di Paniai pada 8 Desember 2014. Kemudian, kunjungan Presiden selanjutnya benar-benar membawa manfaat dan bernilai, bila komitmen-komitmennya terhadap Papua direalisasikan secara nyata. Kalau tidak, kunjungan itu hanya berarti seremonial saja.

